



Kemendikdasmen

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Rapor Pendidikan Indonesia 2025

Capaian dan Agenda Perbaikan



Rapor Pendidikan Indonesia 2025

Capaian dan Agenda Perbaikan



Kemendikdasmen

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Rapor Pendidikan Indonesia 2025: Capaian dan Agenda Perbaikan

Pengarah

Toni Toharudin, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Muhammad Yusro, Sekretaris Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

Penanggung Jawab

Irsyad Zamjani, Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Penyusun

Indah Pratiwi, Imelda Samosir, Dian Rahayu Ekowati, M. Emir Wicaksono, Bonifatius Galih
Krismahardika, Andry Rihardika, Fransisca Nur'aini Krisna, Yusuf Faisal Martak.

Penyunting

Gunardi Handoko

Foto Sampul

Dokumentasi BSKAP | Ibar Warsita

Tata Letak

Dwi Pengkik

Cetakan pertama, Desember 2025

xx + 174 hlm; 15,5 x 23 cm

Pengutipan/Sitasi

Pratiwi, I., Samosir, I., Ekowati, D. R., Wicaksono, M.E., Krismahardhika, B.G., Rihardika, A.,
Krisna, F. N., Martak, Y. F. (2025). *Rapor Pendidikan Indonesia 2025: Capaian dan Agenda
Perbaikan*. Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan.

Penerbit:

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Kemendikdasmen Gedung B
Cipete Selatan. Cilandak. Jakarta 12410
Telp. +6221-5736365 | Faks. +6221-5741664
Website: <https://pskp.kemendikdasmen.go.id/>
Email: pskp.kemendikbudristek@gmail.com

© Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, BSKAP, Kemendikdasmen 2025

Buku ini dapat diperbanyak dan diterjemahkan baik sebagian maupun keseluruhan, tetapi tidak untuk diperjualbelikan maupun digunakan untuk tujuan komersial.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya laporan **“Rapor Pendidikan Indonesia 2025: Capaian dan Agenda Perbaikan”**. Laporan ini disusun dengan memanfaatkan sepenuhnya data Rapor Pendidikan sebagai salah satu keluaran utama Evaluasi Sistem Pendidikan, sekaligus menjembatani temuan-temuan teknis dengan kebutuhan perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat maupun daerah. Di tengah upaya penguatan perencanaan berbasis data, laporan ini diharapkan dapat menjadi rujukan ringkas bagi para pengambil keputusan dalam membaca kondisi aktual sistem pendidikan Indonesia, baik dari sisi capaian, kesenjangan, maupun area prioritas yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Laporan ini merangkum perkembangan periode 2022–2024, masa krusial pascapandemi ketika sekolah mulai kembali beroperasi penuh dan berbagai program pemulihan pembelajaran dijalankan. Analisis difokuskan pada indikator-indikator prioritas dalam Rapor Pendidikan, yaitu Literasi, Numerasi, Karakter, Kualitas Pembelajaran, Iklim Keamanan, dan Iklim Kebinekaan, yang diperkaya dengan telaah mengenai kualitas guru dan tenaga kependidikan, tata kelola, serta infrastruktur pendidikan. Selain menggambarkan tren capaian nasional, laporan ini juga menyoroti secara khusus dinamika kesenjangan antarkelompok wilayah (tertinggal dan nontertinggal), status sosial ekonomi satuan pendidikan, jenjang pendidikan, serta perbedaan antara satuan pendidikan negeri dan swasta. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya menampilkan siapa yang sudah tinggi capaian mutunya, tetapi juga di mana dan mengapa ketertinggalan masih terjadi.

Kami menyadari, laporan ini memiliki keterbatasan. Analisis yang tersaji bertumpu pada indikator prioritas dan ketersediaan data dalam ekosistem Rapor Pendidikan sehingga tidak semua aspek pendidikan dapat dibahas secara terperinci. Namun, kami meyakini bahwa temuan-temuan

yang dihimpun telah cukup untuk memberikan gambaran utuh mengenai kemajuan, tantangan, dan titik-titik kritis yang perlu direspons melalui kebijakan dan program yang lebih terarah. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi, mulai dari satuan pendidikan, pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, hingga mitra pembangunan yang selama ini terlibat dalam penguatan pemanfaatan Rapor Pendidikan dan Evaluasi Sistem Pendidikan.

Akhir kata, kami berharap bahwa laporan ini dapat menjadi bahan refleksi sekaligus panduan praktis bagi pembuat kebijakan, pemimpin daerah, kepala satuan pendidikan, dan semua pemangku kepentingan yang peduli pada perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Di balik setiap angka yang tersaji, terdapat realitas kehidupan murid, upaya guru dan kepala sekolah, serta harapan orang tua dan masyarakat. Semoga ikhtiar bersama ini memperkuat budaya pengambilan keputusan berbasis bukti dan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada peningkatan hasil belajar semua anak Indonesia.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

Toni Toharudin

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	vii
DAFTAR SINGKATAN	xix
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	13
Tujuan.....	15
Ruang Lingkup	16
Metode	17
BAB II EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN	19
Kaitan Evaluasi Sistem Pendidikan dengan Rapor Pendidikan	21
Dasar Pembentukan Rapor Pendidikan	23
Posisi Rapor Pendidikan dalam Dokumen ini	27
BAB III PEMERATAAN PARTISIPASI PENDIDIKAN	29
BAB IV CAPAIAN RAPOR PENDIDIKAN SD/MI/SEDERAJAT	43
Capaian Literasi.....	43
Capaian Numerasi.....	45
Capaian Karakter	48
Capaian Kualitas Pembelajaran.....	50
Capaian Iklim Keamanan.....	53
Capaian Iklim Kebinekaan.....	57
Pemerataan Kualitas Guru	58
Sertifikasi Guru	60
Pelatihan Guru.....	62
Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan.....	64
BAB V CAPAIAN RAPOR PENDIDIKAN SMP/MTs/SEDERAJAT	71
Capaian Literasi.....	71
Capaian Numerasi.....	73
Capaian Karakter	76
Capaian Kualitas Pembelajaran.....	78

Capaian Iklim Keamanan.....	81
Capaian Iklim Kebinekaan.....	84
Pemerataan Kualitas Guru	86
Sertifikasi Guru	87
Pelatihan Guru.....	89
Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan.....	90
BAB VI CAPAIAN RAPOR PENDIDIKAN SMA/MA/SEDERAJAT	99
Capaian Literasi.....	99
Capaian Numerasi.....	103
Capaian Karakter	106
Capaian Kualitas Pembelajaran.....	108
Capaian Iklim Keamanan.....	110
Capaian Iklim Kebinekaan.....	114
Pemerataan Kualitas Guru	116
Sertifikasi Guru	117
Pelatihan Guru.....	119
Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan.....	121
BAB VII CAPAIAN RAPOR PENDIDIKAN SMK/MAK	129
Capaian Literasi.....	129
Capaian Numerasi.....	132
Capaian Karakter	134
Capaian Kualitas Pembelajaran.....	137
Capaian Iklim Keamanan.....	140
Capaian Iklim Kebinekaan.....	144
Pemerataan Kualitas Guru	146
Sertifikasi Guru	148
Pelatihan Guru.....	150
Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan.....	151
Penyerapan Lulusan SMK/MAK	158
Kompetensi Lulusan SMK/MAK	159
BAB VIII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	161
Kesimpulan.....	161
Rekomendasi.....	165
DAFTAR PUSTAKA	173

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Rapor Pendidikan (Sumber: Pusat Informasi Rapor Pendidikan Kemendikdasmen)	23
Gambar 2.2	Ilustrasi Pemetaan Input-Proses-Output (Sumber: Pusat Informasi Rapor Pendidikan Kemendikdasmen)	24
Gambar 3.1	Tren APS Nasional pada 2022–2024 (Sumber: Rapor Pendidikan 2022-2024)	30
Gambar 3.2	Tren APS Antarkelompok Gender pada Pendidikan Formal Tahun 2023 (Sumber data: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemendikdasmen)	31
Gambar 4.1	Tren Proporsi Murid SD/MI/Sederajat yang Mencapai Kompetensi Minimum Literasi Tahun 2022-2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)	43
Gambar 4.2	Sebaran Persentase Murid SD/MI/Sederajat yang Mencapai Kompetensi Minimum Literasi Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	44
Gambar 4.3	Kesenjangan Skor Literasi SD/MI/Sederajat Berdasarkan Status Sosial Ekonomi dan Wilayah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	45
Gambar 4.4	Tren Proporsi Murid SD/MI/Sederajat yang Mencapai Kompetensi Numerasi Tahun 2022-2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)	46
Gambar 4.5	Sebaran Persentase Murid SD/MI/Sederajat yang Mencapai Kompetensi Minimum Numerasi Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	46
Gambar 4.6	Kesenjangan Skor Numerasi SD/MI/Sederajat Berdasarkan Status Sosial Ekonomi dan Wilayah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	47
Gambar 4.7	Proporsi Satuan Pendidikan SD/MI/Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Indikator Karakter Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)	48

Gambar 4.8 *Heatmap* Proporsi Satuan Pendidikan SD/MI/Sederajat Kategori “Baik” pada indikator Karakter Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah) 50

Gambar 4.9 Proporsi Satuan Pendidikan SD/MI/Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Indikator Kualitas Pembelajaran Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah)..... 51

Gambar 4.10 *Heatmap* Proporsi Satuan Pendidikan SD/MI/Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Indikator Kualitas Pembelajaran Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah)..... 52

Gambar 4.11 Analisis Regresi Persebaran Data Hubungan Indikator Kualitas Pembelajaran dan Subindikator Dukungan Psikologis terhadap Literasi SD/MI/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)..... 53

Gambar 4.12 Proporsi Satuan Pendidikan SD/MI/Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Indikator Iklim Keamanan Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah) 54

Gambar 4.13 *Heatmap* Proporsi Sekolah SD/MI/Sederajat yang dengan Kategori “Baik” pada Indikator Iklim Keamanan Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah)..... 55

Gambar 4.14 Analisis Regresi Persebaran Data Hubungan Indikator Iklim Keamanan dan Subindikator Pengalaman Murid terkait Rokok, Minuman Keras, dan Narkoba & Pemahaman dan Sikap terhadap Hukuman Fisik Murid terhadap Literasi SD/MI/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)..... 56

Gambar 4.15 Proporsi Satuan Pendidikan SDI/MI/Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Indikator Iklim Kebinekaan Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah) 57

Gambar 4.16 *Heatmap* Proporsi Satuan Pendidikan SD/MI/Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Iklim Kebinekaan Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah) 58

Gambar 4.17 Sebaran Distribusi Guru SD/MI/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah) 59

Gambar 4.18	Indeks Distribusi Guru SD/MI/Sederajat Berdasarkan Wilayah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	59
Gambar 4.19	Proporsi Guru Besertifikat di SD/MI/Sederajat Tingkat Nasional Tahun 2022-2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)	60
Gambar 4.20	Sebaran Proporsi Guru Besertifikat di SD/MI/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	61
Gambar 4.21	Proporsi guru Besertifikat di SD/MI/Sederajat Berdasarkan Status Sekolah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	62
Gambar 4.22	Sebaran Pengalaman Pelatihan Guru SD/MI/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	63
Gambar 4.23	Pengalaman Pelatihan Guru SD/MI/Sederajat Berdasarkan Status Sekolah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	63
Gambar 4.24	Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan SD/MI/Sederajat Berdasarkan Status Sekolah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	64
Gambar 4.25	Sebaran Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan SD/MI/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	65
Gambar 4.26	Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan SD/MI/Sederajat di 10 Kabupaten/Kota Tertinggi Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	66
Gambar 4.27	Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan SD/MI/Sederajat di 10 Kabupaten/Kota Terendah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	66
Gambar 4.28	Sebaran Indeks Fasilitas Ruang Satuan Pendidikan SD/MI/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)Tingkat SD/MI/Sederajat Berdasarkan Data Rapor Pendidikan 2024.....	67
Gambar 4.29	Sebaran Indeks Sanitasi Satuan Pendidikan SD/MI/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	68
Gambar 4.30	Sebaran Indeks Bahan dan Fasilitas Belajar Literasi Satuan Pendidikan SD/MI/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	69

Gambar 4.31 Sebaran Indeks Fasilitas TIK Satuan Pendidikan SD/MI/Sederajat Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah) 70

Gambar 5.1 Tren Proporsi Murid SMP/MTs/Sederajat yang Mencapai Kompetensi Minimum Literasi Tahun 2022–2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah) 71

Gambar 5.2 Sebaran Persentase Murid SMP/MTs/Sederajat yang Mencapai Kompetensi Minimum Literasi Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah) 72

Gambar 5.3 Kesenjangan Skor Literasi SMP/MTs/Sederajat Berdasarkan Status Sosial Ekonomi dan Wilayah Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah) 73

Gambar 5.4 Tren Proporsi Murid SMP/MTs/Sederajat yang Mencapai Kompetensi Minimum Numerasi Tahun 2022–2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah) 74

Gambar 5.5 Sebaran Persentase Murid SMP/MTs/Sederajat yang Mencapai Kompetensi Minimum Numerasi Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah) 74

Gambar 5.6 Kesenjangan Skor Numerasi SMP/MTs/Sederajat Berdasarkan Status Sosial Ekonomi dan Wilayah Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah) 75

Gambar 5.7 Proporsi Satuan Pendidikan Tingkat SMP/MTs/Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Indikator Karakter Tahun 2022–2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah) 76

Gambar 5.8 *Heatmap* Proporsi Satuan Pendidikan SMP/MTs/Sederajat Kategori “Baik” pada indikator Karakter Tahun 2022–2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah) 77

Gambar 5.9 Proporsi Satuan Pendidikan SMP/MTs/Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Indikator Kualitas Pembelajaran Tahun 2022–2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah) 78

Gambar 5.10 *Heatmap* Proporsi Satuan Pendidikan SMP/MTs/Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Indikator Kualitas Pembelajaran Tahun 2022–2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah) 79

Gambar 5.11	Analisis Regresi Persebaran Data Hubungan Indikator Kualitas Pembelajaran dan Subindikator Dukungan Psikologis terhadap Literasi SMP/MTs/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	80
Gambar 5.12	Proporsi Satuan Pendidikan SMP/MTs/Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Indikator Iklim Keamanan Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)	81
Gambar 5.13	<i>Heatmap</i> Proporsi Sekolah SMP/MTs/Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Indikator Iklim Keamanan Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)	82
Gambar 5.14	Analisis Regresi Persebaran Data Hubungan Indikator Iklim Keamanan dan Subindikator Pemahaman dan Sikap Guru tentang Kekerasan Seksual terhadap Literasi SMP/MTs/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	83
Gambar 5.15	Proporsi Satuan Pendidikan SMP/MTs/Sederajat Berkategori “Baik” pada Indikator Iklim Kebinekaan Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)	84
Gambar 5.16	<i>Heatmap</i> Proporsi Satuan Pendidikan SMP/MTs/Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Iklim Kebinekaan Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)	85
Gambar 5.17	Sebaran Distribusi Guru Tingkat SMP/MTs/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	86
Gambar 5.18	Indeks Distribusi Guru SMP/MTs/Sederajat Berdasarkan Wilayah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	86
Gambar 5.19	Proporsi Guru Bersertifikat di SMP/MTs/Sederajat Tingkat Nasional Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)	87
Gambar 5.20	Sebaran Proporsi Guru Bersertifikat di SMP/MTs/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	88
Gambar 5.21	Proporsi guru Bersertifikat di SMP/MTs/Sederajat Berdasarkan Status Sekolah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	88

Gambar 5.22 Sebaran Pengalaman Pelatihan Guru SMP/MTs/ Sederajat Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah) 89

Gambar 5.23 Pengalaman Pelatihan Guru SMA/MA/Sederajat Berdasarkan Status Sekolah Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah) 90

Gambar 5.24 Sebaran Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan SMP/MTs/ Sederajat Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah) 90

Gambar 5.25 Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan SMP/MTs/Sederajat di 10 Kabupaten/Kota Tertinggi Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah) 91

Gambar 5.26 Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan SMP/MTs/Sederajat di 10 Kabupaten/Kota Terendah Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah) 92

Gambar 5.27 Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan SMP/MTs//Sederajat Berdasarkan Status Sekolah Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah) 93

Gambar 5.28 Sebaran Indeks Fasilitas Ruang Satuan Pendidikan SMP/MTs/Sederajat Berdasarkan Data Rapor Pendidikan Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah) 94

Gambar 5.29 Sebaran Indeks Sanitasi di tingkat SMP/MTs/ Sederajat Berdasarkan Data Rapor Pendidikan Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah) 95

Gambar 5.30 Sebaran Indeks Bahan dan Fasilitas Belajar Literasi Tingkat SMP/MTs/Sederajat Berdasarkan Data Rapor Pendidikan Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah) 96

Gambar 5.31 Sebaran Indeks Fasilitas TIK Satuan Pendidikan SMP/MTs/Sederajat Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah) 97

Gambar 6.1 Tren Proporsi Murid SMA/MA/Sederajat yang Mencapai Kompetensi Minimum Literasi Tahun 2022-2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah) 100

Gambar 6.2 Sebaran Persentase Murid SMA/MA/Sederajat yang Mencapai Kompetensi Minimum Literasi Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah) 100

Gambar 6.3	Kesenjangan Skor Literasi SMA/MA/Sederajat Berdasarkan Status Sosial Ekonomi dan Wilayah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	102
Gambar 6.4	Tren Proporsi Murid SMA/MA/Sederajat yang Mencapai Kompetensi Numerasi Tahun 2022-2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)	103
Gambar 6.5	Sebaran Persentase Murid SMA/MA/Sederajat yang Mencapai Kompetensi Minimum Numerasi Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	104
Gambar 6.6	Kesenjangan Skor Numerasi SMA/MA/Sederajat Berdasarkan Status Sosial Ekonomi dan Wilayah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	105
Gambar 6.7	Proporsi Satuan Pendidikan SMA/MA/Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Indikator Karakter Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)	106
Gambar 6.8	<i>Heatmap</i> Proporsi Satuan Pendidikan SMA/MA/ Sederajat Kategori “Baik” pada indikator Karakter Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)	107
Gambar 6.9	Proporsi Satuan Pendidikan SMA/MA/Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Indikator Kualitas Pembelajaran Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)	108
Gambar 6.10	<i>Heatmap</i> Proporsi Satuan Pendidikan SMA/MA/ Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Indikator Kualitas Pembelajaran Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)	109
Gambar 6.11	Analisis Regresi Persebaran Data Hubungan Indikator Kualitas Pembelajaran dan Subindikator Dukungan Psikologis terhadap Literasi SMA/MA/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	110
Gambar 6.12	Proporsi Satuan Pendidikan SMA/MA/Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Indikator Iklim Keamanan Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)	111

Gambar 6.13 *Heatmap* Proporsi Sekolah SMA/MA/Sederajat yang dengan Kategori “Baik” pada Indikator Iklim Keamanan Tahun 2022–2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah) 112

Gambar 6.14 Analisis Regresi Persebaran Data Hubungan Indikator Iklim Keamanan dan Subindikator Pemahaman dan Sikap Guru tentang Kekerasan Seksual & Kesejahteraan Psikologis (*Wellbeing*) Murid terhadap Literasi SMA/MA/Sederajat Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah) 113

Gambar 6.15 Proporsi Satuan Pendidikan SMA/MA/Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Indikator Iklim Kebinekaan Tahun 2022–2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah) 114

Gambar 6.16 *Heatmap* Proporsi Satuan Pendidikan SMA/MA/Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Iklim Kebinekaan Tahun 2022–2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah) 115

Gambar 6.17 Sebaran Distribusi Guru SMA/MA/Sederajat Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah) 116

Gambar 6.18 Indeks Distribusi Guru SMA/MA/Sederajat Berdasarkan Wilayah Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah) 117

Gambar 6.19 Proporsi Guru Besertifikat di SMA/MA/Sederajat Tingkat Nasional Tahun 2022-2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah) 118

Gambar 6.20 Sebaran Proporsi Guru Besertifikat di SMA/MA/Sederajat Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah) 118

Gambar 6.21 Proporsi guru Besertifikat di SMA/MA/Sederajat Berdasarkan Status Sekolah Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah) 119

Gambar 6.22 Sebaran Pengalaman Pelatihan Guru SMA/MA/Sederajat Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah) 120

Gambar 6.23 Pengalaman Pelatihan Guru SMA/MA/Sederajat Berdasarkan Status Sekolah Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah) 120

Gambar 6.24	Sebaran Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan SMA/MA/ Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	121
Gambar 6.25	Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan SMA/MA/Sederajat per Provinsi Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	122
Gambar 6.26	Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan SMA/MA/ Sederajat Berdasarkan Status Sekolah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	123
Gambar 6.27	Sebaran Indeks Fasilitas Ruang Satuan Pendidikan SMA/MA/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	124
Gambar 6.28	Sebaran Indeks Sanitasi Satuan Pendidikan SMA/MA/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	125
Gambar 6.29	Sebaran Indeks Bahan dan Fasilitas Belajar Literasi Satuan Pendidikan SMA/MA/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	126
Gambar 6.30	Sebaran Indeks Fasilitas TIK Satuan Pendidikan SMA/MA/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	127
Gambar 7.1	Tren Proporsi Murid SMK/MAK yang Mencapai Kompetensi Minimum Literasi Tahun 2022-2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)	129
Gambar 7.2	Sebaran Persentase Murid SMK/MAK yang Mencapai Kompetensi Minimum Literasi Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	130
Gambar 7.3	Kesenjangan Skor Literasi SMK/MAK Berdasarkan Status Sosial Ekonomi dan Wilayah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	131
Gambar 7.4	Tren Proporsi Murid SMK/MAK yang Mencapai Kompetensi Numerasi Tahun 2022-2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)	132
Gambar 7.5	Sebaran Persentase Murid SMK/MAK yang Mencapai Kompetensi Minimum Numerasi Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	133
Gambar 7.6	Kesenjangan Skor Numerasi SMK/MAK Berdasarkan Status Sosial Ekonomi dan Wilayah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	134

Gambar 7.7 Proporsi Satuan Pendidikan SMK/MAK dengan Kategori “Baik” pada Indikator Karakter Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah) 135

Gambar 7.8 *Heatmap* Proporsi Satuan Pendidikan SMK/MAK Kategori “Baik” pada indikator Karakter Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah) 136

Gambar 7.9 Proporsi Satuan Pendidikan SMK/MAK dengan Kategori “Baik” pada Indikator Kualitas Pembelajaran Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah) 137

Gambar 7.10 *Heatmap* Proporsi Satuan Pendidikan SMK/MAK dengan Kategori “Baik” pada Indikator Kualitas Pembelajaran Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah) 138

Gambar 7.11 Analisis Regresi Persebaran Data Hubungan Indikator Kualitas Pembelajaran dan Subindikator Dukungan Psikologis terhadap Literasi SMK/MAK Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah) 139

Gambar 7.12 Proporsi Satuan Pendidikan SMK/MAK dengan Kategori “Baik” pada Indikator Iklim Keamanan Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah) 140

Gambar 7.13 *Heatmap* Proporsi Sekolah SMK/MAK yang dengan Kategori “Baik” pada Indikator Iklim Keamanan Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah)..... 141

Gambar 7.14 Analisis Regresi Persebaran Data Hubungan Indikator Iklim Keamanan dan Subindikator Pemahaman dan Sikap terhadap Perundungan terhadap Literasi SMK/MAK Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah) 143

Gambar 7.15 Analisis Regresi Persebaran Data Hubungan I Subindikator Pengalaman Kekerasan Seksual Murid dan Pengalaman Murid terkait Rokok, Minuman Keras, dan Narkoba terhadap Literasi SMK/MAK Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah) 143

Gambar 7.16	Proporsi Satuan Pendidikan SMK/MAK dengan Kategori “Baik” pada Indikator Iklim Kebinekaan Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)	144
Gambar 7.17	<i>Heatmap</i> Proporsi Satuan Pendidikan SMK/MAK dengan Kategori “Baik” pada Iklim Kebinekaan Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)	146
Gambar 7.18	Sebaran Distribusi Guru SMK/MAK Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	147
Gambar 7.19	Proporsi Guru Bersertifikat di SMK/MAK Tingkat Nasional Tahun 2022-2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)	148
Gambar 7.20	Sebaran Proporsi Guru Bersertifikat di SMK/MAK Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	149
Gambar 7.21	Proporsi guru Bersertifikat di SMK/MAK Berdasarkan Status Sekolah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	149
Gambar 7.22	Sebaran Pengalaman Pelatihan Guru SMK/MAK Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	150
Gambar 7.23	Pengalaman Pelatihan Guru SMK/MAK Berdasarkan Status Sekolah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	151
Gambar 7.24	Sebaran Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan SMK/MAK Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	152
Gambar 7.25	Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan SMK/MAK Berdasarkan Status Sekolah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	153
Gambar 7.26	Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan SMK/MAK per Provinsi Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	154
Gambar 7.27	Sebaran Indeks Fasilitas Ruang Satuan Pendidikan SMK/MAK Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	155
Gambar 7.28	Sebaran Indeks Sanitasi Satuan Pendidikan SMK/MAK Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)	156

Gambar 7.29 Sebaran Indeks Bahan dan Fasilitas Belajar Literasi Satuan Pendidikan SMK/MAK Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)..... 157

Gambar 7.30 Sebaran Indeks Fasilitas TIK Satuan Pendidikan SMK/MAK Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)..... 158

Gambar 7.31 Sebaran Penyerapan Lulusan SMK/MAK Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)..... 159

Gambar 7.32 Sebaran Kompetensi Lulusan SMK/MAK Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)..... 160

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 APS Usia 5–6 Tahun dengan Urutan 10 Daerah Tertinggi dan 10 Daerah Terendah Berdasarkan Kabupaten/Kota
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah) 33

Tabel 3.2 APS Usia 7–12 Tahun dengan Urutan 10 Daerah Tertinggi dan 10 Daerah Terendah Berdasarkan Kabupaten/Kota
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah) 34

Tabel 3.3 APS Usia 12–15 Tahun dengan Urutan 10 Daerah Tertinggi dan 10 Daerah Terendah Berdasarkan Kabupaten/Kota
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)..... 35

Tabel 3.4 APS Usia 16–18 Tahun dengan Urutan Partisipasi Tertinggi dan Terendah Berdasarkan Provinsi
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah) 36

Tabel 3.5 APS Usia 7–18 Tahun Jenis Pendidikan Kesetaraan dengan Urutan Partisipasi Tertinggi dan Terendah Berdasarkan Provinsi
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)..... 38

Tabel 3.6 APS Usia 4–18 Tahun Jenis Pendidikan Disabilitas dengan Urutan Partisipasi Tertinggi dan Terendah Berdasarkan Provinsi
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah) 40

DAFTAR SINGKATAN

ABK	: Anak Berkebutuhan Khusus
AKM	: Asesmen Kompetensi Minimum
AN	: Asesmen Nasional
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APS	: Angka Partisipasi Sekolah
ARKAS	: Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BOSP	: Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
BPS	: Badan Pusat Statistik
DAK	: Dana Alokasi Khusus Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dapodik	: Data Pokok Pendidikan
DDDM	: Data-driven decision making (atau yang dikenal juga sebagai perencanaan berbasis data)
DUDI	: Dunia Usaha dan Dunia Industri
EMIS	: Education Management Information System. EMIS adalah sistem pendataan resmi yang dikelola oleh Kemenag untuk mengumpulkan dan mengelola data pokok pendidikan keagamaan di seluruh Indonesia
KKG	: Kelompok Kerja Guru
MGMP	: Musyawarah Guru Mata Pelajaran

MoU	: Memorandum of Understanding
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PBD	: Perencanaan Berbasis Data
PKBM	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PPG	: Pendidikan Profesi Guru
PTK	: Pendidik dan Tenaga Kependidikan
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Renstra Disdik	: Rencana Strategis Dinas Pendidikan
Ruang GTK	: Ruang GTK Merupakan platform digital resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia yang ditujukan sebagai pusat pengembangan diri dan sumber inspirasi bagi para pendidik.
SDG	: Sustainable Development Goals
SNP	: Standar Nasional Pendidikan
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
Sulingjar	: Survei Lingkungan Belajar
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
TPPK	: Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
ULD	: Unit Layanan Disabilitas
RKAS	: Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
RKT	: Rencana Kerja Tahunan
SSE	: Status Sosial Ekonomi

Laporan “Rapor Pendidikan 2025” ini menggambarkan mutu ekosistem layanan pendidikan secara nasional dari hulu ke hilir, mulai dari akses belajar, capaian belajar murid, karakter, hingga kesiapan sumber daya manusia dan sarana pendukung pembelajaran. Perumusan laporan ini diharapkan menjadi cermin yang bukan sekadar alat ukur kinerja, tetapi juga peta jalan kebijakan berbasis bukti untuk memastikan bahwa setiap anak belajar dalam lingkungan yang aman, ber karakter, inklusif, dan berkualitas. Selain itu, laporan ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang konkret dan terukur sebagaimana prinsip *data driven decision making* atau perencanaan berbasis bukti. Laporan ini menyajikan potret komprehensif dimensi akses pendidikan melalui angka partisipasi sekolah sebagai pintu masuk agar pendidikan membawa perubahan pada hasil belajar (literasi, numerasi, karakter) yang saling berkelindan dengan dimensi proses (iklim pembelajaran dan keamanan) serta prasyarat sistemik (kompetensi dan fasilitas).

Desain analisis dalam “Rapor Pendidikan 2025” ini dirancang secara komprehensif dengan menggunakan basis data resmi Rapor Pendidikan Daerah dan satuan pendidikan untuk memastikan konsistensi serta keterbandingan capaian lintas jenjang dan wilayah sesuai standar nasional. Melalui pendekatan analitik yang mencakup pemetaan enam indikator prioritas, analisis spasial, kajian kesenjangan berdasarkan status sosial ekonomi, serta uji regresi untuk mengukur dampak kualitas pembelajaran dan iklim keamanan, laporan ini memotret pemerataan mutu pendidikan tanpa tujuan melakukan pemeringkatan. Seluruh temuan divisualisasikan untuk mengidentifikasi pola disparitas dan faktor determinan yang kemudian disintesis menjadi rekomendasi kebijakan operasional bagi pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan sebagai jembatan strategis dari data menuju aksi perbaikan yang terukur dan akuntabel. Sejumlah temuan

kunci terkait dimensi-dimensi dalam Rapor Pendidikan akan dirangkum sebagaimana uraian berikut.

Temuan 1: Akses pendidikan dasar usia 7–15 tahun sudah sangat luas, tetapi angka partisipasi masih perlu ditingkatkan pada kelompok usia 16–18 tahun serta masih terdapat ruang pemerataan pendidikan berdasarkan gender dan wilayah.

Akses pendidikan dasar Indonesia pada 2022–2024 telah mencapai tingkat yang tinggi meskipun belum 100%, terutama pada kelompok usia 7–12 tahun dan 13–15 tahun. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan perluasan akses dasar selama dua dekade terakhir efektif meningkatkan partisipasi pada program wajib belajar. Sayangnya, kondisi ini belum merata. Kabupaten/kota di wilayah Jawa–Sumatra–Bali–Kalimantan secara konsisten berada pada urutan atas partisipasi tertinggi. Di sisi lain, sejumlah kabupaten/kota, khususnya di Papua Pegunungan, mengalami ketertinggalan yang berulang. Hal ini menunjukkan bahwa capaian nasional yang tinggi belum bertransformasi menjadi pemerataan pada seluruh kawasan negeri. Titik rendah pemerataan makin terlihat pada kelompok usia 16–18 tahun atau menuju jenjang sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK). Titik ini menjadi *bottle neck* laju pertumbuhan partisipasi murid di sekolah. Analisis lebih lanjut terkait partisipasi berdasarkan gender mempertegas bahwa kesenjangan masih kerap terjadi pada kelompok tertentu. Pada usia 7–12 tahun, partisipasi laki-laki dan perempuan nyaris setara. Namun, sejak usia 13–15 tahun, perempuan mulai unggul tipis; kemudian, jarak tersebut melebar pada usia 16–18 tahun.

Temuan 2: Capaian literasi dan numerasi pada jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan SMA/SMK di tingkat nasional konsisten menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, tetapi ketimpangan antarwilayah dan sosial ekonomi masih tajam.

Pada semua jenjang, baik literasi maupun numerasi menunjukkan capaian dengan pola kemajuan; rata-rata kenaikannya adalah 2%–7% sekolah dengan kategori “Baik” setiap tahun. Sayangnya, peningkatan ini masih menyisakan permasalahan ketimpangan yang juga konsisten antarwilayah dan antarkelompok sosial ekonomi. Sekolah-sekolah di Jawa–Bali serta sebagian Sumatra selalu lebih unggul daripada Maluku, Nusa Tenggara

Timur (NTT) dan Papua. Pada tingkat analisis sosial ekonomi, ketimpangan makin terasa dengan kesenjangan sebesar 25%–31% murid berkategori “Baik”. Dapat disimpulkan bahwa kondisi geografis, status wilayah, dan posisi sosial murid masih menjadi variabel penentu keberhasilan murid pada aspek literasi dan numerasi.

Temuan 3: Pembinaan karakter menunjukkan kemajuan, tetapi memerlukan penguatan berkelanjutan pada dimensi sosial dan spiritual agar dampaknya lebih merata lintas jenjang.

Selama tiga tahun terakhir, capaian karakter menunjukkan dinamika yang beragam di seluruh jenjang pendidikan. Pada jenjang SD, terjadi peningkatan bersih sebesar +15% dengan lonjakan pada 2023 yang kemudian terkoreksi pada 2024. Tren positif terutama tampak pada aspek kognitif, seperti kreativitas, nalar kritis, dan kemandirian. Sebaliknya, aspek sosial, seperti gotong royong dan kebinekaan global mulai melemah. Di jenjang SMP dan SMA, proporsi satuan pendidikan berkategori “Baik” turun cukup signifikan (sekitar 12%–14%) dan capaian karakter menunjukkan fluktuasi, terutama pada aspek sosial dan spiritual. Pada jenjang SMK, penurunan capaian karakter mencapai 16% dalam tiga tahun meskipun terdapat perbaikan ringan pada kreativitas dan nalar kritis. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan karakter telah mulai tertanam pada dimensi kognitif, tetapi konsistensi pada aspek sosial dan spiritual masih perlu diperkuat secara lebih sistematis dan terintegrasi ke dalam praktik pembelajaran agar peningkatan karakter dapat lebih stabil, merata, dan berkelanjutan di seluruh jenjang pendidikan.

Temuan 4: Kualitas pembelajaran menunjukkan tren peningkatan positif dan berpotensi mempercepat perbaikan hasil belajar apabila penguatan pedagogis serta dukungan psikologis dilakukan secara berkelanjutan.

Selama tiga tahun terakhir, kualitas pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dengan indikator manajemen kelas menjadi pendorong utama kemajuan dan metode pembelajaran mulai menunjukkan progres meskipun masih berfluktuasi. Proporsi satuan pendidikan berkategori “Baik” memang masih di bawah 50%, tetapi hal ini justru mencerminkan adanya ruang perbaikan yang dapat diakselerasi melalui intervensi yang lebih terarah dan penguatan kapasitas

guru secara sistematis. Analisis regresi memperkuat temuan bahwa kualitas pembelajaran memiliki korelasi positif yang kuat dengan capaian literasi dan numerasi di seluruh jenjang, sementara dukungan psikologis—meskipun saat ini mengalami penurunan capaian—tetap berkontribusi positif terhadap hasil belajar. Dampak paling signifikan terlihat pada satuan pendidikan dengan capaian kategori menengah—suatu hal yang menegaskan bahwa kelompok ini merupakan titik strategis untuk percepatan perbaikan. Ke depan, penguatan kualitas pembelajaran perlu dilakukan secara terpadu antara aspek pedagogis dan dukungan psikologis agar transformasi pembelajaran berlangsung lebih merata dan berdampak optimal bagi semua satuan pendidikan.

Temuan 5: Capaian penyerapan lulusan SMK telah baik dan merata dengan kualitas lulusan yang cukup baik meskipun pemerataannya masih bisa ditingkatkan.

Tingkat penyerapan lulusan SMK menunjukkan performa yang cukup baik di wilayah dengan ekosistem industri yang kuat, khususnya Jawa, Sumatra, dan Kalimantan, dengan capaian serapan di atas 70%. Sementara itu, wilayah timur, seperti Papua dan Maluku, masih menghadapi tantangan serapan yang lebih rendah akibat terbatasnya lapangan kerja formal serta belum optimalnya kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Pola serupa juga terlihat pada kompetensi lulusan: daerah dengan fasilitas praktik yang memadai dan keterlibatan industri yang lebih aktif menghasilkan lulusan dengan kemampuan yang lebih baik. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dan daya serap lulusan SMK dapat dipercepat melalui penyelarasan kurikulum dengan potensi ekonomi lokal, perluasan kemitraan strategis dengan DUDI, serta penguatan pengalaman praktik kerja industri, khususnya di wilayah yang masih tertinggal, agar pendidikan vokasi makin relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Temuan 6: Iklim keamanan sekolah telah menunjukkan kemajuan pada beberapa aspek perlindungan murid dan berpotensi makin kuat apabila peningkatan kesejahteraan guru dan pencegahan kekerasan dilakukan secara menyeluruh.

Selama tiga tahun terakhir, capaian iklim keamanan menunjukkan dinamika yang bervariasi di seluruh jenjang pendidikan. Pada jenjang SD, capaian masih tergolong sangat baik meskipun mengalami koreksi sekitar

3,6% dan mencapai 88,24% pada 2024, dengan perbaikan terlihat pada aspek terkait hukuman fisik serta pengalaman murid terhadap narkoba, rokok, dan miras. Pada jenjang SMP dan SMA, capaian sempat meningkat sebelum menurun kembali pada 2024, terutama pada aspek kesejahteraan psikologis guru, serta pemahaman dan sikap terhadap perundungan dan kekerasan seksual. Meski demikian, indikator pengalaman murid terkait perundungan dan kekerasan seksual menunjukkan perbaikan yang mencerminkan dampak awal intervensi yang telah dijalankan. Di tingkat SMK, peningkatan capaian pada 2023 terkoreksi pada 2024, dengan tantangan utama ada pada kesejahteraan guru dan peningkatan risiko paparan perilaku berisiko. Analisis regresi menunjukkan bahwa iklim keamanan berkorelasi positif dengan capaian literasi, terutama pada satuan pendidikan dengan kategori capaian menengah hingga tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa lingkungan belajar yang aman tidak hanya menjadi faktor pendukung, tetapi memiliki peran langsung dalam meningkatkan hasil belajar murid. Ke depan, penguatan iklim keamanan perlu difokuskan pada peningkatan kesejahteraan guru dan penguatan praktik pencegahan kekerasan secara konsisten agar dampak positifnya dirasakan lebih merata dan berkelanjutan.

Temuan 7: Iklim kebinekaan menunjukkan kemajuan pada beberapa aspek, tetapi masih fluktuatif dan memerlukan penguatan konsistensi agar nilai toleransi dan inklusivitas tertanam lebih stabil di seluruh jenjang pendidikan.

Selama tiga tahun terakhir, capaian iklim kebinekaan menunjukkan pola serupa di semua jenjang pendidikan, yaitu sempat membaik pada 2023, tetapi terkoreksi pada 2024 sehingga belum membentuk tren peningkatan yang stabil. Pada jenjang SD, terjadi penurunan tipis pada skor total kebinekaan akibat melemahnya sikap toleransi, kesetaraan murid, dan komitmen kebangsaan meskipun jumlah sekolah berkategori “Baik” pada aspek toleransi agama dan budaya meningkat signifikan. Di tingkat SMP dan SMA, capaian tertinggi muncul pada 2023 sebelum menurun pada 2024; subindikator toleransi dan kesetaraan murid mengikuti pola fluktuatif, sedangkan komitmen kebangsaan justru mengalami penurunan konsisten pada jenjang SMP dan melemah pada jenjang SMA meski masih tergolong tinggi. Sementara itu, iklim kebinekaan di tingkat SMK memperlihatkan dinamika yang sama, tetapi komitmen kebangsaan tetap stabil tinggi

sepanjang periode dan menjadi indikator terkuat jika dibandingkan dengan indikator lainnya. Secara umum, temuan ini menunjukkan bahwa penguatan iklim kebinekaan telah mulai terlihat, khususnya pada aspek toleransi dan komitmen kebangsaan di beberapa jenjang, tetapi kesinambungannya belum terjaga. Ke depan, diperlukan pendekatan pembelajaran dan budaya sekolah yang lebih sistematis untuk menanamkan nilai toleransi, kesetaraan, dan kebinekaan secara konsisten agar capaian positif bertahan dan merata di seluruh jenjang pendidikan.

Temuan 8: Distribusi guru cukup merata meskipun terdapat sedikit kesenjangan di wilayah tertinggal

Pemerataan dan kualitas guru dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Wilayah Jawa, Bali, serta sebagian Sumatra dan Sulawesi mencatatkan capaian lebih baik pada kisaran 60%–70%; hal ini menandakan bahwa arah kebijakan distribusi guru mulai memberikan dampak positif. Meskipun Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua masih tertinggal, selisih capaian antara wilayah tertinggal dan nontertinggal relatif kecil (0,1–0,5 poin); hal ini mengindikasikan adanya potensi untuk percepatan melalui intervensi yang lebih terarah.

Temuan 9: Rendahnya proporsi sertifikasi guru menunjukkan kompetensi guru belum terstandar meskipun upaya pemerataan pelatihan sudah cukup baik

Pada aspek sertifikasi, terjadi penurunan signifikan pada 2022–2024 sebanyak 40%–50% di semua tingkat. Penurunan ini perlu menjadi perhatian karena sertifikasi merupakan upaya untuk memastikan guru memiliki kompetensi minimal pada aspek pedagogik, sosial, dan profesional. Penurunan ini umumnya terjadi karena tingginya angka pensiun guru bersertifikasi, minimnya kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi, dan tingginya input guru baru yang belum tersertifikasi. Sebaran guru bersertifikasi juga belum merata. Sebagian besar guru bersertifikasi berkumpul di wilayah Jawa dan kota besar, sementara wilayah non-Jawa dan kabupaten jumlah guru bersertifikasi masih rendah. Di sisi lain, pengalaman pelatihan guru menunjukkan perkembangan positif di sebagian besar wilayah, walaupun di Papua dan sebagian Kalimantan masih mencatatkan angka kurang dari 40%. Selain itu, kesenjangan lebih nyata terlihat antara satuan pendidikan negeri

dan swasta: guru sekolah negeri memiliki akses pelatihan dan sertifikasi yang lebih tinggi (di atas 50%) daripada guru sekolah swasta (20%–30%). Dengan demikian, keberlanjutan peningkatan pemerataan dan kualitas guru ke depan sangat bergantung pada penguatan dukungan afirmatif, terutama bagi wilayah rural dan satuan pendidikan swasta agar kemajuan yang telah terjadi dapat merata dan memberikan dampak lebih luas bagi mutu pembelajaran.

Temuan 10: Ketimpangan infrastruktur fisik dasar yang tajam di wilayah timur Indonesia dan belum optimalnya dampak ketersediaan sarana literasi terhadap hasil belajar murid menjadi hambatan utama dalam pemerataan mutu pendidikan nasional.

Analisis indeks fasilitas satuan pendidikan lintas jenjang (SD hingga SMK) menunjukkan bahwa, meskipun ketersediaan sarana-prasarana nasional secara umum sudah memadai dan mengalami tren positif, terdapat pola ketimpangan geografis yang tajam dan konsisten: wilayah Jawa–Bali dan perkotaan mendominasi kategori “Baik”, sementara wilayah timur Indonesia, khususnya Papua dan Maluku, masih tertinggal jauh. Disparitas paling signifikan berpusat pada aspek fasilitas fisik dasar (ruang dan sanitasi) yang masih rendah di daerah tertinggal, berbanding terbalik dengan indeks TIK dan literasi yang relatif lebih tinggi dan merata secara nasional. Temuan penting lainnya adalah adanya kesenjangan antara ketersediaan fasilitas literasi yang baik dan hasil belajar murid yang masih rendah (khususnya di jenjang menengah); hal ini mengindikasikan bahwa tantangan utama saat ini bukan hanya pada pemerataan infrastruktur fisik di wilayah 3T, tetapi juga optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang ada agar berdampak nyata pada kualitas pembelajaran.

Rekomendasi

Rekomendasi kebijakan dalam laporan ini disusun sebagai tindak lanjut langsung dari serangkaian temuan utama Rapor Pendidikan yang menggambarkan layanan kualitas pendidikan, terutama pada aspek mutu pembelajaran, karakter, iklim belajar, pemerataan guru, hingga pemerataan fasilitas. Atas dasar itu, rekomendasi yang disajikan bukan sekadar daftar usulan program, melainkan langkah konkret berbasis bukti (*evidence-based*) serta berorientasi pada pemerataan (*equity*). Selanjutnya, kami akan menguraikan serangkaian rekomendasi kebijakan dan program yang terstruktur menurut masing-masing temuan. Diharapkan bahwa rekomendasi ini dapat menjadi

rujukan praktis bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya dalam merancang langkah strategis yang lebih tajam, terarah, dan berkelanjutan, serta dapat menjangkau seluruh negeri.

Isu	Rekomendasi	Langkah Konkret
Pemerataan Partisipasi Pendidikan	Memperluas akses pendidikan SMA/SMK	a. Menyusun strategi transisi SMP menuju SMA/SMK dengan mengidentifikasi kebutuhan terkait rencana studi, minat, dan bakat atau kebutuhan keterampilan berdasarkan karakteristik wilayah b. Melakukan sinkronisasi pendataan pada Dapodik dan Dukcapil, terutama terkait murid yang besar kemungkinannya tidak melanjutkan pendidikan c. Perluasan beasiswa afirmasi, sekolah berasrama, dan sekolah satu atap SMP–SMA/SMK di kecamatan sulit akses d. Dukungan transportasi/akomodasi (subsidi transpor sekolah, boarding) bagi murid yang tinggal jauh dari sekolah menengah e. Menetapkan target angka partisipasi sekolah (APS) usia 16–18 tahun yang eksplisit dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD/Renstra Disdik) f. Memberikan apresiasi kinerja pada daerah khusus yang berhasil menaikkan APS pada kelompok usia 16–18 tahun

	Strategi peningkatan akses murid Kesetaraan	a. Menawarkan pembelajaran yang fleksibel, misalnya pada malam hari atau akhir pekan b. Menawarkan pembelajaran <i>blended learning</i> pada PKBM atau modul mandiri sehingga memungkinkan murid belajar secara asinkron c. Menyediakan modul kewirausahaan dengan manajemen sederhana d. Menerapkan pengakuan pengalaman (Rekognisi Pembelajaran Lampau) kerja murid sehingga menjadi kredit mata pelajaran yang dapat dikonversikan menjadi nilai untuk mempercepat kelulusan e. Integrasi pelatihan keterampilan kerja vokasi yang bersertifikat, misalnya keterampilan tata boga, bengkel, atau keterampilan digital lain
Hasil Belajar pada Aspek Literasi dan Numerasi	Menyusun skema intervensi khusus daerah tertinggal dan status ekonomi khusus pada jenjang SD, SMP, dan SMA	a. Memprioritaskan program-program peningkatan literasi dan numerasi, khususnya di wilayah NTT, Maluku, Papua, dan kabupaten/kota berkinerja rendah secara masif dan intensif untuk meningkatkan kebiasaan literasi dan numerasi (misalnya dengan <i>literacy boost</i> selama 2–3 tahun) b. Penggunaan skema afirmatif pada Bantuan Operasional Sekolah/ Dana Alokasi Khusus (BOS/DAK) untuk mendanai program perbaikan pembelajaran di wilayah kinerja terendah c. Melakukan integrasi program perlindungan sosial, misalnya Program Indonesia Pintar dengan kewajiban kehadiran dan capaian belajar minimal murid
	Meningkatkan serapan lulusan melalui potensi ekonomi lokal dan kemitraan strategis dunia usaha dan dunia industri (DUDI)	a. Penyesuaian konsentrasi keahlian dengan sektor unggulan daerah (pertanian, pariwisata, maritim, industri kreatif, dll.) b. Pelibatan DUDI sejak tahap perencanaan kurikulum c. Perluasan nota kesepahaman (MoU) dan <i>link and match</i> yang konkret (magang, guru tamu dari industri, kelas industri, penyediaan peralatan praktik) d. Inkubator bisnis kecil di SMK (koperasi murid, usaha sekolah) yang relevan dengan potensi lokal
Pembentukan Karakter agar Sesuai dengan Profil Lulusan	Penguatan karakter di seluruh jenjang	a. Program khusus reorientasi pendidikan karakter di seluruh jenjang melalui: <i>peer mentoring</i>, kegiatan organisasi murid, dan proyek sosial lintas kelompok b. Meningkatkan komunikasi dengan orang tua murid dan masyarakat untuk mengurangi pengaruh negatif (geng, perilaku berisiko, intoleransi) melalui <i>parenting day</i> dan pelibatan sebagai narasumber di sekolah guna meningkatkan ikatan (<i>bonding</i>) sebagai komunitas c. Menambah aspek supervisi bagi pengawas kepala sekolah dan guru terkait praktik peningkatan karakter di kelas dan upaya pembentukan karakter sebagai budaya sekolah d. Mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran sehari-hari

Kualitas Pembelajaran Murid	Program peningkatan kualitas belajar yang optimal	a. Pelatihan terstruktur, berkelanjutan, dan merata untuk semua guru terkait pembelajaran berdiferensiasi, aktif, dan kritis b. Pendampingan berkelanjutan (<i>coaching, lesson study</i>), bukan hanya pelatihan satu kali c. Menjadikan sekolah kategori menengah sebagai sasaran utama akselerasi karena dampak peningkatan kualitas pembelajaran di kelompok ini paling besar terhadap hasil belajar d. Proporsi tertentu BOS/BOSP diarahkan spesifik untuk peningkatan kualitas mengajar (buku bermutu, pelatihan, kolaborasi guru, media belajar) e. Mengoptimalkan kelompok belajar kepala sekolah dan guru untuk saling berbagi praktik baik dan memberikan dukungan psikologis f. Penguatan peran kepala satuan pendidikan sebagai instructional leader agar mampu memberikan pendampingan dan supervisi kepada guru dalam hal membangun praktik pembelajaran yang berkualitas g. Pada daerah sulit, melakukan pendataan sekolah yang memiliki kinerja positif untuk dijadikan contoh (<i>role model</i>) berbagi praktik baik
Jaminan Keamanan Murid dan Kesejahteraan Psikologis Guru	Program pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan	a. Membuat <i>standard operational procedure</i> (SOP) antikekerasan, antiperundungan, dan penanganan kekerasan seksual diterapkan di semua sekolah b. Menyusun kanal pelaporan yang aman dan mudah diakses murid (kotak pengaduan, kanal digital, pihak ketiga independen) c. Optimalisasi peran tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK), kanal aduan, dan pendampingan kuratif berbasis kemitraan, peningkatan literasi keselamatan, dan partisipasi murid-orang tua. Ruang lingkup peran TPPK di satuan pendidikan perlu dibuat lebih konkret dan bukan hanya berperan insidental jika ada kasus, tetapi juga secara proaktif melakukan upaya pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. d. Kerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan aparat penegak hukum yang relevan untuk kampanye serta penanganan terpadu bahaya narkoba, rokok, miras, dan kekerasan di sekitar sekolah e. Menambah aspek keamanan sebagai indikator pendampingan dan supervisi sekolah
	Program yang mendorong kesejahteraan psikologis guru	a. Mengidentifikasi dan melakukan evaluasi beban kerja guru, terutama untuk guru yang memiliki tugas ganda, seperti bendahara sekolah b. Mengimplementasikan program kesehatan mental untuk guru berupa layanan konseling, manajemen stres, atau meningkatkan dukungan komunitas c. Menyediakan ruang aman bagi guru untuk berbagi pengalaman dan permasalahan yang dihadapi

Iklim Kebinekaan, Toleransi, dan Inklusivitas	Memperkuat kebinekaan sebagai budaya sekolah	a. Program rutin yang mendorong interaksi lintas agama, suku, dan latar belakang (misalnya proyek kolaboratif, forum dialog murid) b. Penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru dalam mengelola kelas yang beragam (agama, budaya, gender, disabilitas) c. Modul pembelajaran kebinekaan yang kontekstual d. Pelibatan dan kolaborasi dengan orang tua murid dan komunitas untuk membangun ekosistem yang inklusif secara menyeluruh dan memperkaya pengalaman murid dalam membangun kebinekaan
Distribusi Guru	Penyempurnaan kebijakan distribusi guru	a. Penataan ulang distribusi guru dengan menggunakan data kebutuhan riil per sekolah (mempertimbangkan jumlah murid, lokasi, dan kondisi khusus) b. Afirmasi seleksi Guru Garis Depan yang berasal dari daerah setempat
Kualitas guru	Penguatan dukungan peningkatan kualitas bagi guru di luar pulau Jawa terutama di wilayah rural dan sekolah swasta	a. Prioritas sertifikasi bagi guru di wilayah tertinggal untuk percepatan pemerataan. b. Perluasan kesempatan sertifikasi melalui peningkatan jumlah universitas pembina dan perluasan akses Pendidikan profesi guru (PPG) c. Penguatan sistem pelaporan dan pemantauan pelatihan berbasis kinerja untuk mendorong partisipasi guru dalam peningkatan kompetensi secara berkelanjutan d. Integrasi dan pengalokasian anggaran pelatihan dalam perencanaan sekolah untuk memastikan kesinambungan pengembangan kompetensi e. Penguatan kelompok kerja guru/musyawarah guru mata pelajaran (KKG/MGMP) sebagai pusat belajar guru yang berkelanjutan, bukan hanya forum administratif f. Optimalisasi Ruang GTK sebagai pusat pelatihan berbasis praktik dan pembelajaran sejawat
Infrastruktur & Pemanfaatan Sarana Literasi	Pemerataan infrastruktur pendukung pembelajaran	a. Penetapan standar pelayanan minimal (SPM) fasilitas dasar yang wajib dipenuhi dengan monitoring ketat b. Prioritas DAK Fisik dan BOS Fisik untuk ruang kelas, sanitasi, dan akses air bersih di Papua, Maluku, NTT, dan wilayah tertinggal lainnya c. Program pendampingan sekolah dalam mengelola perpustakaan, pojok baca, dan TIK sebagai bagian dari pembelajaran harian, bukan sekadar pajangan d. Penguatan peran pustakawan/guru literasi di sekolah, termasuk pelatihan strategi membaca dan menulis berbasis fasilitas yang tersedia

Rapor Pendidikan merupakan platform yang menyajikan hasil evaluasi sistem pendidikan. Platform ini mencakup hasil belajar murid, proses pembelajaran, pemerataan kualitas layanan pendidikan, kualitas tata kelola satuan pendidikan, serta kualitas layanan sumber daya manusia (SDM) di satuan pendidikan. Sejak diluncurkan pada 2022, Rapor Pendidikan telah digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan—mulai dari satuan pendidikan, Dinas Pendidikan, hingga kementerian—untuk membantu mengidentifikasi masalah, melakukan refleksi, dan merancang perbaikan program berbasis data. Pemanfaatan data pada platform ini merupakan upaya untuk mewujudkan perencanaan berbasis data dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara berkesinambungan (Kemendikbudristek, 2024). Data dalam Rapor Pendidikan menjadi masukan penting bagi proses perencanaan berbasis data (PBD), termasuk dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) bidang pendidikan oleh pemerintah daerah.

Perencanaan berbasis data, atau lebih dikenal sebagai *data-driven decision making* (DDDM), dipahami sebagai siklus berulang yang mencakup formulasi pertanyaan, pengumpulan dan kurasi data yang andal, serta interpretasi berbasis bukti yang dapat digunakan sebagai acuan pembelajaran (Levin & Datnow, 2012; Mandinach & Gummer, 2016). PBD sendiri bertujuan mengupayakan perbaikan pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel, dan konkret. Singkatnya, PBD dapat membantu pengambil keputusan dalam proses identifikasi akar masalah, perumusan solusi yang berangkat dari bukti, pertimbangan konsekuensi, dan penetapan langkah perbaikan sebagai urutan logis pengambilan keputusan (Wang, 2021). Dalam menyusun PBD, Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan dapat merujuk kepada data-data capaian yang tersedia dalam Rapor Pendidikan guna mengarahkan program dan anggaran ke sasaran yang lebih tepat.

Data Rapor Pendidikan memungkinkan penyusunan program yang berbeda-beda antarwilayah sesuai dengan profil masalahnya masing-masing, misalnya untuk daerah dengan capaian literasi rendah, iklim keamanan rentan, ataupun kekurangan guru yang berkualitas. Dalam konteks penganggaran, Rapor Pendidikan juga menjadi dasar justifikasi alokasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan/Bantuan Operasional Sekolah (BOSP/BOS), program afirmasi, maupun pendampingan teknis sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat ditelusuri relevansinya dengan kebutuhan dan hasil belajar yang ingin dicapai.

Di tingkat satuan pendidikan, pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam PBD memperkuat fungsi perencanaan sekolah, misalnya untuk penyusunan rencana kerja tahunan (RKT) serta rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) sebagai bahan input pada Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS). Kepala satuan pendidikan dan guru didorong untuk membaca dan memahami profil sekolahnya berdasarkan indikator yang tersaji sebagai dasar refleksi kolektif dan penyusunan rencana perbaikan yang lebih terukur. Proses ini bukan hanya meningkatkan akuntabilitas internal, tetapi juga membuka ruang dialog dengan komite sekolah dan orang tua murid berdasarkan data yang sama. Dengan demikian, laporan Rapor Pendidikan dan praktik PBD bersama-sama membentuk siklus perbaikan berkelanjutan yang menautkan data, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam satu rantai tata kelola yang lebih transparan dan berorientasi pada hasil belajar murid (Abrams *dkk*, 2021; Mandinach & Gummer, 2016).

Perluasan akses data di satuan pendidikan perlu diikuti dengan peningkatan literasi data bagi semua pemangku kepentingan agar mereka makin mampu memahami dan memanfaatkan Rapor Pendidikan. Untuk itu, *Laporan Rapor Pendidikan Indonesia 2025: Capaian dan Agenda Perbaikan* ini disusun sebagai ringkasan nasional yang menjembatani data Rapor Pendidikan dan keputusan program/anggaran dengan memberikan gambaran cepat mengenai capaian, ketimpangan antarwilayah, dan area prioritas serta memperkuat kultur pengambilan keputusan berbasis bukti di tingkat pusat dan daerah (Levin & Datnow, 2012; Kemendikbudristek, 2023). Dokumen ini memusatkan analisis pada indikator prioritas dalam Rapor Pendidikan, yaitu hasil belajar Literasi dan Numerasi, Karakter, Kualitas

Pembelajaran, Iklim Keamanan, dan Iklim Kebinekaan yang dilengkapi dengan analisis kesenjangan menurut karakteristik wilayah serta status sosial ekonomi (SSE), dan juga dilengkapi dengan temuan perbedaan antara satuan pendidikan negeri dan satuan pendidikan swasta pada beberapa aspek. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami gambaran pemetaan mutu pendidikan, yaitu bukan sekadar siapa yang tertinggal, tetapi di mana dan mengapa ketertinggalan masih terjadi.

Dokumen ini juga disusun dalam format yang singkat, konsisten, dan siap pakai bagi berbagai pihak, seperti pembuat kebijakan, pemimpin daerah, kepala satuan pendidikan, mitra pembangunan, serta publik yang peduli pendidikan. Secara khusus, naskah ini merangkum perkembangan pada 2022–2024, yakni periode krusial pascapandemi ketika sekolah kembali beroperasi penuh dan berbagai program pemulihan pembelajaran berjalan. Di balik setiap angka, ada gambaran mengenai kondisi murid, ukuran capaian fasilitasi pembelajaran oleh guru, dan latar belakang orang tua murid. Karena itu, naskah ini diharapkan dapat membantu Indonesia memahami kondisinya serta merumuskan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat dan ekosistem pendidikan.

Tujuan

Laporan Rapor Pendidikan ini disusun untuk memberikan gambaran nasional kondisi pendidikan Indonesia tahun 2022–2024 secara ringkas dan mudah dirujuk. Laporan ini menampilkan tren capaian antartahun yang dilengkapi dengan penjelasan interpretatif agar mudah dipahami dan tetap relevan bagi pengambil keputusan. Poin-poin utama yang menjadi tujuan laporan ini adalah:

1. **Menyajikan tren capaian nasional tahun 2022–2024** dengan menampilkan tren perubahan antartahun untuk indikator-indikator prioritas.
2. **Mengulas kondisi kesetaraan dan kesenjangan hasil belajar dan layanan pendidikan** dengan menyoroti disparitas antarkelompok berdasarkan karakteristik wilayah (tertinggal/nontertinggal) dan SSE satuan pendidikan (SSE 20% atas/SSE 20% bawah).
3. **Mengidentifikasi aspek prioritas setiap jenjang** dengan menautkan data indikator prioritas Rapor Pendidikan ke kebutuhan spesifik setiap

jenjang sekaligus daftar prioritas yang lebih operasional, termasuk contoh area perbaikan dan titik masuk program yang realistis di tingkat sekolah dan daerah.

- 4. Mendorong pemanfaatan data untuk perencanaan dan penganggaran** agar program dan kebijakan benar-benar berbasis bukti dan kondisi lapangan.

Ruang Lingkup

Rapor Pendidikan mencakup seluruh jenjang pendidikan, yaitu sekolah dasar/madrasah ibtidaiah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah sanawiah (SMP/MTs), sekolah menengah atas/madrasah aliah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliah kejuruan (SMK/MAK), serta sekolah luar biasa (SLB) dan kesetaraan. Dengan demikian, platform ini dapat memberikan potret menyeluruh mengenai ekosistem pendidikan Indonesia. Secara geografis, data disajikan pada tingkat nasional serta tingkat provinsi dan kabupaten/kota sehingga memungkinkan analisis lintas wilayah yang konsisten.

Indikator yang digunakan berfokus pada mutu hasil belajar murid dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Contoh untuk faktor-faktor ini adalah kemampuan literasi dan numerasi, kualitas pembelajaran, lingkungan belajar, kompetensi dan kinerja guru, ketersediaan serta pemanfaatan sumber daya pendidikan, tata kelola satuan pendidikan dan kebijakan, serta pemerataan. Semua indikator diturunkan dari sumber data utama Asesmen Nasional (AN) yang meliputi asesmen kompetensi minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar (sulingjar), serta Data Pokok Pendidikan (Dapodik), *Education Management Information System/EMIS* (Kementerian Agama), Badan Pusat Statistik (BPS), *Tracer Study* (khusus SMK), dan sumber data pendidikan lain yang terintegrasi dalam satu ekosistem.

Laporan ini merangkum perkembangan 2022–2024 dengan menampilkan tren yang dapat dibandingkan lintas tahun. Untuk menjaga ketepatan interpretasi, setiap bagian menyertakan catatan metodologis apabila terdapat penyesuaian definisi, cakupan, ataupun tata cara pengumpulan data pada periode tersebut. Ruang lingkup yang komprehensif ini menjadi dasar bagi pembacaan yang adil, akurat, dan siap ditindaklanjuti.

Metode

Desain analisis dalam nota pendidikan ini berangkat dari basis data Rapor Pendidikan Satuan Pendidikan dan Rapor Pendidikan Daerah sebagai rujukan utama untuk memastikan keterbandingan antarsatuan dan antardaerah. Semua ukuran, istilah, dan skala mengikuti definisi resmi Rapor Pendidikan agar hasil yang disajikan konsisten dengan kerangka kebijakan nasional. Fokus utamanya adalah menyediakan potret pemerataan dan mutu pembelajaran yang mudah ditelusuri lintas jenjang, sekaligus memberikan landasan empiris bagi penentuan prioritas kebijakan. Dengan cara ini, dokumen tidak hanya menyajikan data, tetapi juga menata alur penalaran dari temuan menuju tindakan yang diperlukan.

Unit analisis dibangun berdasarkan jenjang pendidikan (SD/SMP/SMA/SMK/ sederajat) sehingga setiap hasil tetap relevan dengan karakteristik masing-masing ekosistem pembelajaran. Langkah analitik dimulai dengan pemetaan capaian enam indikator prioritas (Literasi, Numerasi, Karakter, Kualitas Pembelajaran, Iklim Keamanan, dan Iklim Kebinekaan) ke dalam kategori interpretatif berbasis rentang skor Rapor Pendidikan. Pemetaan ini memungkinkan identifikasi cepat area yang sudah kuat maupun yang masih memerlukan penguatan dengan tidak mengubah ataupun menambahkan kategori di luar standar resmi. Selain itu, proses kurasi data memperhatikan kelengkapan dan konsistensi lintas jenjang sehingga perbandingan antarsatuan dan antarwilayah lebih bisa dipertanggungjawabkan.

Tahap berikutnya mencakup analisis sebaran dan ketimpangan. Analisis spasial dilakukan lintas wilayah administratif untuk melihat pola konsentrasi capaian, sedangkan analisis ketimpangan diperluas dengan membandingkan kelompok wilayah tertinggal dan nontertinggal serta membedah kesenjangan berdasarkan SSE, khususnya 20% teratas dan 20% terbawah. Pada aspek kualitas belajar dan iklim keamanan, dokumen ini menyediakan analisis regresi guna membuktikan dampak antara dua variabel krusial terhadap capaian literasi dan numerasi murid. Dalam analisis regresi, dilakukan proses identifikasi pengaruh masing-masing faktor terhadap literasi atau numerasi. Hasilnya divisualisasikan dalam grafik, peta, dan tabel ringkas agar pola spasial maupun disparitas antarkelompok dapat dibaca secara cepat oleh perencana dan pengambil keputusan. Sebagai catatan, seluruh penyajian

berorientasi pada gambaran pemerataan, bukan untuk membuat peringkat daerah ataupun satuan pendidikan. Dengan demikian, interpretasi temuan diarahkan pada perbaikan, bukan kompetisi yang kurang sehat.

Selanjutnya, dokumen ini menyajikan gambaran nasional dan peta kesenjangan antardaerah sebagai dasar penetapan fokus intervensi. Bagian akhir merumuskan implikasi kebijakan, rekomendasi, dan agenda penguatan sistemik berjangka menengah–panjang yang operasional bagi Kementerian Pendidikan, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Rekomendasi menautkan temuan dengan opsi program (misalnya, penguatan kapasitas guru dan kepala sekolah, penataan dukungan belajar, serta perbaikan iklim sekolah) berikut indikator tindak lanjut yang dapat dipantau pada siklus perencanaan berikutnya. Dengan demikian, nota ini berfungsi sebagai jembatan dari data ke aksi yang terukur, berulang, dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 9 Tahun 2022, evaluasi sistem pendidikan adalah evaluasi terhadap layanan pendidikan, kinerja satuan pendidikan, dan program pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan sebagai bagian dari proses pengendalian, penjaminan, penetapan, dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Evaluasi ini dilaksanakan untuk memastikan pemenuhan standar nasional pendidikan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian, penjaminan, penetapan, dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Dengan kata lain, evaluasi ini berfungsi sebagai dasar untuk mengetahui kondisi nyata penyelenggaraan pendidikan serta arah perbaikan mutu yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Tujuan evaluasi sistem pendidikan adalah:

1. **Menyediakan hasil pengukuran komprehensif** mengenai akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan untuk semua jenjang. Hasil evaluasi memberikan gambaran objektif mengenai capaian pendidikan dan kesenjangan yang masih perlu ditangani.
2. **Membangun sistem manajemen data pendidikan yang terintegrasi dan dapat dibagi-pakai** sehingga perencanaan berbasis data dapat dilakukan secara efektif di tingkat pusat maupun daerah. Sistem ini memastikan konsistensi data dan menghindari ketumpangtindihan proses pengumpulan data.
3. **Menciptakan keselarasan program dan kebijakan pusat-daerah** dalam tata kelola pendidikan. Evaluasi berfungsi memastikan bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota bekerja dalam kerangka prioritas yang selaras.
4. **Mendorong perbaikan berkelanjutan** atas akses, mutu, relevansi, dan tata kelola pendidikan.

Asesmen Nasional (AN) merupakan salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada jenjang pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Prinsip dasar AN lebih komprehensif, yakni tidak hanya mengukur capaian belajar murid, tetapi juga kondisi ekosistem belajar dan karakteristik pribadi mereka. Dengan demikian, diharapkan bahwa kepala satuan pendidikan dan pemerintah daerah dapat menggunakan hasil AN untuk merancang anggaran belanja dan perencanaan kegiatannya.

Asesmen Nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan Kemendikdasmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di semua satuan pendidikan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menyebutkan bahwa terdapat dua jenis evaluasi pendidikan yang dibutuhkan. Evaluasi pertama adalah evaluasi yang bertujuan “memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik” (Pasal 58 ayat 1). Evaluasi ini dilakukan oleh guru terhadap murid yang mereka ajar secara berkesinambungan. Evaluasi kedua adalah evaluasi yang bertujuan “menilai pencapaian standar nasional pendidikan” (Pasal 58 ayat 2). Evaluasi jenis ini dilakukan terhadap murid, sekolah, dan program pendidikan oleh lembaga mandiri secara “berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik (Naskah Akademik AN, 2019). Dalam hal ini, AN dapat mencakup kedua jenis evaluasi, tetapi lebih berfokus pada asesmen sistemik.

Asesmen Nasional terdiri atas tiga bentuk sebagai berikut.

1. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)

Asesmen Kompetensi Minimum mengukur literasi membaca dan literasi matematika (numerasi). Kedua literasi ini merupakan kecakapan dasar terpenting bagi seorang individu untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi secara produktif dalam kehidupan modern. Yang dimaksud dengan literasi di sini adalah kompetensi berpikir atau bernalar murid ketika membaca teks dan menghadapi persoalan yang membutuhkan pengetahuan matematika (Balitbangbuk, 2021). AKM tidak dirancang untuk mengukur pengetahuan tentang kurikulum secara terperinci, melainkan diharapkan bahwa ia dapat menggeser fokus tujuan

belajar dari pengetahuan faktual ke penguasaan kompetensi mendasar yang bermanfaat secara luas.

2. Survei Karakter

Survei karakter menghasilkan gambaran mengenai perkembangan karakter murid berdasarkan nilai-nilai akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global, dan kemandirian. Selain itu, survei karakter dirancang untuk memenuhi seluruh kebutuhan serta fokus utama dalam pengembangan karakter setiap murid di Indonesia.

3. Survei Lingkungan Belajar

Survei lingkungan belajar dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai indikator pendukung lingkungan belajar, seperti kualitas pembelajaran, kepemimpinan, iklim keamanan, kebinekaan, inklusivitas, dan hal-hal lain yang relevan.

Rapor Pendidikan adalah kumpulan indikator terpilih dari AN, Dapodik, BPS, EMIS, serta Ruang Guru dan Tenaga Kependidikan (Ruang GTK) satuan pendidikan yang merefleksikan prioritas Kemendikdasmen. Platform ini berfungsi sebagai alat diagnosis untuk menilai kinerja satuan pendidikan, program kesetaraan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan layanan pendidikan. Tujuan Rapor Pendidikan adalah menyediakan gambaran sederhana, terukur, dan berorientasi perbaikan mengenai aspek-aspek prioritas mutu pendidikan yang perlu ditingkatkan. Melalui platform ini, pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi permasalahan utama, menentukan prioritas perbaikan, dan merancang program peningkatan mutu secara lebih terarah dan berbasis data.

Kaitan Evaluasi Sistem Pendidikan dengan Rapor Pendidikan

Rapor Pendidikan merupakan keluaran langsung proses Evaluasi Sistem Pendidikan. Evaluasi Sistem Pendidikan menghimpun berbagai data tentang layanan pendidikan, kinerja satuan pendidikan, hasil belajar peserta didik, kualitas lingkungan belajar, serta tata kelola di tingkat sekolah dan

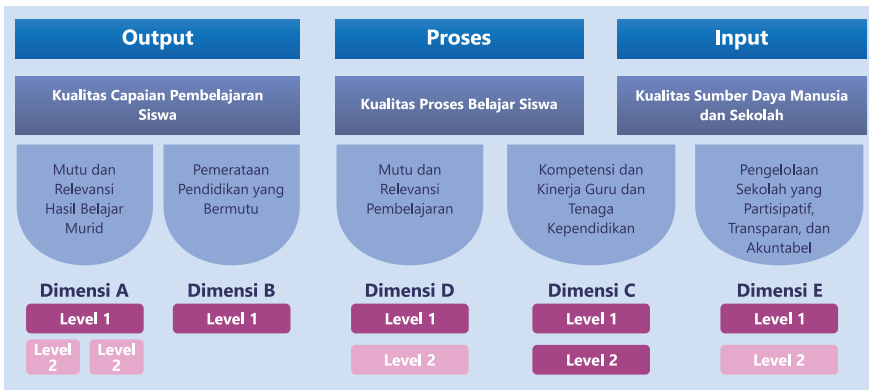
daerah. Semua data tersebut kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk profil pendidikan yang bersifat komprehensif. Dari profil pendidikan inilah Kemendikdasmen memilih indikator prioritas untuk membentuk Rapor Pendidikan yang dirancang khusus untuk memandu perbaikan mutu.

Dengan demikian, hubungan keduanya bersifat struktural dan fungsional sebagai berikut.

- 1. Evaluasi Sistem Pendidikan sebagai sumber data inti**
Evaluasi menghasilkan data hasil belajar murid (melalui AN), tata kelola, kualitas pembelajaran, jumlah dan kompetensi pendidik hingga kondisi ekosistem belajar. Data inilah yang menjadi fondasi semua indikator pada Rapor Pendidikan.
- 2. Rapor Pendidikan sebagai ringkasan indikator prioritas**
Rapor Pendidikan memilih indikator yang paling penting dan paling relevan untuk perbaikan. Rapor bukan sekadar laporan statistik, melainkan alat diagnostik yang menampilkan area kritis, akar masalah, serta fokus peningkatan yang harus ditindaklanjuti oleh satuan pendidikan maupun pemerintah daerah.
- 3. Rapor Pendidikan sebagai alat perencanaan berbasis data**
Rapor Pendidikan digunakan oleh kepala satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat untuk menyusun rencana program, merancang intervensi, mengalokasikan anggaran, dan memantau perbaikan mutu secara berkelanjutan. Dengan kata lain, Rapor Pendidikan adalah jembatan antara evaluasi dan tindakan perbaikan.

Secara keseluruhan, Evaluasi Sistem Pendidikan menghasilkan data dan profil, sementara Rapor Pendidikan menyajikan indikator kunci yang dapat langsung digunakan untuk pengambilan keputusan dan perencanaan peningkatan mutu pendidikan. Keduanya merupakan satu sistem terpadu untuk memastikan bahwa perbaikan mutu pendidikan berlangsung secara sistematis, terarah, dan berbasis bukti.

Dasar pembentuk Rapor Pendidikan



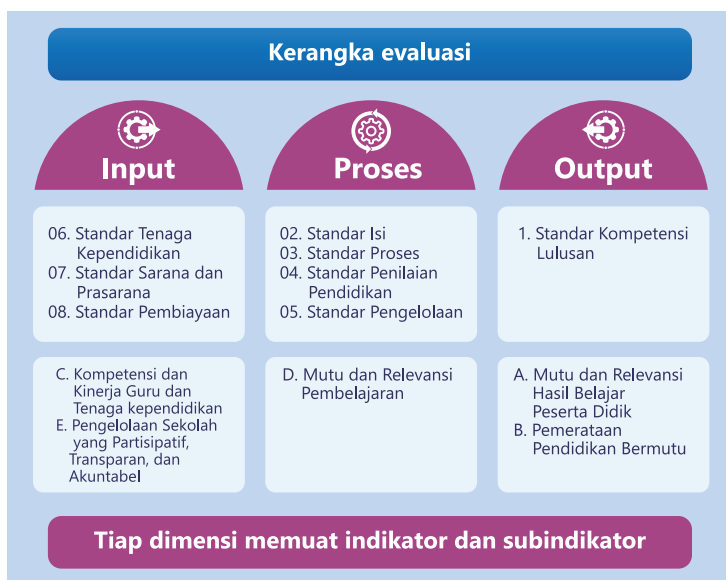
Gambar 2.1 Struktur Rapor Pendidikan

Sumber: Pusat Informasi Rapor Pendidikan Kemendikdasmen

Profil Pendidikan Dasar dan Menengah disusun untuk memberikan gambaran utuh mengenai kualitas layanan pendidikan melalui tiga area utama, yaitu output, proses, dan input. Ketiga area ini mencakup hasil belajar murid, kualitas proses pembelajaran, serta kesiapan sumber daya dan tata kelola satuan pendidikan. Dengan struktur ini, satuan Pendidikan dan pemerintah daerah dapat menilai capaian pendidikan tidak hanya dari dampak akhirnya, tetapi juga dari faktor-faktor yang memengaruhi pencapaiannya.

Kelima dimensi dalam struktur tersebut memperjelas fokus evaluasi, yakni mutu hasil belajar murid, pemerataan mutu pendidikan, mutu proses pembelajaran, kompetensi guru serta tenaga kependidikan, dan pengelolaan satuan pendidikan. Setiap dimensi memiliki indikator pada level 1 dan level 2: Level 1 memberikan gambaran umum mengenai capaian satuan pendidikan, sementara level 2 memberikan perincian lebih mendalam mengenai aspek-aspek yang membentuk capaian tersebut.

Selain hal tersebut, Rapor Pendidikan menggunakan kerangka evaluasi input-proses-output yang merujuk kepada 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Melalui kerangka ini, indikator dan subindikator dikelompokkan ke dalam lima dimensi sehingga alur logika dari prasyarat (input), praktik (proses), dan capaian (output) dapat dibaca secara utuh dan konsisten lintas tahun.



Gambar 2.2 Ilustrasi Pemetaan Input-Proses-Output
 Sumber: Pusat Informasi Rapor Pendidikan Kemendikdasmen

Pembagian area, dimensi, dan level indikator ini dirancang untuk memudahkan satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan dalam mengidentifikasi prioritas perbaikan. Dengan memahami indikator secara berlapis, satuan pendidikan dapat menelusuri akar persoalan secara lebih tepat dan menyusun strategi peningkatan mutu yang berbasis data. Struktur ini memastikan bahwa upaya peningkatan pendidikan dilakukan secara lebih terarah, akurat, dan berkelanjutan.

Pada Rapor Pendidikan, terdapat ratusan indikator yang dapat dikelompokkan menjadi kelompok indikator (i) Kualitas Hasil Belajar, (ii) Kualitas Lingkungan Belajar, (iii) Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan, (iv) Kualitas Tata Kelola Pendidikan, dan (v) Infrastruktur Pendidikan. Masing-masing indikator memiliki metode pengukuran dan turunan indikator yang berbeda. Secara umum, terdapat tiga kategorisasi indikator, yaitu 'Baik', 'Sedang', dan 'Kurang'. Tiga kategori tersebut memiliki batasan yang berbeda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Selain itu, setiap dimensi memiliki indikator pembentuk pada indikator level 1 dan level 2 yang tertera pada diagram sebelumnya. Adapun definisi dan turunan setiap indikator adalah sebagai berikut.

1. Kualitas Hasil Belajar

Kualitas hasil belajar mencerminkan capaian pembelajaran murid terkait kemampuan literasi, numerasi, dan karakter. Untuk jenjang SMK, terdapat indikator khusus, seperti penyerapan lulusan SMK dan *link and match* dunia kerja. Pada turunan indikator literasi dan numerasi, terdapat beberapa indikator contoh, seperti memahami teks, mengaplikasikan konsep matematika, serta menunjukkan perkembangan aspek sikap dan perilaku yang mendukung proses belajar. Hal ini sesuai dengan indikator dalam Dimensi A yang menilai mutu capaian hasil belajar dan Dimensi B yang menilai pemerataan di antara kelompok murid dan pemerintah daerah. Pengukuran diperoleh melalui AKM, survei karakter, dan *tracer study* SMK. Data terkait pemerataan kualitas hasil belajar melihat perbandingan capaian antarkelompok murid berbasis gender, SSE, dan wilayah yang menghasilkan distribusi capaian antarkelompok satuan pendidikan. Informasi ini memberikan gambaran kepada satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat mengenai tingkat pencapaian kompetensi dasar serta kesenjangan hasil belajar.

2. Kualitas Lingkungan Belajar

Kualitas lingkungan belajar berkaitan dengan kondisi proses pembelajaran di sekolah sebagaimana dijelaskan dalam Dimensi D. Ruang lingkupnya meliputi rasa aman, kenyamanan psikologis hingga penghargaan terhadap keberagaman, serta kemampuan sekolah untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dan layanan pendidikan bagi murid dengan hambatan atau kebutuhan khusus. Data diperoleh dari survei lingkungan belajar yang memberikan gambaran faktual mengenai kondisi lingkungan belajar, praktik pembelajaran, dan kepemimpinan kepala sekolah terkait proses pembelajaran. Hasilnya menunjukkan apakah lingkungan belajar sudah cukup mendukung perkembangan murid atau masih memerlukan perbaikan.

3. Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan

Kualitas guru dan tenaga kependidikan selaras dengan indikator dalam Dimensi C yang menilai ketercukupan, kompetensi, serta pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Rapor Pendidikan menggunakan data dari platform pengembangan guru, seperti Ruang GTK, Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIM-PKB),

Dapodik, dan survei lingkungan belajar, untuk menggambarkan bagaimana guru merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, melakukan refleksi (tercakup dalam Dimensi D), serta meningkatkan kompetensinya. Informasi mengenai jumlah, distribusi, dan kualifikasi guru serta tenaga kependidikan juga menjadi bagian penilaian. Indikator ini menunjukkan apakah SDM pendidikan di sekolah sudah memadai atau masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

4. Kualitas Tata Kelola Pendidikan

Kualitas tata kelola mencerminkan efektivitas satuan pendidikan dan pemerintah daerah dalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi layanan pendidikan. Indikator ini mencakup tingkat akreditasi, kemampuan menyusun perencanaan program dan kegiatan, transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan supervisi dan pembinaan. Data diperoleh dari Dapodik, data statistik resmi, dan aplikasi perencanaan serta pelaporan anggaran, seperti ARKAS. Indikator ini memberikan gambaran sejauh mana sekolah mampu mengelola program dan sumber daya secara sistematis untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan. Tidak hanya sekolah, APBD untuk bidang pendidikan juga masuk dalam bagian ini guna memastikan bahwa pemerintah daerah mendukung hal yang diharapkan.

5. Infrastruktur Pendidikan

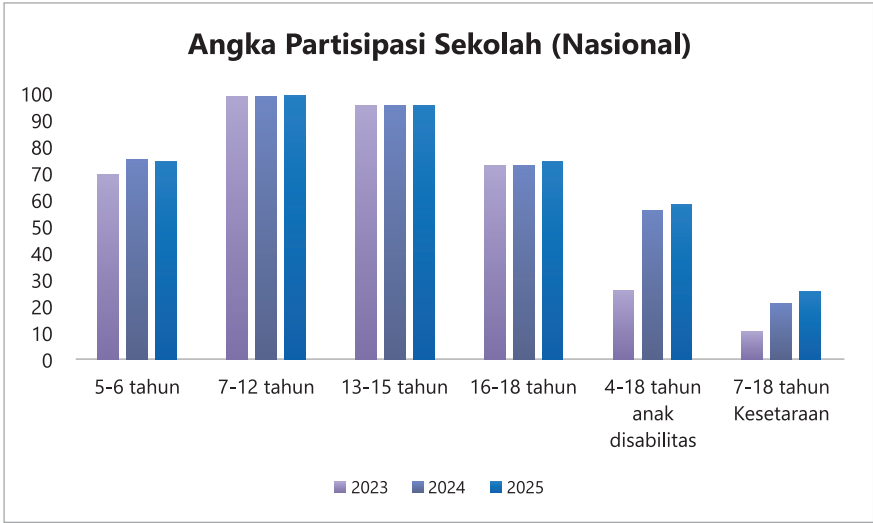
Infrastruktur pendidikan menggambarkan kelayakan sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung pembelajaran. Aspek yang dinilai meliputi kondisi ruang kelas, ketersediaan air dan sanitasi, sumber listrik, dan ketersediaan teknologi informasi—semua informasinya bersumber dari Dapodik. Selain itu, terdapat data lain yang diukur dan berkaitan dengan sarana pembelajaran literasi yang informasinya diperoleh dari AN. Hasil pengukuran berdasarkan indikator tersebut menunjukkan tingkat kelayakan infrastruktur di satuan pendidikan. Dengan demikian, satuan pendidikan dan pemerintah daerah dapat menentukan kebutuhan prioritas, merencanakan peningkatan fasilitas, dan mengarahkan anggaran pembangunan dengan lebih tepat sasaran.

Posisi Rapor Pendidikan dalam Dokumen Ini

Dari berbagai penjelasan mengenai evaluasi sistem pendidikan, AN, hingga pendalaman dalam Rapor Pendidikan, dokumen ini memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai sumber data utama dalam analisis kondisi pendidikan di tingkat nasional. Seluruh potret capaian dari akses hingga pemerataan guru dan fasilitas berbasis pada indikator yang disajikan dalam Rapor Pendidikan dengan data mutakhir. Dengan demikian, data-data yang diuraikan pada bab selanjutnya akan menggambarkan sejumlah kondisi pendidikan di Indonesia, seperti (i) kondisi terkini layanan pendidikan, (ii) kondisi kesenjangan antarkelompok, dan (iii) area prioritas yang membutuhkan perbaikan. Meskipun demikian, data-data yang tersaji dalam laporan ini tidak sepenuhnya menggunakan indikator yang terdapat dalam Rapor Pendidikan, melainkan hanya menggunakannya sebagai indikator utama yang menjadi prioritas Pemerintah Indonesia.

Akses adalah prasyarat bagi keadilan dan hak atas pendidikan sebagaimana mandat tujuan ke-4 *Sustainable Development Goals* (SDGs), yakni menjamin pendidikan yang inklusif dan setara serta pembelajaran sepanjang hayat. Peningkatan cakupan dan keberlanjutan sekolah akan memperkuat modal manusia dan produktivitas generasi mendatang, sebagaimana ditekankan dalam inisiatif *Human Capital Index* atau Indeks Modal Manusia. Dengan kata lain, memastikan bahwa setiap anak masuk—dan tetap duduk di bangku—sekolah adalah langkah pertama untuk memutus rantai kerentanan dan membuka peluang kesejahteraan. Bagian ini menyajikan potret partisipasi sekolah di Indonesia pada periode 2022–2024, baik secara nasional maupun lokal (daerah), untuk mengidentifikasi kelompok yang masih tertinggal (*out of school*) serta memetakan kesenjangan akses pendidikan.

Angka partisipasi sekolah (APS) dalam Rapor Pendidikan dibedakan menjadi beberapa kelompok usia dengan mengukur keikutsertaan murid yang terdaftar secara resmi di seluruh jenjang pendidikan, baik pada pendidikan formal, informal, maupun nonformal. Dalam Rapor Pendidikan, kelompok usia yang digunakan adalah, antara lain, 7–12 tahun (setara SD), 13–15 tahun (setara SMP), 16–18 tahun (setara SMA/SMK), 4–18 tahun untuk penyandang disabilitas, serta 7–18 tahun untuk pendidikan kesetaraan. Dengan demikian, APS memberikan gambaran mengenai tingkat akses pendidikan, yakni berapa banyak anak dan remaja yang sedang mengenyam pendidikan, tanpa pertimbangan akan kesesuaian jenjang dengan usia maupun jalur yang diikuti (seperti umum, disabilitas, ataupun kesetaraan).

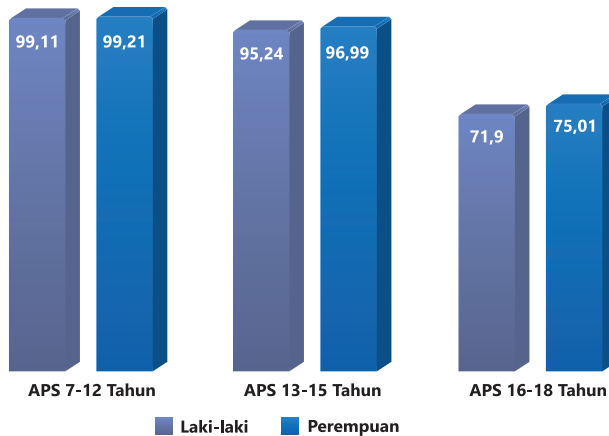


Gambar 3.1 Tren APS Nasional pada 2022–2024
(Sumber: Rapor Pendidikan 2022–2024)

Secara nasional, akses pendidikan dasar sudah sangat luas, terutama pada kelompok usia 7–12 tahun dan 13–15 tahun yang berada pada tingkat partisipasi tertinggi pada rentang 2022–2024. Hal ini menandakan bahwa keberlanjutan program perluasan akses dasar berjalan baik. Dapat dikatakan, hampir semua anak usia SD–SMP saat ini sedang melanjutkan pendidikan. Meskipun tidak sebaik kelompok SD–SMP, kelompok usia 5–6 tahun memiliki angka partisipasi yang cukup moderat berada pada kisaran 70%–80% pada rentang 2022–2024. Sebaliknya, tantangan akses pendidikan mulai tampak justru pada usia 16–18 tahun. Partisipasi anak sekolah pada usia tersebut berada di kisaran 70% pada tahun 2022 dan tidak mengalami peningkatan signifikan pada tahun-tahun berikutnya (2023–2024). Artinya, terdapat sebagian remaja yang tidak melanjutkan studi ke jenjang SMA ataupun SMK.

Tantangan makin berat jika kita menilik kelompok usia lainnya yang memiliki kekhususan, seperti kelompok usia 4–18 tahun untuk penyandang disabilitas dan 7–18 tahun untuk pendidikan kesetaraan. Pada kelompok penyandang disabilitas (4–18 tahun), meskipun mengalami lonjakan besar dari tahun 2022 ke 2023, angka partisipasinya masih di bawah 60%. Singkatnya, meski angka partisipasi mulai meningkat, masih ada ruang

bagi pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas. Sementara itu, angka partisipasi pendidikan kesetaraan (7–18 tahun) terus meningkat dari kondisi sebelumnya, tetapi masih sangat rendah, yakni pada kisaran 20%. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah dalam mempertimbangkan strategi jangkauan akses bagi murid pada pendidikan kesetaraan, baik itu mengembalikan mereka ke jalur formal atau bahkan memberikan kesempatan bagi mereka di dunia kerja.



Gambar 3.2 Tren APS Antarkelompok Gender pada Pendidikan Formal Tahun 2023
(Sumber data: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemendikdasmen)

Agar partisipasi sekolah benar-benar merata, analisis pada dokumen ini dilakukan dengan juga membagi kelompok berdasarkan gender. Hasilnya menunjukkan bahwa partisipasi sekolah nyaris setara pada usia awal wajib belajar. Pada kelompok 7–12 tahun, APS laki-laki mencapai 99,11% dan perempuan 99,21%. Perbedaan sebesar 0,10% tersebut menunjukkan bahwa akses sudah hampir setara untuk keduanya. Memasuki usia 13–15 tahun, kesenjangan mulai tampak; APS perempuan (96,99%) sedikit lebih tinggi daripada laki-laki (95,24%)—ada selisih sebesar 1,75%. Pada kelompok 16–18 tahun, kesenjangan melebar; APS perempuan 75,01%, sedangkan laki-laki 71,90%—selisihnya mencapai 3,11%. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan utama berada di transisi ke—dan keberlanjutan di—jenjang SMA/SMK bagi kelompok anak laki-laki.

Selain pada kelompok gender, disparitas juga terlihat pada angka partisipasi berdasarkan kelompok wilayah. Pemerataan partisipasi murid yang

mengenyam pendidikan juga masih menemui banyak tantangan. Dokumen ini juga akan menyajikan analisis partisipasi berdasarkan wilayah. Untuk kelompok usia 5–6 tahun, 7–12 tahun, dan 13–15 tahun, analisisnya akan diuraikan berdasarkan kabupaten/kota dengan memuat tabel kabupaten/kota dengan partisipasi tertinggi dan terendah. Sementara itu, analisis untuk kelompok 16–18 tahun, jenjang kesetaraan, dan penyandang disabilitas akan dipaparkan berdasarkan urutan provinsi dari yang tertinggi dan yang terendah. Pertimbangan ini disesuaikan dengan wilayah kewenangan Dinas Pendidikan yang umum berlaku di Indonesia.

Analisis wilayah berdasarkan kategori wilayah pada kelompok usia 5–6 tahun menunjukkan bahwa daerah dengan APS tertinggi didominasi kabupaten/kota di Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan dengan cakupan rentang 94,81%–99,17%. Sebaliknya, APS terendah didominasi kabupaten-kabupaten di Papua Pegunungan dengan angka 10,50%–0% (lihat Tabel 3.1). Sepuluh daerah berperingkat tertinggi dengan kategori “Baik” dipuncaki oleh Kabupaten Balangan (99,17%), lalu berturut-turut Kabupaten Hulu Sungai Selatan (98,68%) dan Kabupaten Kulon Progo (97,52%). Menyusul di belakang tiga daerah tersebut adalah Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Polewali Mandar, serta dua kota—Mojokerto dan Magelang—dengan angka di atas 95%; hanya Kabupaten Hulu Sungai Utara yang capaian APS-nya sedikit lebih rendah (94,81%). Sementara itu, sepuluh daerah dengan APS terendah semuanya merupakan kabupaten di Papua Pegunungan yang berstatus “Kurang” dengan APS sangat rendah: Dogiyai (0%), Puncak (1,40%), Nduga (3,80%), Lanny Jaya (3,83%), Tolikara (4,11%), Puncak Jaya (4,97%), Mamberamo Tengah (6,19%), Deiyai (6,71%), Paniai (8,67%), dan Yahukimo (10,50%). Temuan APS 0% di Dogiyai menunjukkan rendahnya layanan pendidikan untuk anak pada kelompok usia 5–6 tahun atau adanya kemungkinan anomali dalam pendataan murid.

Tabel 3.1 APS Usia 5–6 Tahun dengan Urutan 10 Daerah Tertinggi dan 10 Daerah Terendah Berdasarkan Kabupaten/Kota

10 Kabupaten/ Kota dengan APS Tertinggi	APS Usia 5–6 Tahun (%)	10 Kabupaten/Kota dengan APS Terendah	APS Usia 5–6 Tahun (%)
Kab. Balangan	99,17	Kab. Dogiyai	0
Kab. Hulu Sungai Selatan	98,68	Kab. Puncak	1,40
Kab. Kulon Progo	97,52	Kab. Nduga	3,80
Kab. Aceh Jaya	96,51	Kab. Lanny Jaya	3,83
Kab. Bondowoso	96,38	Kab. Tolikara	4,11
Kab. Gunung Kidul	95,87	Kab. Puncak Jaya	4,97
Kab. Polewali Mandar	95,47	Kab. Mamberamo Tengah	6,19
Kota Mojokerto	95,39	Kab. Deiyai	6,71
Kota Magelang	95,39	Kab. Paniai	8,67
Kab. Hulu Sungai Utara	94,81	Kab. Yahukimo	10,50

Pada kelompok usia 7–12 tahun, daerah dengan APS tertinggi ditempati Kota Jakarta Timur (100%), diikuti oleh kabupaten-kabupaten Serang, Banyumas, Muaro Jambi, Kutai Timur, Brebes, Kediri, Badung, Cianjur, dan Ciamis—semuanya mencatatkan angka 99,99%. Sebaliknya, kategori daerah dengan APS terendah didominasi kabupaten-kabupaten di Papua Pegunungan. Posisi terendah ditempati Puncak (58,30%), disusul oleh Paniai (60,70%), Puncak Jaya (62,98%), Deiyai (63,36%), Intan Jaya (65,20%), Yahukimo (68,06%), Pegunungan Bintang (69,63%), Tolikara (71,52%), Nduga (72,01%), dan Asmat (73,06%). Selisih ekstrem kabupaten/kota dengan APS tertinggi dan terendah mencapai sekitar 41,7% (lihat Tabel 3.2); hal ini menegaskan adanya kesenjangan signifikan dalam akses pendidikan dasar antarwilayah.

Tabel 3.2 APS Usia 7–12 Tahun dengan Urutan 10 Daerah Tertinggi dan 10 Daerah Terendah Berdasarkan Kabupaten/Kota

10 Kabupaten/ Kota dengan APS Tertinggi	APS Usia 7–12 Tahun (%)	10 Kabupaten/Kota dengan APS Terendah	APS Usia 7–12 Tahun (%)
Kota Jakarta Timur	100	Kab. Puncak	58,30
Kab. Serang	99,99	Kab. Paniai	60,70
Kab. Banyumas	99,99	Kab. Puncak Jaya	62,98
Kab. Muaro Jambi	99,99	Kab. Deiyai	63,36
Kab. Kutai Timur	99,99	Kab. Intan Jaya	65,20
Kab. Brebes	99,99	Kab. Yahukimo	68,06
Kab. Kediri	99,99	Kab. Pegunungan Bintang	69,63
Kab. Badung	99,99	Kab. Tolikara	71,52
Kab. Cianjur	99,99	Kab. Nduga	72,01
Kab. Ciamis	99,99	Kab. Asmat	73,06

Tidak berbeda jauh dengan kategori usia di bawahnya, pada kelompok usia 12–15 tahun (setara SMP), sebaran sepuluh daerah teratas didominasi wilayah Jawa dengan kisaran 99,99%–99,97%. Urutan lengkapnya adalah Kabupaten Lamongan, Kabupaten Kudus, Kota Malang, Kabupaten Klaten, dan Kota Bengkulu dengan APS sama sebesar (99,99%); diikuti Kota Semarang, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Jakarta Pusat dengan APS sama sebesar 99,98%; kemudian Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ciamis dengan APS sama sebesar 99,97%. Sementara itu, sepuluh daerah terbawah juga ditempati kabupaten-kabupaten di Papua Pegunungan, yakni Puncak dengan APS paling rendah (29,06%), Deiyai (50,56%), Intan Jaya (51,91%), Paniai (57,37%), Puncak Jaya (59,00%), Nduga (62,99%), Yahukimo (63,37%), Mamberamo Tengah (68,51%), Tolikara (68,99%), dan Dogiyai (71,16%). Perbedaan angka partisipasi pada kelompok kabupaten/kota teratas dan terbawah mencapai 70,9% (lihat Tabel 3.3). Selisih yang besar ini menegaskan adanya disparitas signifikan dalam akses pendidikan kelompok usia 7–12 tahun (setingkat SMP) antarwilayah.

Tabel 3.3 APS Usia 12–15 Tahun dengan Urutan 10 Daerah Tertinggi dan 10 Daerah Terendah Berdasarkan Kabupaten/Kota

10 Kabupaten/ Kota dengan APS Tertinggi	APS Usia 12–15 Tahun (%)	10 Kabupaten/ Kota dengan APS Terendah	APS Usia 12–15 Tahun (%)
Kab. Lamongan	99,99	Kab. Puncak	29,05
Kab. Kudus	99,99	Kab. Deiyai	50,56
Kota Malang	99,99	Kab. Intan Jaya	51,91
Kab. Klaten	99,99	Kab. Paniai	57,37
Kota Bengkulu	99,99	Kab. Puncak Jaya	59,00
Kota Semarang	99,98	Kab. Nduga	62,80
Kab. Sukoharjo	99,98	Kab. Yahukimo	63,36
Kota Jakarta Pusat	99,98	Kab. Membramo Tengah	68,51
Kab. Magetan	99,97	Kab. Tolikara	68,99
Kab. Ciamis	99,97	Kab. Dogiyai	71,16

Pada kelompok usia 16–18 tahun (lihat Tabel 3.4), APS secara nasional masih tergolong rendah. Pada kelompok ini tidak ada provinsi yang mencapai angka 99% ataupun 100% seperti halnya kelompok usia sebelumnya. Provinsi-provinsi dengan APS tertinggi untuk murid usia 16–18 tahun hanya berada di kategori “Sedang”—dipuncaki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta/DIY (90,36%), kemudian Kepulauan Riau (85,56%), Bali (85,17%), Sumatra Barat (84,4%), Kalimantan Timur (81,84%), Aceh (81,55%), Papua Barat Daya (81,14%), dan Papua (80,35%). Selebihnya, mayoritas provinsi berada di kategori “Rendah”. Sepuluh provinsi dengan APS terendah adalah Jambi (71,97%), Banten (71,91%), Papua Selatan (71,68%), Jawa Tengah (71,6%), Jawa Barat (71,15%), Sumatra Selatan (70,85%), Kalimantan Barat (69,39%), Kalimantan Tengah (68,33%), Papua Pegunungan (56,09%), dan Papua Tengah (47,65%).

Tabel 3.4 APS Usia 16–18 Tahun dengan Urutan Partisipasi Tertinggi dan Terendah Berdasarkan Provinsi

No.	Provinsi	APS Usia 16–18 Tahun (%)
1	DIY	90,36
2	Kepulauan Riau	85,56
3	Bali	85,17
4	Sumatra Barat	84,4
5	Kalimantan Timur	81,84
6	Aceh	81,55
7	Papua Barat Daya	81,14
8	Papua	80,38
9	Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta	79,95
10	Bengkulu	79,07
11	Kalimantan Utara	78,89
12	Sumatra Utara	78,59
13	Riau	78,49
14	Nusa Tenggara Barat (NTB)	77,81
15	Maluku	77,7
16	Jawa Timur	76,44
17	Maluku Utara	76,02
18	Nusa Tenggara Timur (NTT)	75,75
19	Sulawesi Tenggara	75,73
20	Papua Barat	75,32
21	Sulawesi Tengah	74,16
22	Sulawesi Selatan	73,17
23	Gorontalo	72,7
24	Kepulauan Bangka Belitung	72,69
25	Sulawesi Utara	72,48
26	Lampung	72,35
27	Kalimantan Selatan	72,31
28	Sulawesi Barat	72,09
29	Jambi	71,97
30	Banten	71,91
31	Papua Selatan	71,68
32	Jawa Tengah	71,6
33	Jawa Barat	71,15
34	Sumatra Selatan	70,8
35	Kalimantan Barat	69,39
36	Kalimantan Tengah	68,33
37	Papua Pegunungan	56,09
38	Papua Tengah	47,65

Di sisi lain, Tabel 3.5 memperlihatkan bahwa APS kelompok usia 7–18 tahun pada satuan pendidikan kesetaraan masih menjadi tantangan besar. Provinsi dengan APS tertinggi saat ini adalah Aceh (48,63%), disusul Kalimantan Selatan (48,48%) dan DIY (46,11%). Mayoritas provinsi berada di kisaran 20%–35%; bahkan wilayah besar di Jawa, seperti DKI Jakarta (18,37%), Jawa Timur (24,57%), Jawa Tengah (23,21%), dan Jawa Barat (24,48%), juga tergolong rendah. Provinsi dengan APS terendah berada di wilayah Indonesia Timur, yakni NTT (10,15%), diikuti Bali (11,13%), Papua Tengah (12,52%), dan Papua Pegunungan (12,86%). Selisih capaian antara provinsi dengan APS tertinggi dan terendah adalah 38,48%.

Tabel 3.5 APS Usia 7–18 Tahun Jenis Pendidikan Kesetaraan dengan Urutan Partisipasi Tertinggi dan Terendah Berdasarkan Provinsi

No.	Provinsi	APS Usia 7–18 Tahun Kesetaraan (%)
1	Aceh	48,63
2	Kalimantan Selatan	48,48
3	DIY	46,11
4	Sumatra Barat	40,69
5	Kepulauan Riau	40,18
6	Kalimantan Timur	36,57
7	Sulawesi Barat	36,31
8	Jambi	35,69
9	Maluku Utara	35,15
10	Riau	31,79
11	NTB	31,28
12	Bengkulu	29,65
13	Papua Barat Daya	29,05
14	Sulawesi Tenggara	28,92
15	Sulawesi Tengah	25,99
16	Sumatra Utara	25,06
17	Kalimantan Tengah	24,71
18	Jawa Timur	24,57
19	Jawa Barat	24,48
20	Jawa Tengah	23,21
21	Papua	23,01
22	Sulawesi Selatan	22,88
23	Kalimantan Utara	22,11
24	Papua Selatan	21,23
25	Maluku	21,01
26	Gorontalo	20,62
27	Banten	18,75
28	Sulawesi Utara	18,52
29	Lampung	18,43
30	DKI Jakarta	18,37
31	Kepulauan Bangka Belitung	17,80
32	Sumatra Selatan	15,21
33	Papua Barat	14,25
34	Kalimantan Barat	13,85
35	Papua Pegunungan	12,86
36	Papua Tengah	12,52
37	Bali	11,13
38	NTT	10,15

Pada jenis pendidikan disabilitas untuk kelompok usia APS 4–18 tahun, tren data menunjukkan pola yang sedikit berbeda. Provinsi dengan partisipasi tertinggi adalah Kepulauan Riau (82,18%), diikuti DIY (75,34%), Bengkulu (74,71%), Kalimantan Utara (73,93%), Papua Barat Daya (66,52%), dan Jawa Timur (64,87%). Mayoritas provinsi lainnya berada di kisaran 50%–65%. Sementara itu, provinsi dengan APS terendah diawali Papua (47,29%), kemudian berturut-turut Sulawesi Utara (46,49%), Kepulauan Bangka Belitung (46,37%), Kalimantan Barat (45,63%), Sumatra Barat (44,61%), Sulawesi Tenggara (42,77%), Kalimantan Selatan (40,45%), Sulawesi Barat (35,99%), Gorontalo (33,93%), dan Papua Barat (33,41%).

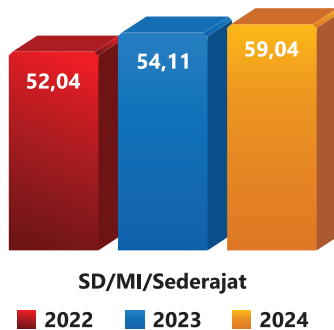
Tabel 3.6 APS Usia 4–18 Tahun Jenis Pendidikan Disabilitas dengan Urutan Partisipasi Tertinggi dan Terendah Berdasarkan Provinsi

No.	Provinsi	APS Usia 4–18 Tahun Disabilitas (%)
1	Kepulauan Riau	82,18
2	DIY	75,34
3	Bengkulu	74,71
4	Kalimantan Utara	73,93
5	Jawa Timur	64,87
6	Aceh	63,98
7	Kalimantan Tengah	62,60
8	Banten	61,33
9	Jambi	59,78
10	Bali	59,73
11	Maluku Utara	59,23
12	Maluku	57,38
13	Sumatra Utara	57,30
14	Sulawesi Selatan	56,87
15	Riau	56,75
16	Jawa Tengah	56,70
17	Sulawesi Tengah	56,24
18	Jawa Barat	55,14
19	NTT	54,35
20	Kalimantan Timur	53,75
21	Lampung	51,53
22	Sumatra Selatan	48,95
23	NTB	48,86
24	DKI Jakarta	47,84
25	Papua	47,29
26	Sulawesi Utara	46,49
27	Kepulauan Bangka Belitung	46,37
28	Kalimantan Barat	45,63
29	Sumatra Barat	44,61
30	Sulawesi Tenggara	42,77
31	Kalimantan Selatan	40,45
32	Sulawesi Barat	35,99
33	Gorontalo	33,93
34	Papua Barat	33,41

Secara nasional, APS menunjukkan pola menurun seiring dengan bertambahnya usia. Selain itu, data APS memperlihatkan pola ketimpangan yang konsisten, yaitu bahwa capaian tertinggi pada usia pendidikan dasar berada di wilayah barat dan tengah (Jawa, Sumatra, Bali, Kalimantan), sementara 10 daerah terbawah dengan pola yang sama di hampir sebagian besar kelompok usia berada di Provinsi Papua; atau, pada tingkat kabupaten/kota, posisi tersebut ditempati kabupaten-kabupaten di Papua Pegunungan. Jurang makin melebar pada transisi SMP sampai dengan SMA, yaitu bahwa sebagian besar provinsi berada di kisaran 70%-80%. Di sisi lain, layanan alternatif juga masih lemah. Pada jenis pendidikan kesetaraan untuk kelompok usia 7–18 tahun, angka partisipasi masih di bawah 50%. Demikian pula halnya APS pada jenis pendidikan disabilitas, hampir semuanya masih berada di kategori “Kurang”. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah partisipasi masih bersifat struktural dan berakut pada hal-hal mendasar, yakni wilayah geografis, akses dan mobilitas, ketersediaan satuan pendidikan, serta kemiskinan (pendapatan masyarakat) ataupun persepsi tentang pendidikan.

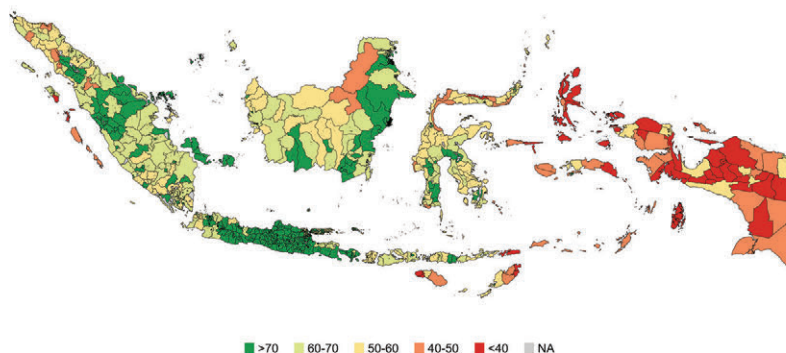
Capaian Literasi

Literasi pada tingkat SD/MI/Sederajat merupakan fondasi utama bagi seluruh proses belajar murid sepanjang hayat. Pada tahap ini, anak tidak hanya belajar mengeja dan membaca teks, tetapi juga mulai membangun kemampuan memahami informasi, bernalar, dan mengaitkan bacaan dengan pengalaman sehari-hari. Jika kemampuan literasi tidak kuat di SD/MI/Sederajat, murid akan kesulitan mengikuti pelajaran di tingkat selanjutnya. Dengan demikian, literasi menjadi titik awal yang menentukan kualitas pembelajaran dan kesetaraan kesempatan belajar pada masa depan.



Gambar 4.1 Tren Proporsi Murid SD/MI/Sederajat yang Mencapai Kompetensi Minimum Literasi Tahun 2022-2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)

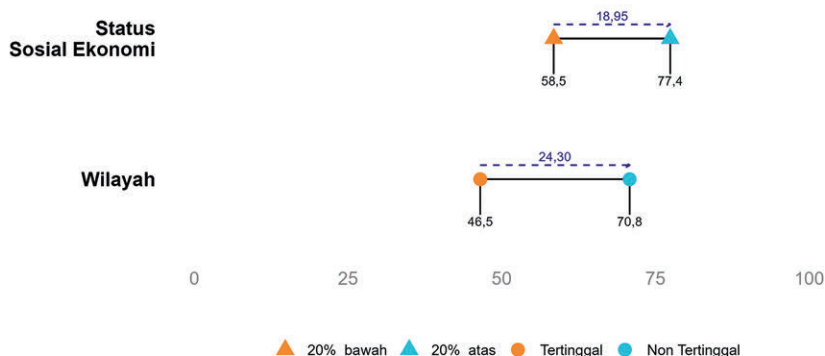
Pada tingkat SD/MI/Sederajat, proporsi murid yang mencapai kompetensi minimum literasi mengalami kenaikan secara konsisten dari 52,04% pada 2022 menjadi 57,11% pada 2023 dan 59,04% pada 2024. Dapat disimpulkan peningkatan capaian literasi tingkat SD/MI/Sederajat relatif moderat.



Gambar 4.2 Sebaran Persentase Murid SD/MI/Sederajat yang Mencapai Kompetensi Minimum Literasi Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Tren kenaikan capaian literasi sayangnya belum diimbangi dengan pemerataan kemampuan di seluruh wilayah Indonesia. Gambar 4.2 menunjukkan kesenjangan geografis capaian literasi nasional yang masih lebar. Wilayah Jawa–Bali umumnya didominasi warna hijau yang berarti bahwa >70% murid mencapai kompetensi minimum. Sementara itu, wilayah NTT, Maluku, dan Papua didominasi warna merah dengan capaian 40%–50%, bahkan <40%. Hal ini menandakan tantangan pemerataan mutu belajar.

Secara terperinci, wilayah Jawa–Bali didominasi warna hijau (>70%) meskipun masih ada kantong di wilayah pinggiran yang berwarna kuning (50%–60%). Sementara itu, Sumatra di wilayah perkotaan didominasi warna hijau, tetapi beberapa daerah pesisir timur/selatan capaiannya masih berkisar di angka 50%–60%. Wilayah Kalimantan cukup beragam di pusat/pesisir, yakni relatif berada pada angka >60%, sedangkan di pedalaman, capaiannya berkisar 50%–60%. Pulau Sulawesi bagian selatan dan sebagian barat berada di kisaran >60%, sementara wilayah kepulauan/pedalamannya di kisaran 40%–50%. Wilayah timur Indonesia, seperti NTT, Maluku, dan Papua, didominasi warna oranye dan merah, yaitu menunjukkan kisaran capaian 40%–50%, atau bahkan <40%.



Gambar 4.3 Kesenjangan Skor Literasi SD/MI/Sederajat Berdasarkan Status Sosial Ekonomi dan Wilayah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

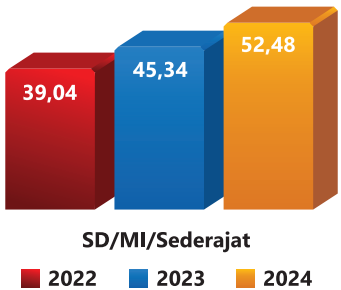
Pada kelompok tertinggal dan nontertinggal, kesenjangan capaian literasi juga masih tergolong besar. Selisih capaian literasi murid di wilayah tertinggal (46,5%) dan nontertinggal (70,8%) adalah 24,3 poin. Selisih tersebut mengindikasikan ketimpangan akses penguasaan literasi dasar yang berpotensi menghambat penguasaan keterampilan membaca dan memahami teks pada tingkat lanjut.

Senada dengan kesenjangan pada wilayah tertinggal dan nontertinggal, satuan pendidikan pada kelompok SSE 20% atas dan kelompok SSE 20% bawah juga menghadapi kesenjangan signifikan, yaitu 18,95 poin—pada SSE 20% bawah, capaiannya 58,5%; pada SSE 20% atas, capaiannya 77,4%. Kesenjangan ini menjadi sinyal bahwa murid-murid pada satuan pendidikan kelompok SSE 20% bawah menghadapi risiko untuk tertinggal dalam kemampuan literasi dasar.

Capaian Numerasi

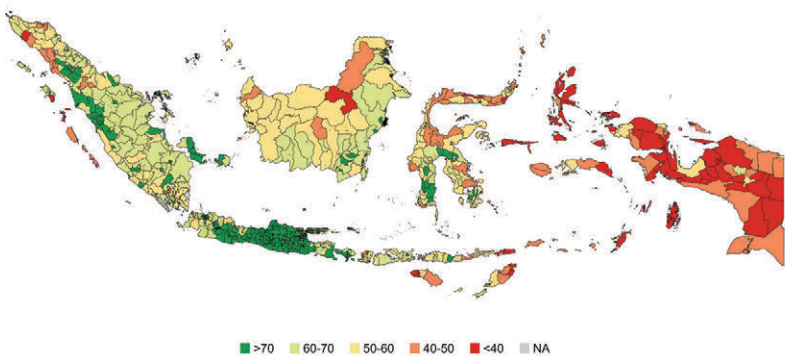
Kecakapan numerasi pada tingkat SD/MI/Sederajat memainkan peranan penting sebagai kunci utama kecakapan hidup. Numerasi bukan hanya soal kemampuan berhitung, tetapi juga perihal mengaplikasikan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari atau dalam memahami ilmu pengetahuan lain. Untuk itu, kompetensi numerasi merupakan

fondasi kognitif untuk meningkatkan keberhasilan akademik pada jenjang selanjutnya. Gambar 4.4 menunjukkan data tren proporsi murid yang mencapai kompetensi minimum numerasi dari tahun 2022 hingga 2024 (dalam persentase) pada tingkat SD/MI/Sederajat.



Gambar 4.4 Tren Proporsi Murid SD/MI/Sederajat yang Mencapai Kompetensi Numerasi Tahun 2022-2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)

Pada tingkat SD/MI/Sederajat, capaian proporsi murid yang mencapai kompetensi minimum numerasi mengalami peningkatan signifikan sebesar 13,44% selama dua tahun. Pada 2022, proporsi murid yang mencapai kompetensi minimum numerasi adalah 39,04%; angka ini berangsur meningkat menjadi 45,34% pada 2023, kemudian 52,48% pada 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya dampak positif dari berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di tingkat dasar, khususnya dalam hal numerasi.

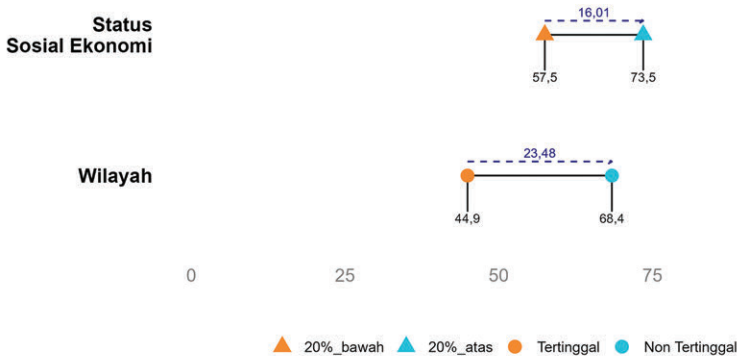


Gambar 4.5 Sebaran Persentase Murid SD/MI/Sederajat yang Mencapai Kompetensi Minimum Numerasi Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Berdasarkan gambaran sebaran kompetensi numerasi pada Gambar 4.5, capaian numerasi pada Rapor Pendidikan 2024 memiliki pola yang serupa dengan literasi. Dalam konteks kewilayahan, makin ke barat, warna peta makin hijau; sebaliknya, makin ke timur, warna berubah menjadi kuning–oranye hingga merah. Artinya, rata-rata kabupaten/kota di Jawa–Bali memiliki capaian lebih tinggi, sementara Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua masih tertahan pada rentang menengah ke bawah.

Lebih terperinci mengenai gambaran kompetensi numerasi di Jawa–Bali, warna hijau lebih dominan daripada warna lainnya. Hal ini berarti bahwa banyak daerah tembus $>70\%$ atau setidaknya berada di kisaran 60% – 70% . Di Sumatra dan Kalimantan, tampilannya lebih beragam—koridor perkotaan dan wilayah pesisir umumnya hijau atau hijau muda ($\geq 60\%$), sedangkan bagian pedalaman dan perbatasan lebih sering kuning (50% – 60%). Kondisi tersebut menyiratkan bahwa pusat aktivitas ekonomi dan layanan publik cenderung memiliki capaian numerasi yang lebih baik, dibandingkan dengan wilayah yang jaraknya jauh dari pusat.

Di Sulawesi, polanya cukup mosaik; beberapa kabupaten/kota mencapai $\geq 60\%$, tetapi tetangganya masih berkutat di kisaran 50% – 60% atau 40% – 50% . Nusa Tenggara terbelah—NTB relatif bercorak campuran (banyak daerah mencapai 50% – 70%), sementara NTT didominasi oranye–merah (≤ 50). Di Maluku dan Papua, warna hangat (kuning, oranye, dan merah) lebih luas; hal ini menunjukkan tantangan numerasi yang masih berat meski ada kantong-kantong kabupaten/kota yang mulai merangkak ke 50% – 60% .



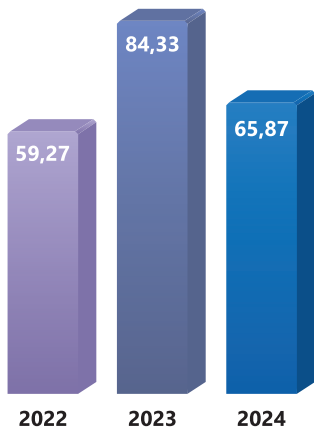
Gambar 4.6 Kesenjangan Skor Numerasi SD/MI/Sederajat Berdasarkan Status Sosial Ekonomi dan Wilayah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Capaian numerasi pada daerah tertinggal dan nontertinggal masih menunjukkan kesenjangan sebesar 23,48 poin. Pada wilayah tertinggal, skor rata-ratanya adalah 44,9%, sedangkan wilayah nontertinggal 68,4%.

Meskipun kesenjangan tidak sebesar kategori wilayah tertinggal dan non tertinggal, namun perbedaan sosial ekonomi masih memiliki pengaruh terhadap capaian numerasi. Pada SSE bawah, capaian numerasi pada kategori baik sebanyak 57,5% sementara pada SSE atas sebanyak 73,5% atau selisih 16,01%.

Capaian Karakter

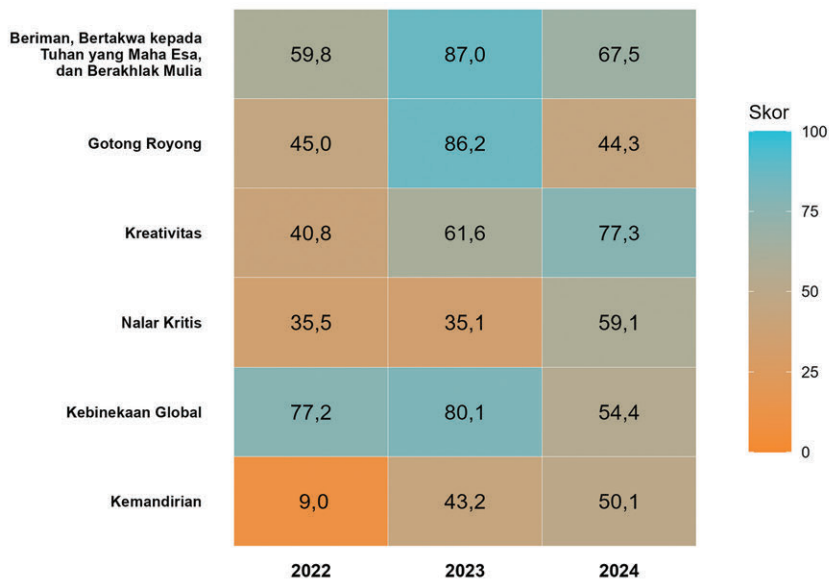
Pendidikan karakter pada tingkat SD/MI/Sederajat cukup krusial karena usia 6–12 tahun merupakan momentum terbaik bagi anak dalam membentuk sikap, empati, kejujuran, dan tanggung jawab. Pada fase ini, penekanan bukan hanya diarahkan pada aspek pengetahuan, melainkan bahwa murid juga diajari untuk menjadi bagian dari komunitas. Pada jenjang ini, pendidikan karakter merupakan upaya untuk membentuk budaya positif dengan menekankan pembentukan manusia yang berketuhanan, mandiri, memiliki sikap gotong royong, atau bahkan memiliki nalar kritis. Pada jenjang ini, ukuran capaian karakter tidak hanya dianggap sebagai pendukung akademik, melainkan juga fondasi penting dalam menyiapkan murid untuk menjadi warga negara yang berintegritas.



Gambar 4.7 Proporsi Satuan Pendidikan SD/MI/Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Indikator Karakter Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah)

Capaian karakter dengan kategori “Baik” pada tahun 2022, sebagaimana terlihat dari Gambar 4.7, adalah 59,27%. Pada 2023, capaian karakter mengalami kenaikan cukup signifikan, yaitu menjadi 84,33% atau naik sebesar 25,06%. Sayangnya, pada 2024, capaian karakter turun menjadi 65,87%. Meskipun terjadi penurunan, capaian karakter pada 2024 tetap lebih tinggi daripada 2022.

Agar makna capaian karakter bisa ditangkap secara lebih jelas, berikut disajikan komposit pembentuk capaian karakter yang terdiri atas enam indikator, yaitu Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia, Gotong Royong, Kreativitas, Nalar Kritis, Kebinekaan Global, serta Kemandirian. Gambar 4.8 menunjukkan *heatmap* capaian karakter yang bersumber dari data Asesmen Nasional (AN) tahun 2022–2024. Pada 2022, capaian tertinggi terjadi pada indikator Kebinekaan Global (77,2%) dan terendah pada indikator Kemandirian (9%). Pada 2023, hampir semua indikator meningkat. Indikator Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia serta Gotong Royong mencapai 86,2%, tetapi indikator Nalar Kritis justru mengalami penurunan sekitar 0,4%. Meskipun demikian, pada 2024 persentase indikator pembentuk capaian karakter cukup beragam: Kreativitas naik menjadi 77,3%, Nalar Kritis melompat menjadi 59,1%, dan Kemandirian mengalami perubahan positif menjadi 50,1%. Sebaliknya, indikator Beriman/Berakhlak mengalami koreksi menjadi 67,5%, tetapi masih lebih tinggi daripada tahun 2022. Kemudian, Gotong Royong mengalami penurunan ke angka 44,3% (lebih rendah daripada tahun 2022) dan Kebinekaan Global turun menjadi 54,4% (juga lebih rendah daripada 2022).



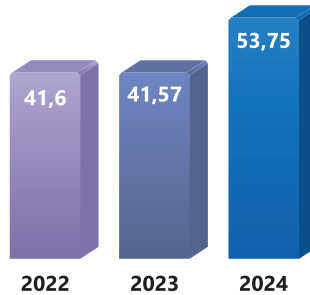
Gambar 4.8 Heatmap Proporsi Satuan Pendidikan SD/MI/Sederajat Kategori “Baik” pada indikator Karakter Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah)

Berdasarkan data pada Gambar 4.8, capaian karakter pada tingkat SD/MI/Sederajat sempat mengalami kenaikan pada 2023, lalu terkoreksi pada 2024. Aspek kognitif-personal (Kreativitas, Nalar Kritis, Kemandirian) mengalami kenaikan positif pada 2022, sementara aspek sosial-kebinekaan (Gotong Royong, Kebinekaan Global) melemah. Kemudian, indikator Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia menurun jika dibandingkan dengan capaian 2024, tetapi masih di atas capaian 2022. Hal ini berarti bahwa penguatan karakter berjalan, tetapi belum seimbang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemajuan individual perlu diimbangi dengan pemulihan dimensi sosial dan kebinekaan agar profil karakter utuh.

Capaian Kualitas Pembelajaran

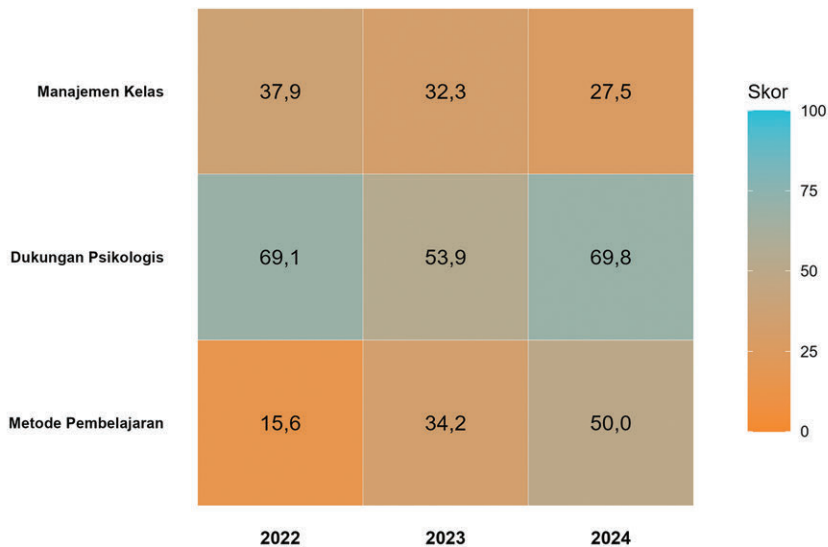
Berikutnya, dokumen ini akan memaparkan capaian kualitas pembelajaran pada tingkat SD/MI/Sederajat. Capaian kualitas pembelajaran merupakan fondasi perjalanan murid dalam memperoleh pengetahuan. Kualitas pembelajaran yang baik akan membantu murid dalam membaca,

memahami bilangan, dan membiasakan diri membentuk sikap belajar partisipatif, tetapi tetap kondusif dan menerapkan prinsip inklusi dalam proses belajar. Kualitas pembelajaran tingkat SD/MI/Sederajat dapat menjadi *leading indicator* dalam memprediksi keberhasilan transisi pembelajaran pada tahap berikutnya. Berikut adalah capaian kualitas pembelajaran satuan pendidikan secara nasional pada periode 2022–2024.



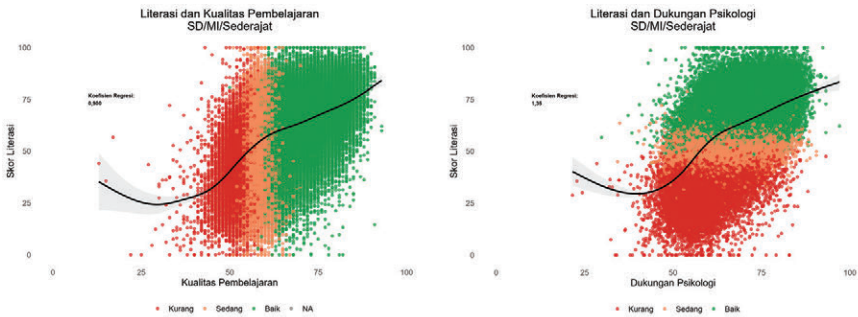
Gambar 4.9 Proporsi Satuan Pendidikan SD/MI/Sederajat dengan Kategori "Baik" pada Indikator Kualitas Pembelajaran Tahun 2022–2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah)

Capaian kualitas pembelajaran pada 2022–2024 tidak memiliki pola umum, tetapi peningkatan terlihat setelah dua tahun. Pada 2022, kualitas pembelajaran dengan capaian "Baik" adalah 41,6%, lalu hampir tidak berubah pada 2023, yakni sebesar 41,57%. Kemudian, pada 2024, makin banyak satuan pendidikan berkategori "Baik" untuk capaian kualitas pembelajaran, yakni sebesar 53,75%. Jadi, pada dua tahun pertama, capaian kualitas pembelajaran cenderung stagnan (turun tipis sebesar 0,03 poin), kemudian terjadi lonjakan sebesar 12,18% pada 2024.



Gambar 4.10 *Heatmap* Proporsi Satuan Pendidikan SD/MI/Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Indikator Kualitas Pembelajaran Tahun 2022–2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah)

Untuk capaian kualitas pembelajaran, sebagaimana dituangkan pada bab sebelumnya, komposit pembentuknya terdiri atas Manajemen Kelas, Dukungan Psikologis, dan Metode Pembelajaran oleh guru. Secara lebih terperinci, kualitas pembelajaran yang tergambar pada *heatmap* menunjukkan bahwa pada 2022, indikator Manajemen Kelas berada pada kategori “Sedang” (37,9%). Dukungan Psikologis menjadi indikator dengan persentase capaian paling tinggi (69,1%), sedangkan Metode Pembelajaran masih sangat rendah (15,6%). Pada 2023, capaian Manajemen Kelas dan Dukungan Psikologis mengalami penurunan masing-masing menjadi 32,3% dan 53,9%. Sebaliknya, Metode Pembelajaran mengalami tren peningkatan signifikan dari 15,6% menjadi 34,2%. Pada 2024, terlihat bahwa Dukungan Psikologis dan Metode Pembelajaran kembali mengalami peningkatan menjadi 69,8% dan 50%, tetapi Manajemen Kelas justru menurun menjadi 27,5%.



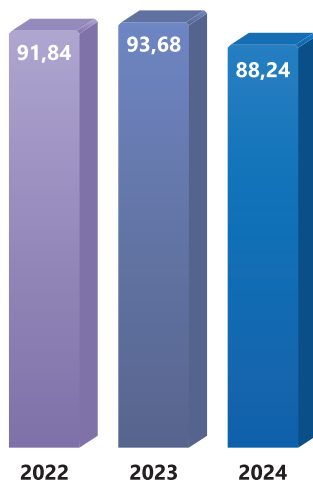
Gambar 4.11 Analisis Regresi Persebaran Data Hubungan Indikator Kualitas Pembelajaran dan Subindikator Dukungan Psikologis terhadap Literasi SD/MI/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Lebih lanjut, analisis regresi dilakukan untuk melihat keterkaitan antara kualitas pembelajaran dan capaian literasi maupun numerasi. Analisis ini dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana kualitas pembelajaran berpengaruh terhadap peningkatan skor literasi. Gambar 4.11 memperlihatkan bahwa skor literasi pada rentang 30–70 cenderung berpengaruh kuat terhadap kualitas pembelajaran. Hal tersebut memperkuat asumsi bahwa perbaikan kualitas pembelajaran merupakan prasyarat penting karena ia berkorelasi positif dengan hasil belajar murid. Jika dicermati lebih jauh, Dukungan Psikologis sebagai indikator level 2 dalam kualitas pembelajaran juga menunjukkan pengaruh signifikan, terutama pada kelompok murid dengan skor literasi di kisaran 30–80.

Capaian Iklim Keamanan

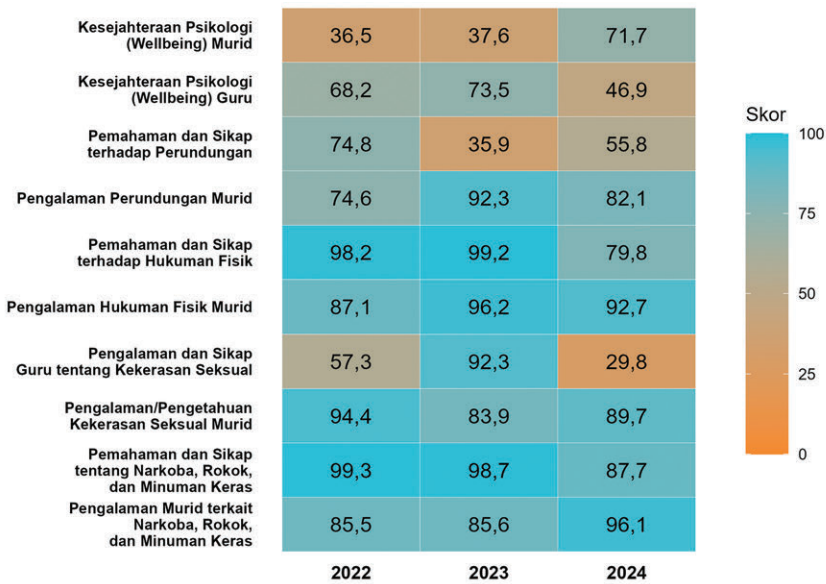
Selain capaian kualitas pembelajaran, iklim keamanan juga merupakan hal penting dalam mendukung proses pembelajaran yang nyaman dan kondusif. Iklim keamanan yang baik akan menurunkan risiko murid untuk mengalami perundungan, kekerasan fisik/verbal, dan diskriminasi. Indikator iklim keamanan diharapkan akan mendorong satuan pendidikan untuk menerapkan program pencegahan (edukasi *anti-bullying*, kekerasan seksual, pengawasan area rawan), menyediakan kanal pelaporan yang aman dan respons cepat, serta menerapkan disiplin restoratif alih-alih hukuman semata. Singkatnya, indikator iklim keamanan diharapkan dapat menciptakan suasana

nyaman dan menyenangkan serta memastikan bahwa setiap anak merasa dihargai, didengar, dan aman; hal ini pada gilirannya akan meningkatkan keterlibatan belajar dan hasil akademik.



Gambar 4.12 Proporsi Satuan Pendidikan SD/MI/Sederajat dengan Kategori "Baik" pada Indikator Iklim Keamanan Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah)

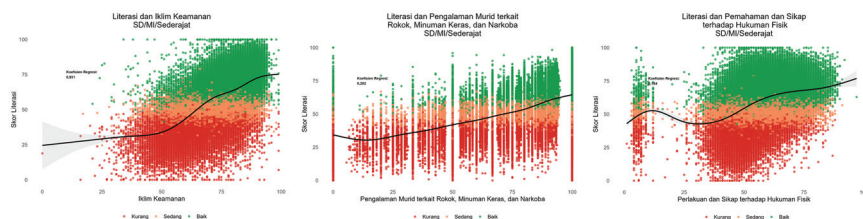
Berdasarkan Rapor Pendidikan tahun 2024, capaian iklim keamanan SD/MI/Sederajat untuk kategori "Baik" pada tahun 2022 adalah 91,84%. Capaian ini meningkat tipis pada 2023 menjadi 93,68%. Pada tahun 2024, capaian untuk kategori "Baik" mengalami penurunan menjadi 88,24% (turun 3,6%). Secara keseluruhan, tingginya capaian iklim keamanan pada kategori ini menunjukkan kondisi lingkungan belajar yang aman pada tingkat SD/MI/Sederajat.



Gambar 4.13 *Heatmap* Proporsi Sekolah SD/MI/Sederajat yang dengan Kategori “Baik” pada Indikator Iklim Keamanan Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah)

Ada sepuluh indikator pembentuk iklim keamanan, yaitu (i) Kesejahteraan Psikologis (*Wellbeing*) Murid, (ii) Kesejahteraan Psikologis (*Wellbeing*) Guru, (iii) Pemahaman dan Sikap terhadap Perundungan, (iv) Pengalaman Perundungan murid, (v) Pemahaman dan Sikap terhadap Hukuman Fisik, (vi) Pengalaman Hukuman Fisik murid, (vii) Pemahaman dan Sikap Guru tentang Kekerasan Seksual, (viii) Pengalaman/Pengetahuan Kekerasan Seksual murid, (ix) Pemahaman dan Sikap tentang Narkoba, dan (x) Pengalaman murid Terkait Narkoba. Berdasarkan *heatmap* pada Gambar 4.13, pada periode 2022–2024, kesejahteraan psikologis murid membaik kuat (dari 36,5% menjadi 37,6% dan 71,7%), sementara kesejahteraan psikologis guru justru melemah (dari 68,2% naik menjadi 73,5%, lalu turun pada 2024 menjadi 46,9%). Pemahaman dan sikap terhadap perundungan mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2023 dan sedikit meningkat pada 2024 (74,8% menjadi 35,9%, kemudian menjadi 55,8%). Sementara itu, pengalaman murid terkait perundungan relatif baik meskipun mengalami penurunan pada akhir tahun, yaitu dari 74,6% menjadi 92,3%, kemudian menjadi 82,1%. Dalam hal pemahaman dan sikap terhadap

hukuman fisik, capaiannya cukup baik, tetapi mengalami penurunan cukup tajam pada 2024 (dari 98,2% menjadi 99,2%, kemudian menurun menjadi 79,8%). Sementara itu, capaian dalam hal pengalaman murid terkait hukuman fisik membaik (dari 87,1% menjadi 96,2%, kemudian menjadi 92,7%). Dalam hal kekerasan seksual, pemahaman dan sikap guru terkait kekerasan seksual berfluktuasi cukup tajam (dari 57,3% menjadi 92,3%, lalu diakhiri dengan 29,8%), sedangkan pengalaman/pengetahuan murid mengenai kekerasan seksual menurun (dari 94,4% menjadi 83,9%, kemudian menjadi 89,7%). Capaian untuk indikator pemahaman dan sikap tentang narkoba, rokok, dan minuman keras mengalami penurunan (dari 99,3% menjadi 98,7%, kemudian menjadi 87,7%), sedangkan pengalaman murid terkait narkoba, rokok, dan minuman keras mengalami tren kenaikan (dari 85,5% menjadi 85,6%, kemudian meningkat menjadi 96,1%).



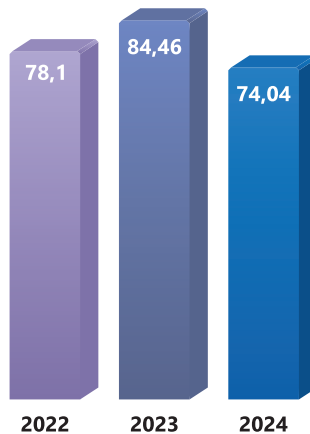
Gambar 4.14 Analisis Regresi Persebaran Data Hubungan Indikator Iklim Keamanan dan Subindikator Pengalaman Murid terkait Rokok, Minuman Keras, dan Narkoba & Pemahaman dan Sikap terhadap Hukuman Fisik Murid terhadap Literasi SD/MI/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Seperti halnya kualitas pembelajaran, kualitas iklim keamanan juga memiliki keterkaitan cukup signifikan dengan hasil belajar murid. Gambar 4.14 memperlihatkan bahwa Iklim keamanan sangat memengaruhi capaian belajar murid, terutama pada aspek literasi dengan skor 30–80. Pada indikator level 2, hal senada juga terlihat—pengaruh iklim keamanan terhadap numerasi terlihat melalui pengalaman murid terkait rokok, minuman keras, dan narkoba (koefisien 0,2), serta pengalaman terkait hukuman fisik yang berdampak pada capaian literasi pada kategori “Sedang” dan “Baik” (skor 40–80; koefisien 0,18). Temuan ini menegaskan bahwa upaya peningkatan hasil belajar tidak dapat dilepaskan dari intervensi sistematis untuk memperkuat iklim keamanan di sekolah.

Capaian Iklim Kebinekaan

Iklim kebinekaan di tingkat SD/MI/Sederajat adalah suasana sekolah yang menghargai perbedaan agama, budaya, bahasa, gender, dan latar sosial, serta memastikan bahwa semua murid diperlakukan setara. Lingkungan seperti ini diharapkan menciptakan perasaan aman bagi anak sehingga mereka berani berpendapat dan mudah bekerja sama. Hal tersebut penting untuk meningkatkan kualitas belajar.

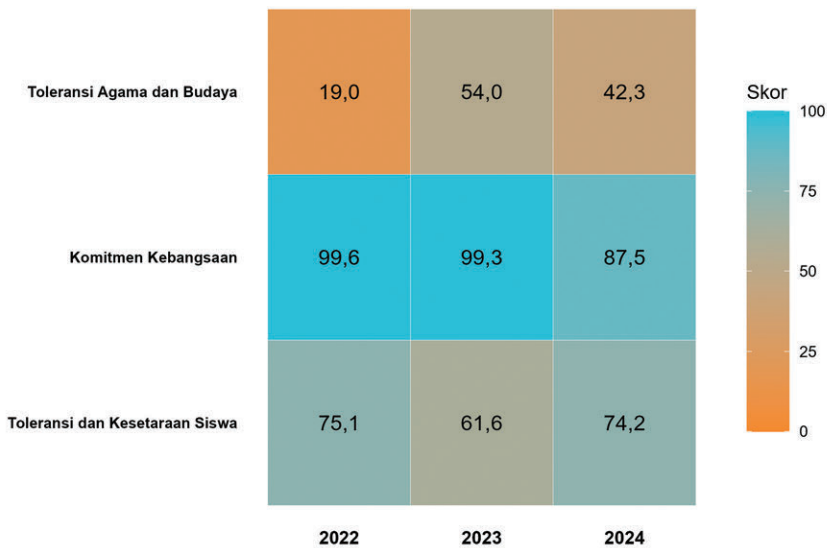
Gambar 4.15 memperlihatkan bahwa capaian dengan kategori “Baik” naik dari 78,10% pada tahun 2022 menjadi 84,46% pada 2023, kemudian turun menjadi 74,04% pada 2024. Tahun 2023 merupakan capaian terbaik karena terjadi kenaikan sebesar 6,36% dari capaian tahun 2022. Sayangnya, kenaikan tidak berlangsung lama karena, pada 2024, capaiannya kembali mengalami penurunan sebesar 10,42%.



Gambar 4.15 Proporsi Satuan Pendidikan SDI/MI/Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Indikator Iklim Kebinekaan Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)

Lebih terperinci, gambar *heatmap* menunjukkan indikator-indikator yang membangun iklim kebinekaan, yakni Toleransi Agama dan Budaya, Komitmen Kebangsaan, serta Toleransi dan Kesetaraan murid. Persentase sekolah dengan kategori “Baik” pada aspek Toleransi Agama dan Budaya sempat meningkat tajam dari 19% (tahun 2022) menjadi 54% (tahun 2023), tetapi kemudian turun menjadi 42,3% (tahun 2024). Sementara itu, Komitmen

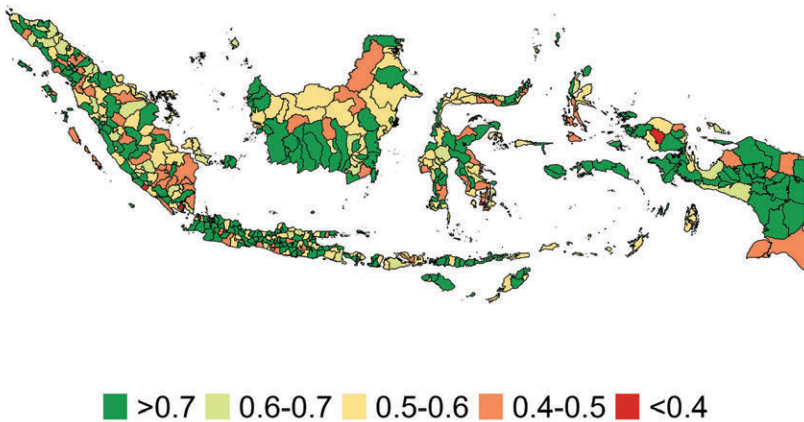
Kebangsaan merupakan aspek dengan capaian paling tinggi, tetapi juga konsisten mengalami penurunan, yakni dari 99,6% menjadi 99,3%, kemudian menjadi 87,5%. Capaian pada aspek Toleransi dan Kesetaraan murid dengan kategori “Baik” sempat melemah dari 75,1% (tahun 2022) menjadi 61,6% (tahun 2023), tetapi meningkat menjadi 74,2% pada 2024.



Gambar 4.16 Heatmap Proporsi Satuan Pendidikan SD/MI/Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Iklim Kebinekaan Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah)

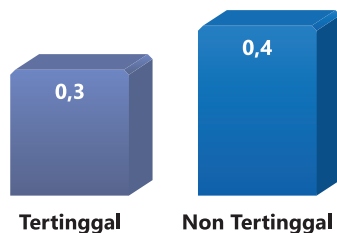
Pemerataan Kualitas Guru

Pemerataan kualitas guru didasarkan pada distribusi guru dan keikutsertaannya dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pembelajaran. Berdasarkan layanan, pemerataan kualitas diukur menurut indeks distribusi. Selain itu, berdasarkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam pembelajaran, kualitas diukur menurut sertifikasi dan pelatihan yang diikuti. Untuk itu, bagian berikut memaparkan gambaran distribusi guru, sertifikasi, dan pelatihan.



Gambar 4.17 Sebaran Distribusi Guru SD/MI/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Berdasarkan gambar 4.17, indeks distribusi guru cukup sporadis. Di wilayah Jawa–Bali serta sebagian Sumatra dan Sulawesi, banyak daerah memiliki warna hijau ($\geq 60\%$ – 70%) yang menandakan bahwa distribusi guru relatif merata. Sebaliknya, warna kuning, oranye, dan merah ($\leq 60\%$) terlihat di wilayah kepulauan terpencil, pedalaman/pegunungan, dan perbatasan, terutama di Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, dan Papua; hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan guru masih tinggi. Secara ringkas, pemerataan guru jauh lebih baik di kawasan yang memiliki akses baik daripada sebaliknya.



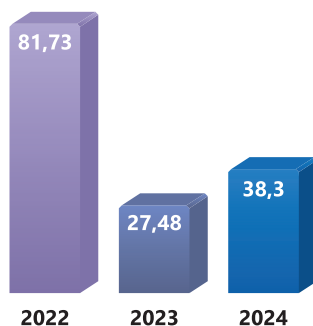
Gambar 4.18 Indeks Distribusi Guru SD/MI/Sederajat Berdasarkan Wilayah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Sementara itu, kesenjangan antara wilayah tertinggal dan nontertinggal terkait distribusi guru adalah sebesar 0,1 poin. Di wilayah tertinggal, angkanya

tercatat sebesar 0,3, sedangkan di wilayah nontertinggal angkanya mencapai 0,4 (rentang 0–1). Perbedaan ini menunjukkan bahwa satuan pendidikan tingkat SD/MI/Sederajat di wilayah nontertinggal memiliki kondisi distribusi guru yang sedikit lebih baik daripada wilayah tertinggal. Namun, karena selisihnya relatif kecil, dapat disimpulkan bahwa program pemerataan tenaga pendidik pada jenjang dasar mulai menunjukkan hasil positif kendati kekurangan jumlah guru masih signifikan (keterpenuhan guru: 60% di wilayah nontertinggal, 30% di wilayah tertinggal).

Sertifikasi Guru

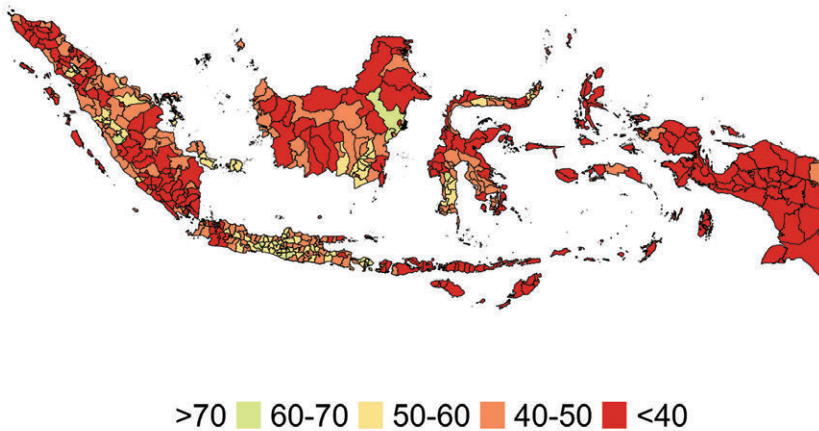
Sertifikasi guru merupakan program yang ditetapkan untuk memastikan setiap guru memiliki kecakapan pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang terstandar. Kecakapan-kecakapan tersebut merupakan keahlian dasar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar murid. Untuk itu, data terkait sertifikasi guru penting untuk mengukur kompetensi dan profesionalisme guru dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.



Gambar 4.19 Proporsi Guru Bersertifikat di SD/MI/Sederajat Tingkat Nasional Tahun 2022-2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)

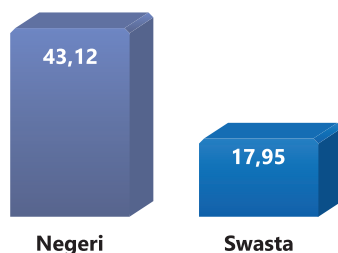
Namun, upaya peningkatan mutu pendidikan selama tiga tahun masih mengalami kendala. Pada Gambar 4.19 data rapor pendidikan menunjukkan bahwa kondisi proporsi guru bersertifikat tingkat SD/MI/Sederajat mengalami kemunduran signifikan terutama pada 2023, di mana jumlah guru bersertifikasi turun sebanyak 54,25% dari 81,73% menjadi 27,48%. Pada 2024,

angka sertifikasi guru mengalami kenaikan sebesar 10,82%, tetapi angka ini masih tergolong rendah. Penurunan angka sertifikasi guru disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya tingginya angka pensiun guru bersertifikat, meningkatnya pertumbuhan guru dalam jabatan yang belum tersertifikasi, dan terbatasnya kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai syarat awal untuk mendapat sertifikasi.



Gambar 4.20 Sebaran Proporsi Guru Bersertifikat di SD/MI/Sederajat Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Rendahnya persentase sertifikasi guru tingkat SD/MI/Sederajat menyebabkan sebaran guru di level nasional didominasi warna merah dan jingga. Hal ini berarti bahwa di banyak kabupaten/kota, jumlah guru/tenaga kependidikan bersertifikat masih di bawah 50%. Warna kuning (50–60%) dan hijau ($\geq 60\%$ –70%) terlihat di Jawa (sekitar Jateng, DIY, dan Jatim) serta beberapa titik di Sumatra dan Sulawesi. Sementara itu, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, serta pedalaman wilayah sekitar luar Jawa masih banyak yang berwarna merah. Secara ringkas, sertifikasi PTK SD/MI/Sederajat masih rendah dan tidak merata—lebih baik di wilayah yang mudah akses dibandingkan daerah-daerah tertinggal atau terpencil. Selanjutnya, jika dibandingkan proporsi PTK bersertifikat antara wilayah tertinggal dan nontertinggal, masih terlihat adanya kesenjangan capaian di seluruh jenjang pendidikan, seperti ditunjukkan oleh Gambar 4.20.

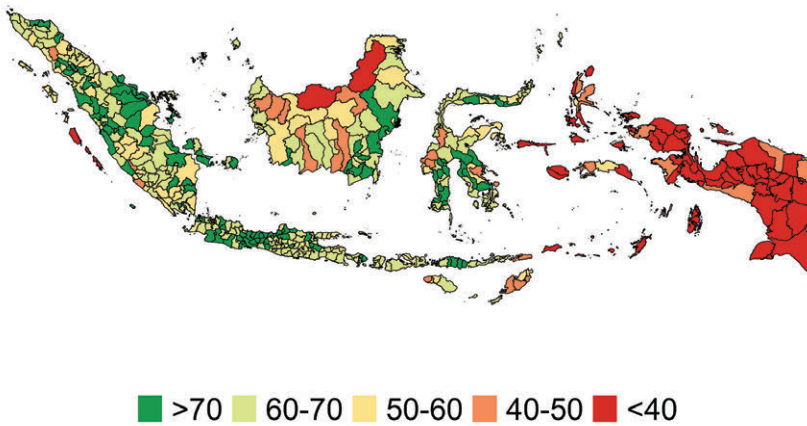


Gambar 4.21 Proporsi guru Bersertifikat di SD/MI/Sederajat Berdasarkan Status Sekolah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Jika dilihat lebih jauh, angka proporsi guru bersertifikat berdasarkan status satuan pendidikan negeri dan swasta juga mengalami kesenjangan. Pada satuan pendidikan negeri, proporsi guru bersertifikat pada tingkat SD/MI/Sederajat mencapai 43,12%, sementara pada satuan pendidikan swasta masih di bawah 20%. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya intervensi lebih kuat pada satuan pendidikan swasta meskipun ruang peningkatan mutu di satuan pendidikan negeri masih terbuka luas.

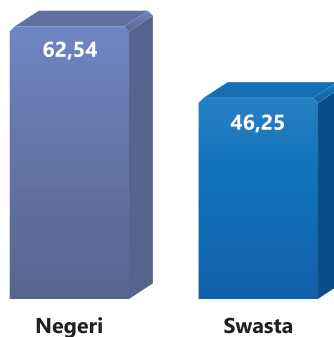
Pelatihan Guru

Analisis pelatihan guru merupakan indikator yang merefleksikan sejauh mana guru memperoleh akses terhadap kegiatan peningkatan kapasitas profesional dan pedagogik. Pelatihan menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendukung pembelajaran berkualitas karena berfungsi memperbarui kompetensi guru terkait perkembangan kurikulum, teknologi, dan pendekatan pembelajaran mutakhir. Dengan demikian, peningkatan proporsi guru yang mengikuti pelatihan tidak hanya mencerminkan upaya penguatan kualitas tenaga pendidik, tetapi juga kesiapan sistem pendidikan dalam menjawab tantangan perubahan.



Gambar 4.22 Sebaran Pengalaman Pelatihan Guru SD/MI/Sederajat Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Gambar 4.22 menunjukkan peta pengalaman pelatihan tingkat SD/MI/Sederajat. Peta menunjukkan ketimpangan yang jelas pada wilayah bagian barat Indonesia di Sumatra, Jawa, serta sebagian Kalimantan dan Sulawesi—lebih banyak memiliki kabupaten/kota berwarna hijau dan hijau muda (60%–70%). Hal ini menandakan banyaknya guru yang mengikuti pelatihan pada sejumlah sekolah di kabupaten/kota tersebut. Sementara itu, warna kuning (50%–60% guru terlatih) terlihat lebih banyak di wilayah Kalimantan, NTT dan NTB, serta Maluku. Terakhir, warna merah (kurang dari 40% guru bersertifikat) terlihat dominan di wilayah-wilayah terpencil/sulit akses, terutama di Papua dan sebagian kecil Kalimantan.

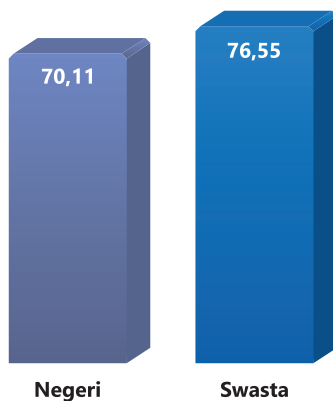


Gambar 4.23 Pengalaman Pelatihan Guru SD/MI/Sederajat Berdasarkan Status Sekolah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Untuk kategori satuan pendidikan berdasarkan status negeri dan swasta sebagaimana terlihat pada Gambar 4.23, tampak bahwa kesenjangan tingkat pelatihan guru secara nasional masih cukup besar. Pada satuan pendidikan negeri, angka partisipasi pelatihan guru sudah mencapai 62,54%, tetapi pada satuan pendidikan swasta angkanya masih di kisaran 46%. Kesenjangan antara satuan pendidikan negeri dan swasta sebesar 16,29% menunjukkan bahwa pemerataan pelatihan di jenjang pendidikan dasar belum cukup baik.

Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan

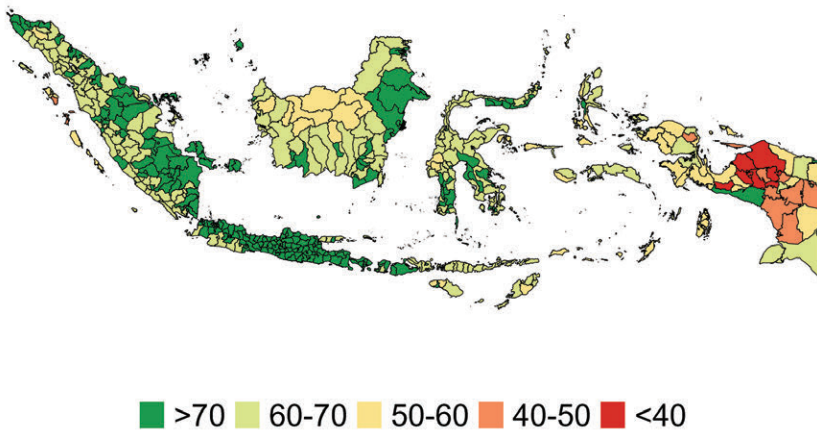
Indeks fasilitas satuan pendidikan tingkat SD/MI/Sederajat menggambarkan sejauh mana satuan pendidikan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Fasilitas pendidikan yang baik berkontribusi langsung terhadap kenyamanan, efektivitas pembelajaran, serta kesempatan yang setara bagi murid untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan indeks fasilitas satuan pendidikan menjadi indikator penting dalam mewujudkan pemerataan mutu layanan pendidikan di seluruh jenjang.



Gambar 4.24 Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan SD/MI/Sederajat Berdasarkan Status Sekolah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

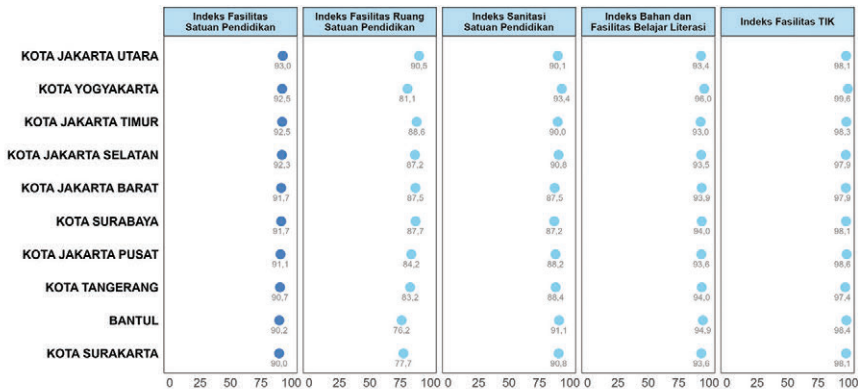
Gambar 4.24 menunjukkan perbandingan indeks fasilitas satuan pendidikan SD/MI/Sederajat antara satuan pendidikan negeri dan swasta. Pada satuan pendidikan negeri, proporsi yang mencapai indeks “Baik” adalah 70,11%, sedangkan pada satuan pendidikan swasta angkanya

mencapai 76,55%. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 6,44%; hal ini mengindikasikan bahwa, secara rata-rata, fasilitas di sekolah swasta lebih baik daripada sekolah negeri.



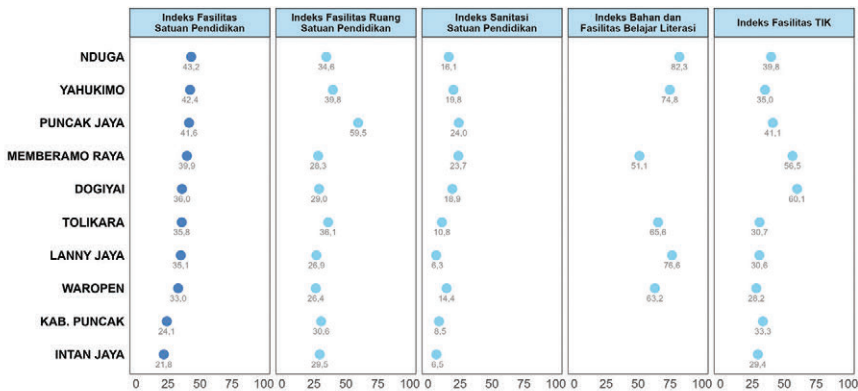
Gambar 4.25 Sebaran Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan SD/MI/Sederajat Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Apabila diuraikan lebih lanjut dengan analisis tingkat kabupaten/kota, hasilnya menunjukkan indeks fasilitas satuan pendidikan SD/MI/Sederajat dengan pola spasial yang jelas sebagaimana terlihat pada Gambar 4.25. Wilayah dengan capaian indeks tinggi (hijau tua, >70%) umumnya terkonsentrasi di Jawa–Bali, Sumatra, pesisir Kalimantan, dan beberapa kabupaten/kota di Sulawesi. Sementara itu, warna hijau–kuning (60%–70% dan 50%–60%) tersebar luas di sejumlah kabupaten di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra, serta beberapa kabupaten kecil di Jawa. Indeks dengan kategori “Rendah” (oranye–merah, 40%–50% dan <40%) paling banyak muncul di Papua, Papua Pegunungan, sebagian Maluku dan Nusa Tenggara, serta beberapa daerah pedalaman/perbatasan. Pola ini mengindikasikan kesenjangan fasilitas antarpulau dan antarkawasan: wilayah padat dan mudah diakses cenderung lebih siap, sementara wilayah terpencil masih tertinggal. Dengan demikian, prioritas peningkatan sarana dan prasarana dasar, utilitas sekolah, serta akses ke teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perlu difokuskan pada kawasan timur dan pedalaman.



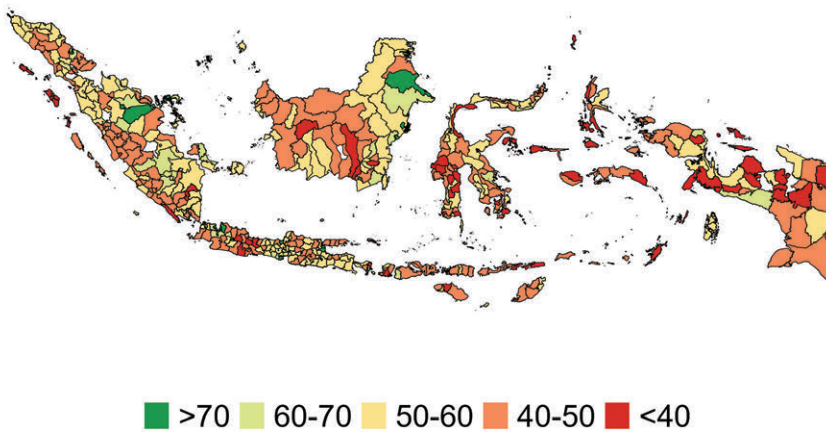
Gambar 4.26 Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan SD/MI/Sederajat di 10 Kabupaten/Kota Tertinggi Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Indeks fasilitas terdiri atas fasilitas ruangan (ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium), sanitasi, bahan dan fasilitas belajar literasi, serta fasilitas TIK. Dalam hal ini, kelompok sepuluh kota teratas didominasi kota besar/urban di Jawa (seperti Jakarta Utara, Yogyakarta, dan Surabaya) dengan skor konsisten tinggi, umumnya >90 pada hampir semua indikator level 2. Untuk komponen indeks bahan dan fasilitas belajar serta TIK, kisaran sekolah berkategori “Baik” sangat tinggi (pada rentang 95–100), sementara sanitasi juga kuat pada rentang 87–93. Namun, yang menarik adalah bahwa pada indeks fasilitas ruangan, beberapa sekolah dengan kategori “Baik” masih berada di rentang 77,7–90.



Gambar 4.27 Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan SD/MI/Sederajat di 10 Kabupaten/Kota Terendah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

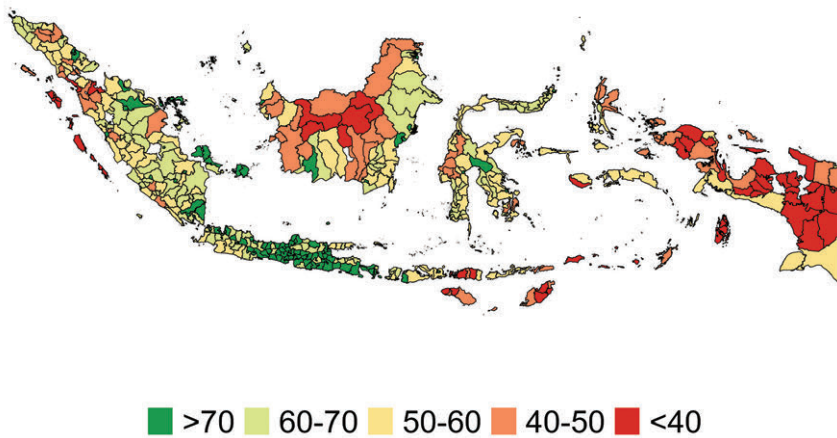
Sebaliknya, indeks fasilitas satuan pendidikan di 10 kabupaten/kota terendah didominasi kabupaten-kabupaten di tanah Papua (Nduga, Yahukimo, Puncak Jaya, Mamberamo Raya, Dogiyai, Tolikara, Lanny Jaya, Waropen, Puncak, dan Intan Jaya) dengan skor sangat rendah yang merata pada semua indikator level 2. Titik terlemah terlihat pada komponen sanitasi dan fasilitas ruangan (rentang 26–59, sedangkan sekolah berkategori “Baik” berada di rentang 6,5–24), diikuti oleh fasilitas TIK (rentang 28–60). Pada indeks bahan dan fasilitas belajar literasi, beberapa sekolah tidak memiliki data. Temuan ini menegaskan lebarnya disparitas infrastruktur pendidikan, terutama dalam hal kebutuhan dasar, seperti ruangan pendukung pembelajaran dan sanitasi.



Gambar 4.28 Sebaran Indeks Fasilitas Ruang Satuan Pendidikan SD/MI/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)Tingkat SD/MI/Sederajat Berdasarkan Data Rapor Pendidikan 2024

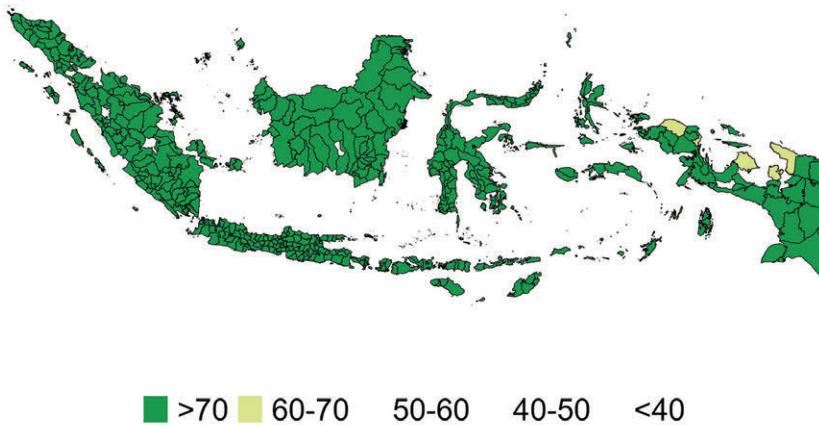
Jika diturunkan ke indikator level 2, sebaran indeks pada Gambar 4.28 menunjukkan indeks fasilitas ruangan Satuan Pendidikan SD/MI/Sederajat berdasarkan kabupaten/kota. Secara umum, indeks fasilitas didominasi warna kuning–oranye (40%–60% sekolah berkategori “Baik”). Hal ini menandakan bahwa kondisi fasilitas ruangan yang ideal belum terpenuhi di sebagian besar wilayah Indonesia. Wilayah dengan warna hijau atau memiliki >70% sekolah berkategori “Baik”, juga wilayah dengan rentang 60%–70%, lebih banyak merupakan daerah urban yang mudah diakses dan pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada kota-kota lainnya, misalnya Jakarta,

Yogyakarta, Surabaya, ataupun wilayah di sekitar kota besar. Sementara itu, warna merah (<40% sekolah berkategori “Baik”) lebih umum terlihat di wilayah kepulauan kecil, pesisir terpencil, dan kawasan pegunungan ataupun daerah-daerah di belahan timur Indonesia yang menghadapi hambatan geografis dan logistik. Pola ini mencerminkan ketimpangan antardaerah—daerah dengan akses, pendapatan asli daerah (PAD), dan konektivitas yang lebih baik cenderung memiliki fasilitas ruangan sekolah yang lebih layak, sedangkan wilayah tertinggal memiliki kondisi yang sebaliknya.



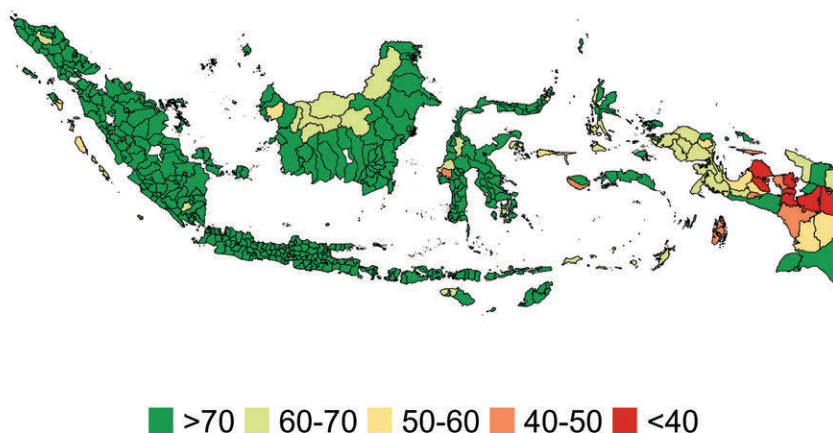
Gambar 4.29 Sebaran Indeks Sanitasi Satuan Pendidikan SD/MI/Sederajat Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Indikator lain yang cukup krusial adalah indeks sanitasi. Pada peta Gambar 4.29, secara umum indeks sanitasi didominasi warna kuning–oranye yang menandakan bahwa kurang dari 50% satuan pendidikan memiliki sanitasi baik di masing-masing kabupaten/kota. Hal ini berarti bahwa sebagian besar daerah masih berada di tingkat menengah–rendah. Sementara itu, kabupaten/kota yang memiliki lebih dari 70% satuan pendidikan dengan sanitasi baik umumnya terkonsentrasi di wilayah yang relatif padat/urban dengan kategori ekonomi yang lebih baik. Wilayah terendah sebagian besar didominasi daerah kepulauan dan pegunungan dengan akses terbatas.



Gambar 4.30 Sebaran Indeks Bahan dan Fasilitas Belajar Literasi Satuan Pendidikan SD/MI/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Di sisi lain, indikator bahan dan fasilitas belajar literasi justru menampilkan gambaran yang jauh lebih merata jika dibandingkan dengan indikator sarana dan prasarana lainnya. Hampir semua kabupaten/kota memiliki presentasi satuan pendidikan berwarna hijau tua (70% satuan pendidikan memiliki bahan literasi dengan kategori “Baik”). Hanya ada sedikit wilayah yang masih di bawah 70%—tersebar di kawasan timur Indonesia (sebagian di wilayah Papua). Tingginya sebaran bahan literasi murid sebetulnya belum mencerminkan kualitas bahan literasi itu sendiri, mengingat bahwa sekolah berkategori “Sedang” dan “Kurang” masih di atas 40% (lihat gambar tentang capaian literasi SD). Berdasarkan hal tersebut, pemerintah perlu melihat lebih jauh bahan belajar literasi yang tersedia, mulai dari kecukupan jumlahnya hingga kesesuaian bahan bacaan dengan kompetensi murid. Asumsi lain, keberadaan bahan bacaan ini sekadar pelengkap di satuan pendidikan; belum dimanfaatkan secara optimal oleh murid. Dengan demikian, pemerintah perlu menerapkan sejumlah strategi untuk memastikan bahan belajar di sekolah yang sesuai dengan kebutuhan murid atau bahkan menghadirkan sejumlah strategi untuk meningkatkan minat baca.

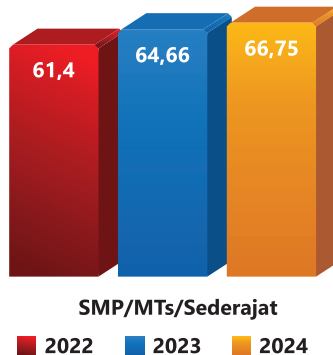


Gambar 4.31 Sebaran Indeks Fasilitas TIK Satuan Pendidikan SD/MI/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Terakhir, indeks fasilitas TIK memberikan gambaran yang lebih baik, dibandingkan dengan fasilitas sanitasi dan ruang, meskipun tidak lebih baik daripada indeks bahan dan fasilitas literasi. Gambar 4.31 menunjukkan bahwa kondisi fasilitas TIK satuan pendidikan di sebagian besar wilayah Indonesia bagian barat dan tengah, terutama Jawa dan Sumatra, berada pada kategori “Baik” (>70%). Sementara itu, di wilayah Kalimantan, Bali dan NTB, serta Sulawesi, meskipun tetap didominasi daerah-daerah dengan >70% sekolah berkategori “Baik”, beberapa kabupaten/kota masih berada di kisaran 60%–70% atau bahkan 50%–60%. Wilayah timur Indonesia, seperti NTT, Maluku, dan Papua, mengalami sejumlah hambatan terkait fasilitas TIK; hal ini ditandai dengan adanya beberapa daerah yang hanya memiliki 40%–50% atau bahkan kurang dari 40% satuan pendidikan berkategori “Baik”. Kondisi ini menunjukkan bahwa disparitas sarana TIK di satuan pendidikan, terutama di wilayah timur Indonesia, masih membutuhkan perhatian.

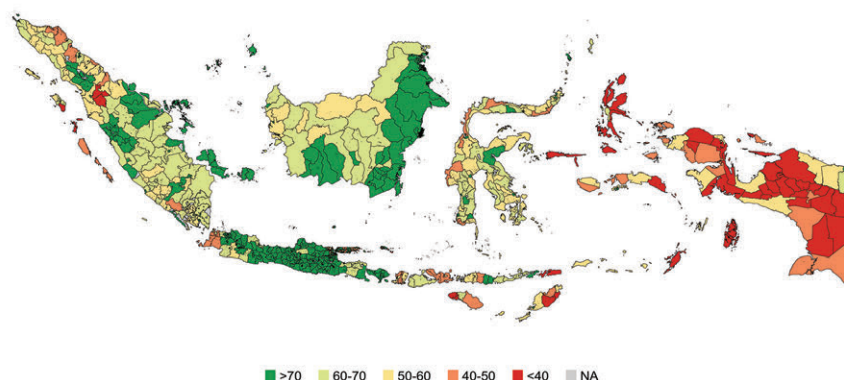
Capaian Literasi

Gambar 5.1 menunjukkan tren proporsi murid SMP/MTs/Sederajat yang mencapai kompetensi minimum literasi selama tiga tahun terakhir berdasarkan data Rapor Pendidikan 2022–2024. Capaian literasi sudah dikatakan "Baik" jika 70% murid pada satuan pendidikan sudah mencapai kompetensi minimum pada indikator literasi.



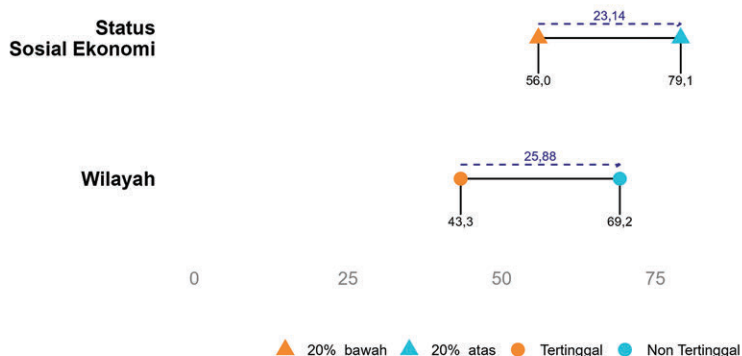
Gambar 5.1 Tren Proporsi Murid SMP/MTs/Sederajat yang Mencapai Kompetensi Minimum Literasi Tahun 2022-2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)

Di tingkat SMP/MTs/Sederajat, proporsi murid yang mencapai kompetensi minimum literasi mengalami kenaikan konsisten dari 61,4% (2022) menjadi 64,66% (2023), kemudian menjadi 66,75% (2024). Peningkatan ini perlu dipertahankan karena mengindikasikan adanya kemajuan dalam pengembangan kemampuan literasi tingkat SMP/MTs/Sederajat sehingga hasilnya dapat menjadi fondasi dalam menguatkan kemampuan murid pada tingkat yang lebih tinggi.



Gambar 5.2 Sebaran Persentase Murid SMP/MTs/Sederajat yang Mencapai Kompetensi Minimum Literasi Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Meskipun terjadi tren peningkatan capaian literasi (sesuatu yang positif), ketimpangan capaian literasi antarwilayah di Indonesia masih cukup besar. Gambar 5.2 menunjukkan sebaran persentase murid SMP/MTs/Sederajat yang mencapai kompetensi minimum literasi. Terlihat bahwa wilayah barat Indonesia memiliki capaian yang lebih baik daripada wilayah tengah dan timur. Wilayah-wilayah di Jawa, Sumatra, Bali, dan Kalimantan didominasi warna hijau tua dan hijau muda; hal ini menunjukkan bahwa persentase murid yang mencapai kompetensi minimum literasi lebih dari 60%. Sementara itu, wilayah Sulawesi, NTT, dan NTB capaiannya relatif beragam, dengan warna hijau muda, kuning, dan oranye. Hal tersebut menunjukkan bahwa proporsi murid di kabupaten/kota yang mencapai kompetensi minimum literasi berkisar 40%–70%. Di sisi lain, wilayah timur, seperti Maluku dan Papua, didominasi warna merah (capaian <40%)—sebuah situasi yang menunjukkan bahwa masih banyak murid di kabupaten/kota wilayah tersebut yang menemui tantangan dalam berliterasi. Dari Gambar 5.2, terlihat bahwa faktor geografis merupakan salah satu tantangan utama dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia, terutama dalam hal kompetensi literasi.



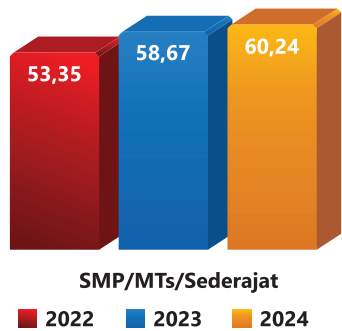
Gambar 5.3 Kesenjangan Skor Literasi SMP/MTs/Sederajat Berdasarkan Status Sosial Ekonomi dan Wilayah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Kesenjangan capaian literasi murid SMP/MTs/Sederajat terlihat makin jelas di satuan pendidikan berdasarkan kelompok status sosial ekonomi (SSE) dengan perbedaan sebesar 23,14 poin. Satuan pendidikan pada kelompok SSE 20% bawah mencatat capaian sebesar 56, sedangkan satuan pendidikan pada kelompok SSE 20% atas mencatat skor 79,1. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa murid dari keluarga atau satuan pendidikan kelompok SSE atas cenderung memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber belajar dan fasilitas pendidikan jika dibandingkan dengan kelompok SSE bawah.

Selain itu, pada tingkat yang sama, perbedaan capaian literasi murid SMP/MTs/Sederajat juga terlihat antara kelompok wilayah tertinggal (43,3) dan nontertinggal (64,7) dengan selisih sebesar 25,88 poin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa murid di wilayah tertinggal masih cenderung menghadapi keterbatasan akses pendidikan, padahal akses ini sangat penting untuk mendukung proses belajar yang optimal.

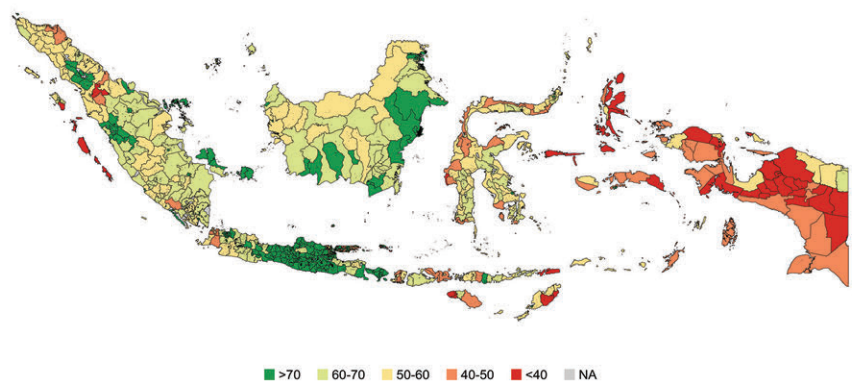
Capaian Numerasi

Gambar 5.4 menyajikan data tren proporsi murid SMP/MTs/Sederajat yang mencapai kompetensi minimum numerasi (dalam persentase) dari tahun 2022 hingga 2024.



Gambar 5.4 Tren Proporsi Murid SMP/MTs/Sederajat yang Mencapai Kompetensi Minimum Numerasi Tahun 2022-2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)

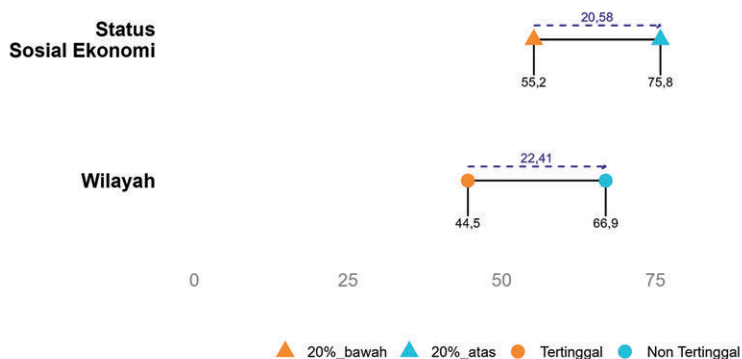
Untuk jenjang SMP/MTs/Sederajat, data pada Gambar 5.4 menunjukkan peningkatan proporsi murid yang stabil dan moderat, yakni dari 53,35% pada 2022 menjadi 60,24% pada 2024; peningkatannya adalah sebesar 6,89 poin persentase. Tren peningkatan yang konsisten menunjukkan adanya perkembangan positif dalam penguatan kemampuan numerasi murid. Namun, masih ada sekitar 40% murid yang belum mencapai standar minimum.



Gambar 5.5 Sebaran Persentase Murid SMP/MTs/Sederajat yang Mencapai Kompetensi Minimum Numerasi Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Gambar 5.5 memperlihatkan bahwa, meskipun terjadi peningkatan stabil dalam capaian literasi tingkat SMP/MTs/Sederajat, ia masih belum disertai sebaran persentase yang merata antarwilayah. Hal tersebut terlihat dari

disparitas yang signifikan antarwilayah dengan pola sebaran yang hampir serupa dengan capaian literasi. Warna hijau terlihat dominan di wilayah-wilayah Sumatra, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih dari 60% murid di wilayah tersebut telah mencapai kompetensi minimum numerasi. Sementara itu, wilayah di Sulawesi, NTT, dan NTB terlihat memiliki warna yang lebih beragam, dengan dominasi warna hijau muda, kuning, dan oranye. Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi murid yang mencapai kompetensi minimum di Sulawesi masih berkisar 40%–60%. Di sisi lain, wilayah-wilayah di belahan timur Indonesia, seperti Maluku dan Papua, masih didominasi warna merah dan oranye—menandakan bahwa kurang dari 50% murid mencapai kompetensi minimum numerasi. Sebagaimana yang terjadi pada kompetensi literasi, faktor geografis merupakan salah satu tantangan utama dalam pemerataan kompetensi numerasi.



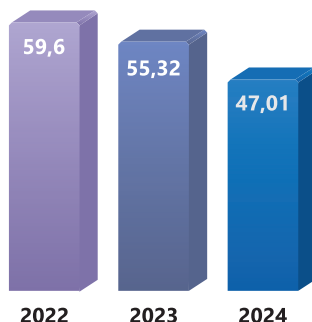
Gambar 5.6 Kesenjangan Skor Numerasi SMP/MTs/Sederajat Berdasarkan Status Sosial Ekonomi dan Wilayah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Disparitas capaian numerasi tingkat SMP/MTs/Sederajat terlihat makin jelas antarkelompok SSE, juga antara wilayah tertinggal dan nontertinggal. Kesenjangan antara satuan pendidikan pada kelompok SSE 20% bawah dan satuan pendidikan kelompok SSE 20% atas tampak lebar, yakni mencapai 20,58 poin. Kelompok SSE 20% atas memiliki skor 75,8—menandakan capaian numerasi yang sangat tinggi di sekolah-sekolah terbaik. Sebaliknya, skor kelompok SSE 20% bawah yang hanya 55,2 poin menunjukkan adanya tantangan akses yang lebih berat sehingga penguasaan materi numerasi tidak optimal. Sementara itu, di wilayah tertinggal, skor capaian berada di angka

44,5 dan wilayah nontertinggal di angka 66,9 sehingga selisih skor adalah 22,41 poin—menunjukkan disparitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan disparitas antarkelompok SSE. Hal tersebut mengindikasikan adanya keterbatasan akses ke fasilitas pembelajaran dan kurangnya tenaga pendidik dengan kompetensi numerasi yang baik sehingga membuat murid kesulitan dalam menguasai kompetensi numerasi.

Capaian Karakter

Capaian karakter menggambarkan aspek-aspek perilaku, sikap, dan nilai yang diharapkan muncul dalam diri murid sebagai hasil pembelajaran di sekolah; bukan hanya dari sisi akademik, tetapi juga kualitas kepribadian dan moral.

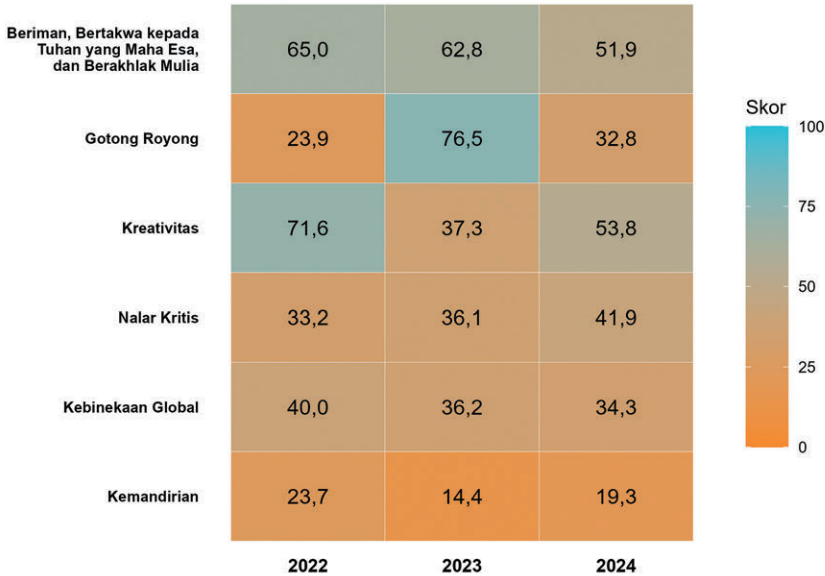


Gambar 5.7 Proporsi Satuan Pendidikan Tingkat SMP/MTs/Sederajat dengan Kategori "Baik" pada Indikator Karakter Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah)

Secara keseluruhan, capaian karakter tingkat SMP/MTs/Sederajat menunjukkan tren penurunan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Proporsi satuan pendidikan dengan kategori "Baik" menurun dari 59,6% (2022) menjadi 55,32 (2023), kemudian menjadi 47,01% (2024). Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan kualitas karakter murid secara keseluruhan. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan berkurangnya efektivitas pembiasaan nilai-nilai karakter di lingkungan sekolah dan rumah, serta meningkatnya tantangan di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan data Rapor Pendidikan tiga tahun terakhir (2022–2024), capaian karakter tingkat SMP/MTs/Sederajat menunjukkan dinamika

yang beragam di antara enam indikator karakter yang diukur. Gambar 5.8 menunjukkan dinamika tren yang bervariasi pada kategori “Baik” capaian indikator level 2 selama periode 2022–2024.



Gambar 5.8 Heatmap Proporsi Satuan Pendidikan SMP/MTs/Sederajat Kategori “Baik” pada indikator Karakter Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah)

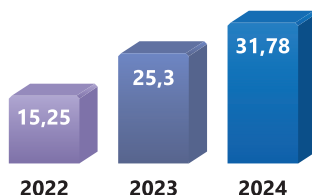
Persentase murid pada indikator Beriman, Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia serta Kebinekaan Global memperlihatkan penurunan dalam tiga tahun terakhir. Indikator Beriman, Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia menurun dari 65% (2022) menjadi 62,8% (2023), kemudian menjadi 51,9% (2024). Indikator Kebinekaan Global mengalami penurunan bertahap dari 40% (2022) ke 36,2% (2023) dan 34,3% (2024). Indikator Gotong Royong, Kreativitas, dan Kemandirian terlihat mengalami fluktuasi signifikan. Sangat fluktuatifnya indikator Gotong Royong tecermin dari angka capaian 23,9% (2022) yang melonjak tajam menjadi 76,5% (2023). Capaian tersebut kemudian merosot menjadi 32,8% (2024). Capaian indikator Kreativitas juga mengalami fluktuasi yang tecermin dari angka 71,6% (2022), tetapi menurun drastis menjadi 37,3% (2023), kemudian naik kembali menjadi 53,8% (2024). Sementara itu, indikator Kemandirian

memiliki capaian terendah selama tiga tahun terakhir, yaitu 23,7% (2022), lalu turun menjadi 14,4% (2023), dan sedikit meningkat menjadi 19,3% (2024). Berbeda dengan indikator lainnya, Nalar Kritis menunjukkan tren peningkatan konsisten dari 33,2% (2022) menjadi 36,1% (2023), kemudian 41,9% (2024).

Dengan demikian, secara keseluruhan terlihat bahwa tidak semua indikator mengalami tren peningkatan; beberapa bahkan menurun cukup signifikan dan ada yang terlihat fluktuatif. Hal tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam pembinaan karakter, khususnya dalam menjaga konsistensi kualitas penguatan karakter tingkat SMP/MTs/Sederajat.

Capaian Kualitas Pembelajaran

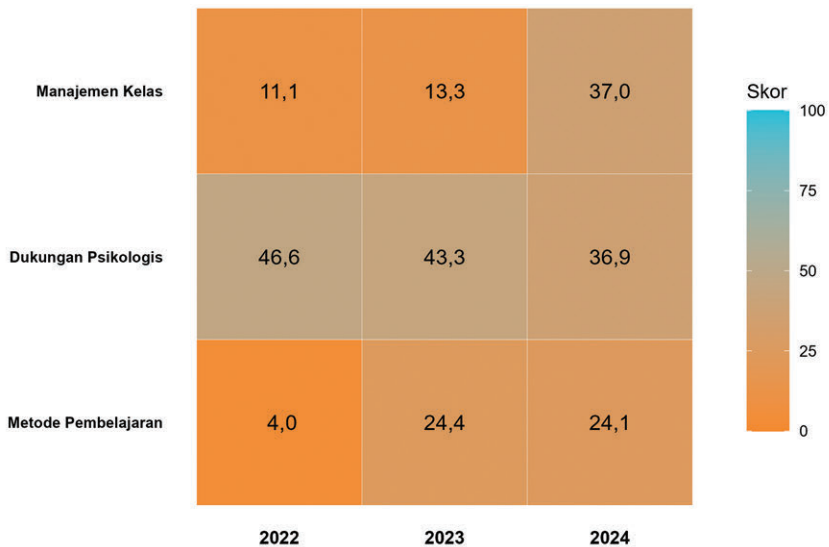
Gambar 5.9 menunjukkan proporsi satuan pendidikan yang memiliki capaian “Baik” untuk indikator Kualitas Pembelajaran pada Rapor Pendidikan 2022–2024.



Gambar 5.9 Proporsi Satuan Pendidikan SMP/MTs/Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Indikator Kualitas Pembelajaran Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)

Pada tingkat SMP/MTs/Sederajat, proporsi “Baik” memperlihatkan tren positif, dengan proporsi satuan pendidikan mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir, yaitu dari 15,25% (2022) menjadi 25,3% (2023), lalu naik lagi menjadi 31,78% (2024). Hal tersebut menandakan adanya perbaikan yang konsisten dalam kualitas pembelajaran tingkat SMP/MTs/Sederajat.

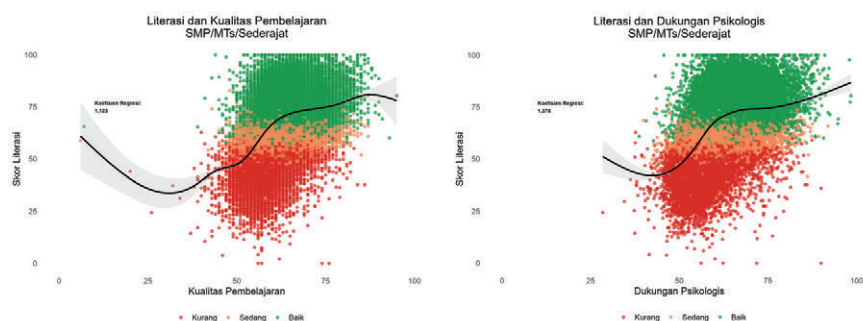
Lebih lanjut, kualitas pembelajaran dapat dilihat melalui tiga indikator pembentuknya, yaitu Manajemen Kelas, Dukungan Psikologis, dan Metode Pembelajaran.



Gambar 5.10 Heatmap Proporsi Satuan Pendidikan SMP/MTs/Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Indikator Kualitas Pembelajaran Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah)

Dari gambar 5.10 terlihat bahwa Manajemen Kelas merupakan satu-satunya indikator yang konsisten meningkat, yaitu dari 11,1% (2022) menjadi 13,3% (2023), kemudian meningkat tajam menjadi 37% (2024). Indikator Metode Pembelajaran terlihat fluktuatif, tetapi relatif stabil pada 2023–2024, dengan peningkatan drastis dari 4% (2022) menjadi 24,4% (2023), tetapi kemudian turun meski tidak terlalu signifikan menjadi 24,1% (2024). Di sisi lain, indikator Dukungan Psikologis mengalami penurunan signifikan pada tiga tahun terakhir, yaitu dari 46,6% (2022) menjadi 43,3% (2023), kemudian turun lagi menjadi 36,9% (2024). Secara keseluruhan, Manajemen Kelas terlihat memiliki tren positif, sementara Metode Pembelajaran dan Dukungan Psikologis masih memerlukan penguatan yang konsisten.

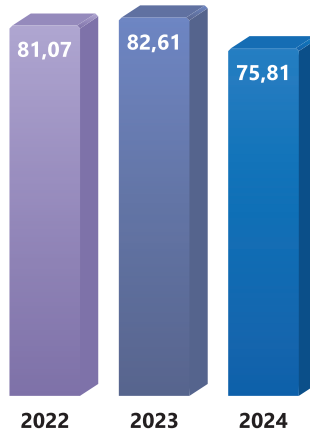
Untuk melihat sejauh mana kualitas pembelajaran berpengaruh terhadap capaian literasi dan numerasi, dilakukanlah analisis regresi.



Gambar 5.11 Analisis Regresi Persebaran Data Hubungan Indikator Kualitas Pembelajaran dan Subindikator Dukungan Psikologis terhadap Literasi SMP/MTs/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

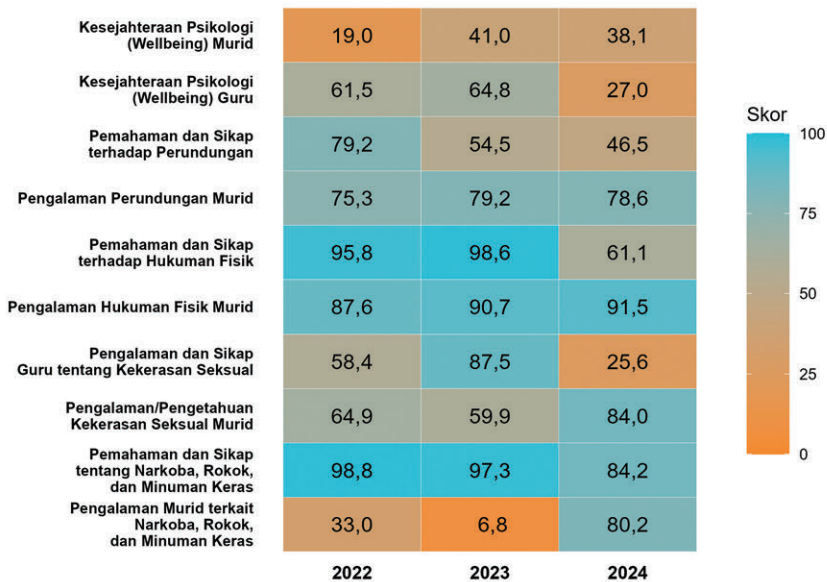
Hasil analisis regresi memperlihatkan korelasi positif antara capaian Kualitas Pembelajaran dan subindikator Dukungan Psikologis terhadap skor Literasi. Pada rentang 40–60, terjadi perubahan signifikan dengan skor literasi bergerak stabil naik ke rentang 60–85. Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Pembelajaran yang lebih baik memberikan dampak nyata terhadap capaian Literasi murid di tingkat SMP/MTs/Sederajat. Adanya koefisien regresi sebesar 1,123 memperkuat interpretasi bahwa hubungan antara kedua indikator bersifat positif dan cukup kuat. Hal serupa juga tampak pada subindikator Dukungan Psikologis, yang memiliki hubungan positif dengan capaian Literasi murid. Seiring dengan meningkatnya Dukungan Psikologis yang terlihat pada rentang 60–85, skor Literasi juga meningkat. Koefisien regresi sebesar 1,078 makin menegaskan bahwa Dukungan Psikologis memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil belajar murid, khususnya capaian Literasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi psikologis murid perlu menjadi perhatian karena ia berkontribusi bagi peningkatan capaian literasi.

Capaian Iklim Keamanan



Gambar 5.12 Proporsi Satuan Pendidikan SMP/MTs/Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Indikator Iklim Keamanan Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah)

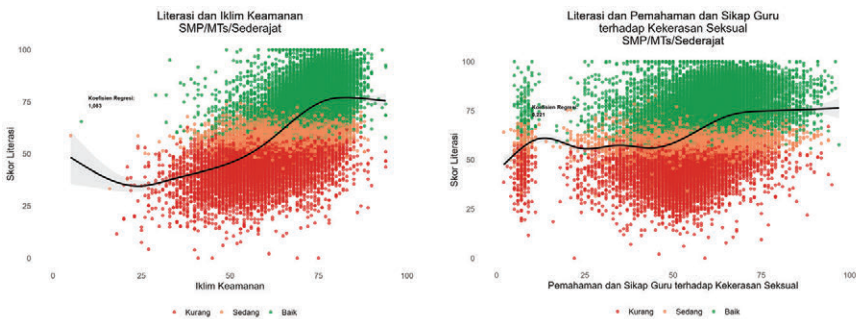
Dari gambar 5.12 terlihat bahwa proporsi SMP/MTs/Sederajat berkategori “Baik” pada indikator Iklim Keamanan mengalami fluktuasi pada tiga tahun terakhir. Hal tersebut tecermin dari proporsi satuan pendidikan yang naik dari 81,07% (2022) menjadi 82,61% (2023), tetapi kemudian turun menjadi 75,81% (2024). Tren capaian yang fluktuatif mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas iklim keamanan di tingkat SMP/MTs/Sederajat.



Gambar 5.13 *Heatmap* Proporsi Sekolah SMP/MTs/Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Indikator Iklim Keamanan Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah)

Gambar 5.13 menampilkan *heatmap* indikator pendukung iklim keamanan di tingkat SMP/MTs/Sederajat, terlihat variasi tren yang cukup kontras antarindikator. Indikator kesejahteraan psikologis (*wellbeing*) murid terlihat membaik tajam dari 19% (2022) menjadi 41% (2023), tetapi berikutnya menurun menjadi 38,1% (2024). Kemudian, indikator kesejahteraan psikologis guru juga fluktuatif; hal ini tecermin dari meningkatnya capaian dari 61,5% (2022) menjadi 64,8% (2023), tetapi kemudian turun drastis ke 27% (2024). Sementara itu, pemahaman dan sikap terhadap perundungan menurun secara konsisten: terjadi penurunan cukup drastis dari 79,2% (2022) menjadi 54,5% (2023), lalu turun lagi menjadi 46,5% (2024). Indikator pengalaman perundungan murid relatif stabil meskipun terjadi sedikit penurunan pada 2024; selengkapannya: naik dari 75,3% (2022) ke 79,2% (2023), kemudian turun menjadi 78,6% (2024). Di sisi lain, indikator pemahaman dan sikap terhadap hukuman fisik awalnya sangat tinggi pada 2022–2023 (95,8% dan 98,6%), tetapi kemudian turun signifikan menjadi 61,1% (2024). Adapun pengalaman hukuman fisik murid, capaiannya konsisten meningkat dari 87,6% (2022)

menjadi 90,7% (2023), dan relatif stabil di angka 91,5% (2024). Pada indikator pengalaman dan sikap guru tentang kekerasan seksual, terlihat tren ekstrem. Hal tersebut tecermin dari capaian yang meningkat tajam dari 58,4 (2022) ke 87,5% (2023), tetapi kemudian anjlok ke 25,6% (2024). Sementara itu, indikator pengalaman/pengetahuan kekerasan seksual murid memperlihatkan tren fluktuatif: dari 64,9% (2022) turun menjadi 59,9% (2023), tetapi kemudian meningkat menjadi 84% (2024). Indikator pemahaman dan sikap tentang narkoba, rokok, dan minuman keras terlihat konsisten turun dari 98,8% (2022) menjadi 97,3% (2023), lalu turun lagi menjadi 84,2% (2024). Adapun pengalaman murid terkait narkoba, rokok, dan minuman keras, capaiannya terlihat fluktuatif, yakni dari 33% (2022) dan 6,8% (2023) membaik drastis menjadi 80,2% (2024). Secara umum, Gambar 5.14 menunjukkan kurangnya konsistensi satuan pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi murid serta guru.

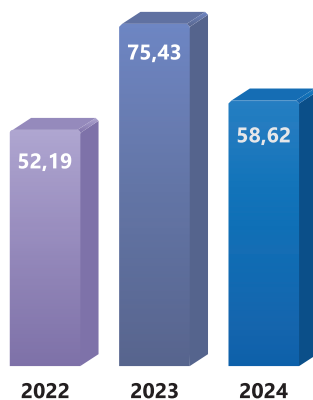


Gambar 5.14 Analisis Regresi Persebaran Data Hubungan Indikator Iklim Keamanan dan Subindikator Pemahaman dan Sikap Guru tentang Kekerasan Seksual terhadap Literasi SMP/MTs/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Iklim keamanan juga merupakan salah satu aspek yang dianggap memiliki pengaruh dalam mendukung keberhasilan belajar murid. Pada Gambar 5.14, terlihat korelasi positif antara capaian iklim keamanan dan skor literasi. Pada rentang iklim keamanan yang tinggi (60–85), skor literasi pun cenderung tinggi (65–85). Hal tersebut menunjukkan bahwa makin aman dan nyaman lingkungan sekolah, makin tinggi juga capaian literasi murid. Selain itu, adanya koefisien regresi sebesar 1,083 menandakan bahwa iklim keamanan dan literasi memiliki keterkaitan positif. Begitu juga dengan indikator level 2

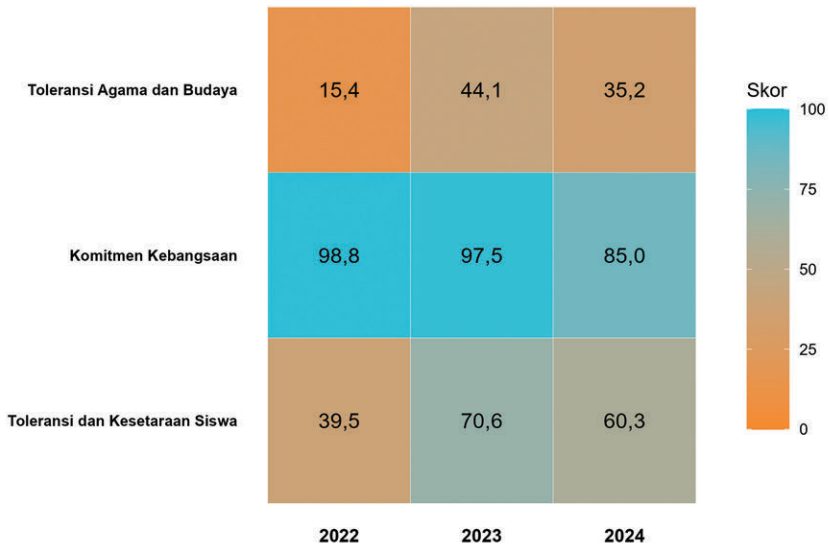
iklim keamanan, yaitu pemahaman dan sikap guru terhadap kekerasan seksual; indikator ini berkontribusi cukup signifikan dalam menghasilkan capaian literasi tinggi. Gambar 5.14 memperlihatkan adanya hubungan positif antara tingkat pemahaman dan sikap guru terhadap kekerasan seksual dan capaian literasi murid. Peningkatan nyata terlihat pada rentang 70–90 yang diikuti dengan capaian literasi tinggi (65–85); hal ini menunjukkan bahwa pemahaman guru yang baik mengenai kekerasan seksual akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada kualitas literasi murid. Koefisien regresi menunjukkan hasil positif dengan angka 0,611: menegaskan bahwa makin tinggi tingkat pemahaman tentang—dan sikap guru terhadap—isu kekerasan seksual, makin baik pula capaian literasi murid. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman dan sikap guru terhadap kekerasan seksual penting untuk diperkuat secara intensif.

Capaian Iklim Kebinekaan



Gambar 5.15 Proporsi Satuan Pendidikan SMP/MTs/Sederajat Berkategori “Baik” pada Indikator Iklim Kebinekaan Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah)

Di tingkat SMP/MTs/Sederajat capaian kategori “Baik” terlihat fluktuatif. Capaian mengalami kenaikan signifikan dari 52,19% (2022) menjadi 75,43% (2023), tetapi kemudian menurun menjadi 58,62% (2024). Tren tersebut mengindikasikan bahwa kualitas iklim kebinekaan masih berada pada fase transisi dan belum sepenuhnya stabil atau berkelanjutan.

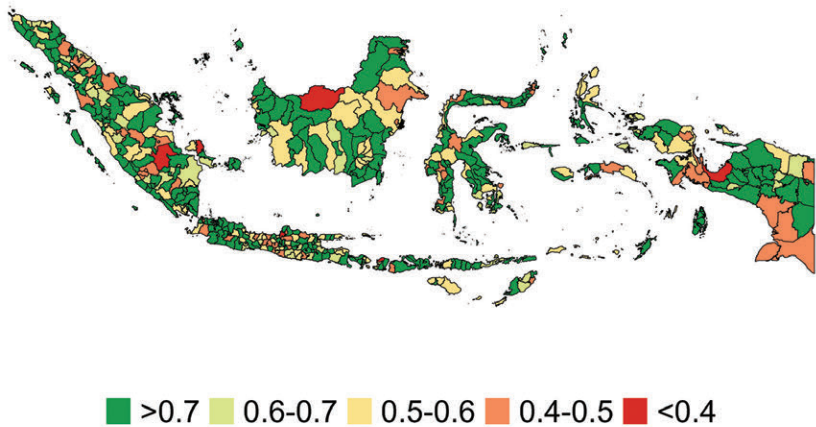


Gambar 5.16 Heatmap Proporsi Satuan Pendidikan SMP/MTs/Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Iklim Kebinekaan Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah)

Gambar 5.16 menunjukkan dinamika perkembangan iklim kebinekaan pada tiga indikator utama selama periode 2022–2024. Secara umum, terlihat bahwa setiap indikator mengalami tren penurunan cukup signifikan.

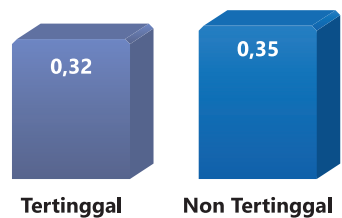
Pola fluktuatif tampak pada indikator Toleransi Agama dan Budaya serta Toleransi dan Kesetaraan Murid. Indikator Toleransi Agama dan Budaya menunjukkan peningkatan tajam dari 15,4% (2022) menjadi 44,1% (2023), tetapi kemudian menurun ke 35,2% (2024). Sementara itu, capaian Indikator Toleransi dan Kesetaraan Murid juga terlihat fluktuatif dengan peningkatan signifikan dari 39,5% (2022) menjadi 70,6% (2023), tetapi kemudian turun menjadi 60,3% (2024). Indikator Komitmen Kebangsaan memperlihatkan kecenderungan penurunan, yakni dari 98,8% (2022) menjadi 97,5% (2023), lalu menjadi 85% (2024). Pola-pola yang terlihat pada indikator-indikator iklim kebinekaan mencerminkan masih adanya tantangan dalam penguatan untuk menciptakan satuan pendidikan yang toleran dan berkebangsaan.

Pemerataan Kualitas Guru



Gambar 5.17 Sebaran Distribusi Guru Tingkat SMP/MTs/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

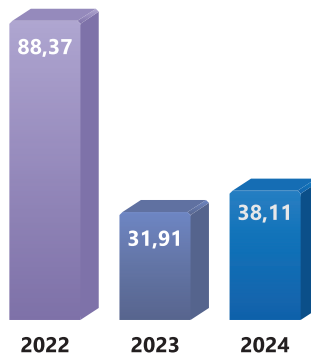
Peta sebaran menunjukkan bahwa distribusi guru di tingkat SMP/MTs/Sederajat sudah cukup merata, tetapi kesenjangan antarwilayah masih terjadi. Hal tersebut terlihat dari dominasi warna hijau di hampir semua wilayah yang menandakan bahwa distribusi guru sudah >70%; angka ini mengindikasikan bahwa pemerataan distribusi guru di tingkat SMP/MTs/Sederajat sudah cukup baik. Meskipun demikian, masih ada wilayah dengan indeks distribusi guru di kabupaten/kotanya yang berada pada kisaran 40%–50% dan <40%—ditunjukkan dengan warna kuning, oranye, dan merah yang tampak dominan di Kalimantan, Maluku, Jawa, dan Papua. Ketimpangan ini bisa jadi disebabkan oleh faktor geografis, yakni lokasi sekolah yang sulit dijangkau, sehingga memengaruhi preferensi guru yang cenderung memilih untuk bertugas di daerah dengan akses dan fasilitas yang lebih baik.



Gambar 5.18 Indeks Distribusi Guru SMP/MTs/Sederajat Berdasarkan Wilayah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

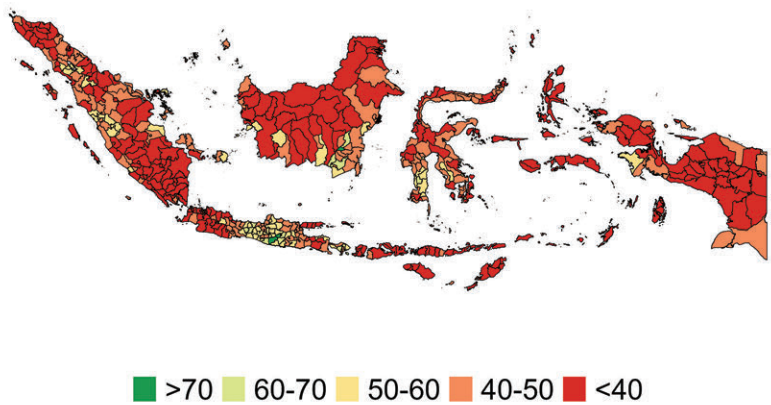
Di sisi lain, terlihat bahwa indeks distribusi guru SMP/MTs/Sederajat di wilayah nontertinggal (0,35) sedikit lebih tinggi daripada wilayah tertinggal (0,32) dengan selisih sebesar 0,03 poin (rentang skor 0–1). Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemerataan guru di wilayah nontertinggal relatif lebih baik meskipun, secara umum, kedua indeks masih berada pada kategori rendah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa distribusi guru masih belum merata, terutama di wilayah tertinggal yang mungkin menghadapi tantangan geografis, keterbatasan akses, serta fasilitas pendidikan yang kurang memadai.

Sertifikasi Guru



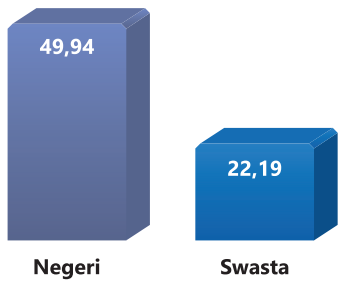
Gambar 5.19 Proporsi Guru Besertifikat di SMP/MTs/Sederajat Tingkat Nasional Tahun 2022-2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)

Meskipun indeks distribusi guru cukup merata, tetapi jumlah sertifikasi guru masih rendah. Hal tersebut terlihat di gambar 5.19 menunjukkan tren proporsi PTK besertifikat di tingkat SMP/MTs/Sederajat dari 2022-2024. Proporsi PTK besertifikat di tingkat SMP/MTs/Sederajat turun drastis dari 88,73% (2022) menjadi 31,91% (2023), kemudian sedikit meningkat menjadi 38,11% (2024). Tren ini mengindikasikan adanya ketidakstabilan dalam pemenuhan sertifikasi guru yang disebabkan jumlah guru yang pensiun, perubahan kebijakan, mekanisme pendataan, atau proses verifikasi sertifikasi.



Gambar 5.20 Sebaran Proporsi Guru Bersertifikat di SMP/MTs/Sederajat Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

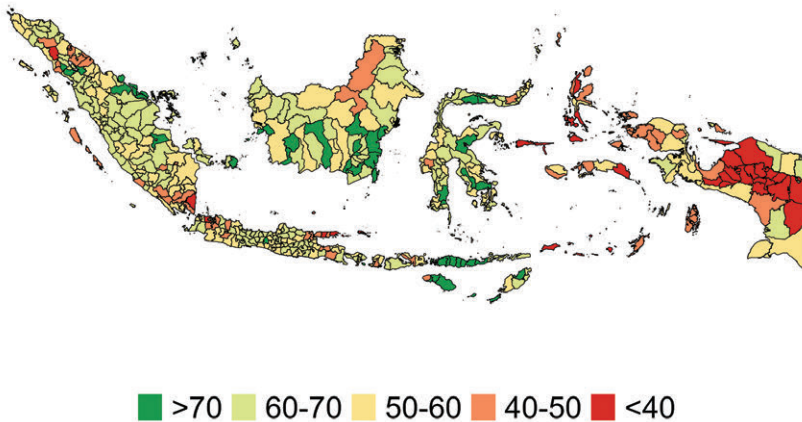
Sementara berdasarkan sebarannya, gambar 5.19 memperlihatkan sebaran guru bersertifikat di tingkat SMP/MTs/Sederajat yang didominasi warna merah dan oranye di hampir semua pulau. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak kabupaten/kota guru bersertifikat di bawah 50%. Wilayah yang menunjukkan proporsi tinggi guru bersertifikat (di atas 50%) terkonsentrasi di Jawa bagian tengah dan Bali, sementara proporsi guru bersertifikat yang masih rendah (di bawah 50%) tersebar di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah timur Indonesia, seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerataan sertifikasi guru masih menjadi tantangan besar, terutama di wilayah nontertinggal.



Gambar 5.21 Proporsi guru Bersertifikat di SMP/MTs/Sederajat Berdasarkan Status Sekolah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

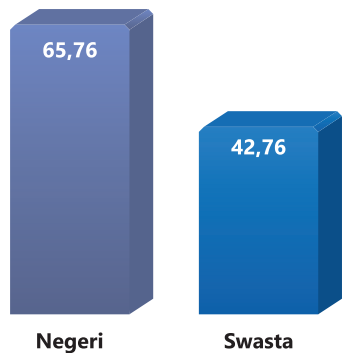
Sementara itu, perbandingan proporsi guru bersertifikat antara sekolah negeri dan swasta memperlihatkan bahwa sekolah negeri memiliki proporsi PTK yang lebih tinggi (49,94) daripada sekolah swasta (22,19). Hal tersebut mengindikasikan bahwa program sertifikasi dan peningkatan kompetensi guru lebih terakses bagi sekolah negeri.

Pelatihan Guru



Gambar 5.22 Sebaran Pengalaman Pelatihan Guru SMP/MTs//Sederajat Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

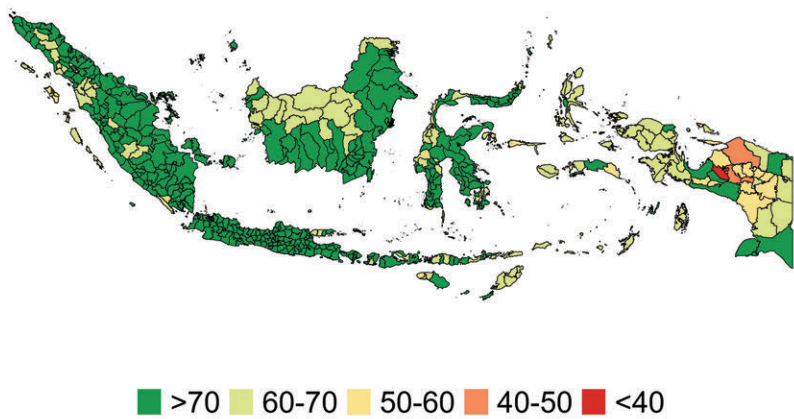
Secara umum, sebaran pengalaman pelatihan guru tingkat SMP/MTs/Sederajat sedang menuju ke kondisi yang lebih baik, dengan sebagian besar kabupaten/kota memiliki persentase cukup tinggi (di atas 50%) meskipun masih ada wilayah dengan persentase rendah (di bawah 40%). Warna hijau dan kuning banyak mendominasi Pulau Jawa, Bali, Sulawesi, Sumatra, dan Kalimantan; hal ini menandakan tingkat pengalaman pelatihan guru yang relatif tinggi. Sementara itu, wilayah timur Indonesia, seperti Papua, Maluku, NTT, dan sebagian Kalimantan Timur serta Sulawesi didominasi warna merah dan oranye—menunjukkan rendahnya pengalaman pelatihan guru di wilayah tersebut.



Gambar 5.23 Pengalaman Pelatihan Guru SMA/MA/Sederajat Berdasarkan Status Sekolah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

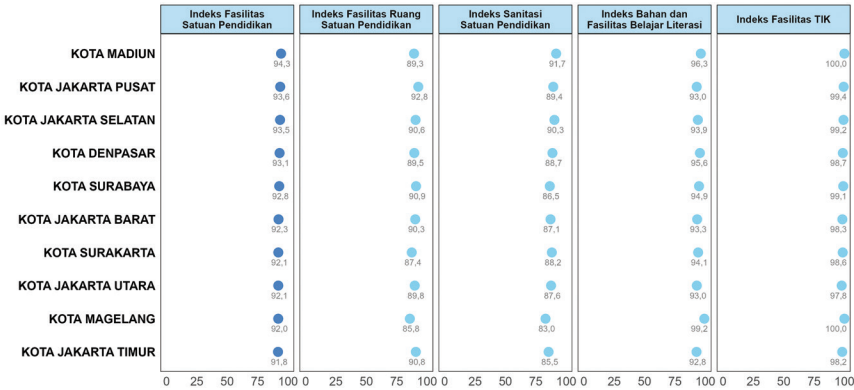
Dari Gambar 5.23, terlihat bahwa guru sekolah negeri tingkat SMP/MTs/Sederajat memiliki proporsi pengalaman pelatihan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan guru sekolah swasta. Sekolah negeri memiliki proporsi 65,76%, sedangkan sekolah swasta 42,76%. Hal ini mengindikasikan bahwa guru sekolah negeri mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk pengembangan profesi melalui kegiatan pelatihan, dibandingkan dengan guru sekolah swasta.

Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan



Gambar 5.24 Sebaran Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan SMP/MTs/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

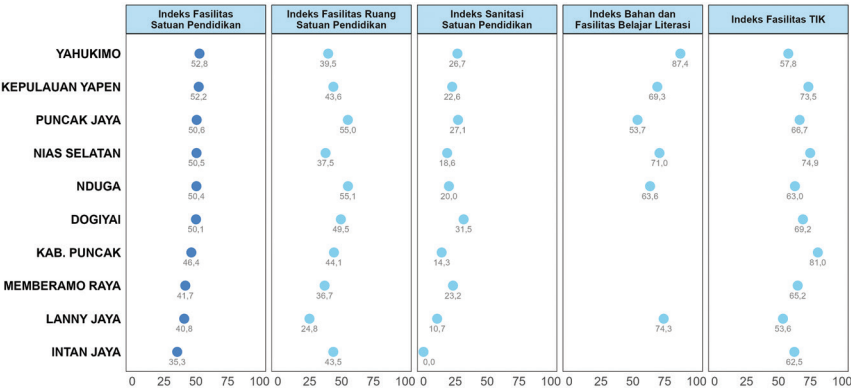
Berdasarkan peta sebaran Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan, fasilitas satuan pendidikan tingkat SMP/MTs/Sederajat sudah terlihat cukup merata. Hal tersebut tecermin dari sebagian besar wilayah yang didominasi warna hijau tua menandakan indeks fasilitas tinggi (>70) yang terkonsentrasi di Sumatra, Jawa, Bali, Sulawesi, sebagian Kalimantan, dan sebagian Nusa Tenggara. Sementara itu, warna hijau muda dan kuning yang menandakan bahwa indeks fasilitas berada di kisaran 70–60 terlihat di Maluku, sebagian Kalimantan, sebagian Nusa Tenggara, dan sebagian Papua. Warna oranye dan merah terlihat di sebagian kecil Papua; hal ini menandakan bahwa di wilayah tersebut, indeks fasilitas satuan pendidikan rendah (<50).



Gambar 5.25 Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan SMP/MTs/Sederajat di 10 Kabupaten/ Kota Tertinggi Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Berdasarkan sepuluh kabupaten/kota teratas, secara umum Gambar 5.25 memperlihatkan indeks fasilitas satuan pendidikan—terdiri atas fasilitas ruang (kelas, perpustakaan, dan laboratorium), sanitasi, bahan dan fasilitas belajar literasi, serta fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK)—tingkat SMP/MTs/Sederajat dengan persentase yang tinggi ($>90\%$). Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas fasilitas pendidikan di kota-kota tersebut sudah relatif baik dan merata. Secara lebih terperinci, persentase tertinggi Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan diraih Madiun (94,3%), diikuti oleh Jakarta Pusat (91,6%) dan Jakarta Selatan (91,0%). Hal ini menunjukkan bahwa Madiun memiliki fasilitas pendidikan yang secara keseluruhan paling

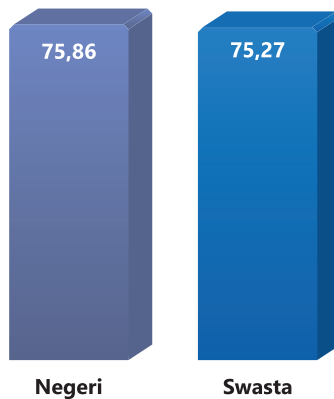
lengkap dan memadai, dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Dominasi kota besar, seperti Jakarta, juga menandakan adanya dukungan anggaran pendidikan dan infrastruktur yang baik di wilayah perkotaan. Sementara itu, Jakarta Selatan (91,6%) dan Jakarta Barat (91,0%) unggul pada fasilitas ruang satuan pendidikan—menandakan bahwa ketersediaan ruang kelas, laboratorium, dan ruang pendukung pembelajaran di dua daerah tersebut sangat memadai. Magelang juga mencatatkan persentase tinggi (89,5%)—menunjukkan adanya pemerataan fasilitas fisik di luar kota metropolitan. Pada indeks sanitasi, Surakarta (91,1%) dan Jakarta Utara (90,5%) memiliki persentase tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa fasilitas sanitasi, seperti toilet, sumber air bersih, dan kebersihan lingkungan sekolah, mendapatkan perhatian dari pemerintah. Persentase tertinggi indeks Bahan dan Fasilitas Belajar Literasi diraih Jakarta Pusat (90,6%) dan Surabaya (89,4%). Artinya, ketersediaan buku, sumber belajar, dan sarana pendukung literasi cukup baik di wilayah tersebut. Indeks fasilitas TIK menunjukkan persentase paling tinggi dan merata di hampir semua kota, dengan Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Surabaya memiliki indeks di atas 98,0%. Hal ini menandakan bahwa kota-kota besar telah memiliki sarana TIK yang sangat baik sehingga mendukung pembelajaran berbasis digital.



Gambar 5.26 Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan SMP/MTs/Sederajat di 10 Kabupaten/ Kota Terendah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Berdasarkan Gambar 5.26, secara umum kabupaten/kota dengan Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan terendah berada di wilayah timur Indonesia,

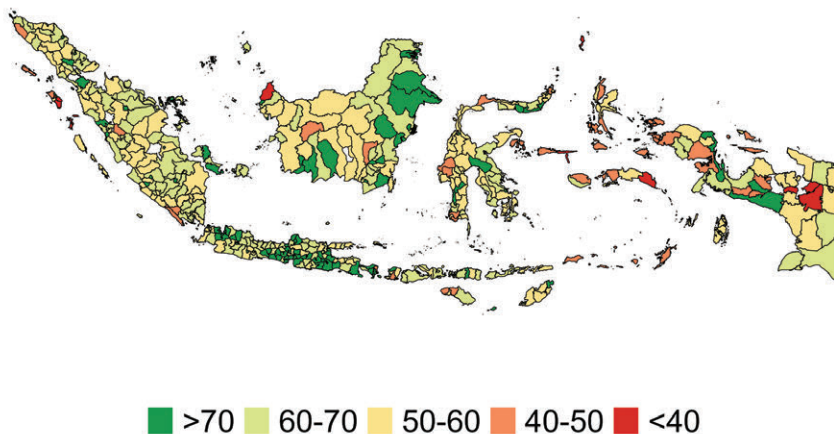
hususnya Papua dan Papua Barat. Secara lebih terperinci, Kabupaten Intan Jaya (35,3%), Kabupaten Lanny Jaya (40,8%), dan Kabupaten Mamberamo Raya (41,7%) tercatat sebagai daerah dengan persentase terendah. Sementara itu, kabupaten/kota lainnya berada di kisaran 46%–52,8% yang masih tergolong rendah. Rendahnya indeks ini sangat dipengaruhi kondisi geografis yang sulit dijangkau. Selanjutnya, pada indikator level 2, capaian rendah dialami hampir semua daerah pada Indeks Fasilitas Ruang Satuan Pendidikan, dengan Kabupaten Lanny Jaya (24,8%) menempati posisi terbawah, sementara capaian tertinggi diraih Kabupaten Nduga (55,1%). Pada aspek Indeks Sanitasi Satuan Pendidikan, Intan Jaya tercatat sebagai kabupaten dengan capaian terendah (0%) dan Dogiyai tercatat sebagai kabupaten dengan capaian tertinggi (31,5%). Sementara itu, pada Indeks Bahan dan Fasilitas Belajar Literasi serta Indeks Fasilitas TIK, hampir semua daerah memiliki capaian relatif tinggi, yakni berkisar 53,7%–87,4% dan 53,6%–81%. Persentase Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan yang masih rendah menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai.



Gambar 5.27 Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan SMP/MTs//Sederajat Berdasarkan Status Sekolah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

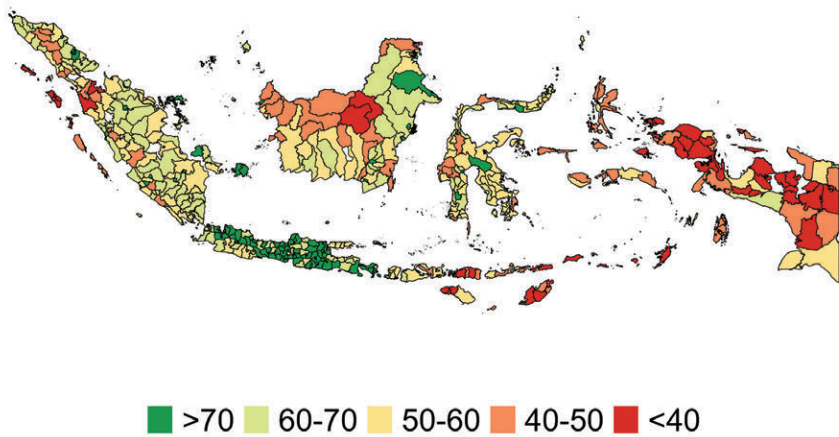
Berdasarkan gambar 5.27, sekolah negeri terlihat mencapai indeks sebesar 75,86%, sedangkan sekolah swasta mencapai 75,27%. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 0,59% yang mengindikasikan bahwa fasilitas di satuan pendidikan negeri sedikit lebih baik daripada satuan pendidikan swasta.

Secara terperinci, indeks fasilitas satuan pendidikan memiliki indikator level 2 yang terdiri atas indeks fasilitas ruang, indeks sanitasi, indeks bahan belajar dan fasilitas literasi, serta indeks fasilitas TIK.



Gambar 5.28 Sebaran Indeks Fasilitas Ruang Satuan Pendidikan SMP/MTs/Sederajat Berdasarkan Data Rapor Pendidikan Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

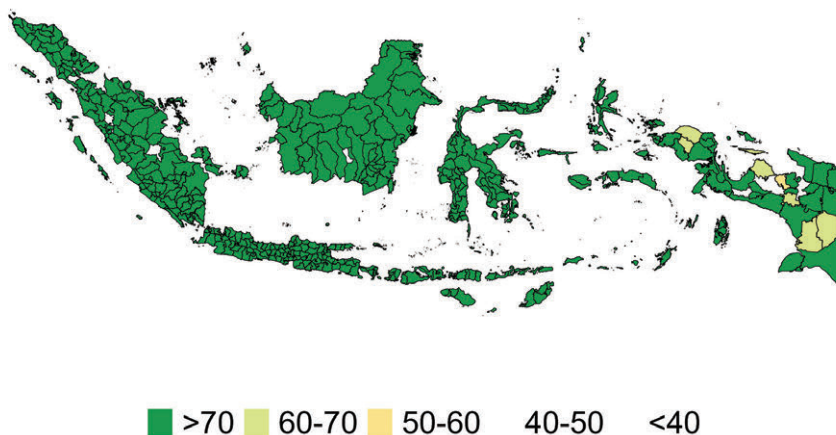
Dari peta sebaran terlihat adanya kesenjangan antarwilayah pada indeks fasilitas ruang satuan pendidikan tingkat SMP/MTs/Sederajat. Warna hijau tua (>70%) tampak terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali; hal ini menandakan bahwa satuan pendidikan di kabupaten/kota wilayah tersebut sudah memiliki fasilitas yang cukup memadai. Daerah dengan indeks 50%–70% yang ditandai dengan warna hijau muda dan kuning tampak menyebar di Pulau Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Sementara itu, daerah dengan indeks rendah yang ditandai dengan warna oranye dan merah (<50%) paling banyak ditemukan di wilayah timur Indonesia, seperti Maluku, Maluku Utara, sebagian Nusa Tenggara, serta sejumlah titik di Papua dan Papua Barat. Secara umum, pola sebaran yang terlihat pada Gambar 5.28 mencerminkan bahwa kesenjangan fasilitas ruang pendidikan masih menjadi isu nasional, dengan kesenjangan paling tajam terjadi antara wilayah barat dan timur Indonesia.



Gambar 5.29 Sebaran Indeks Sanitasi di tingkat SMP/MTs/Sederajat Berdasarkan Data Rapor Pendidikan Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

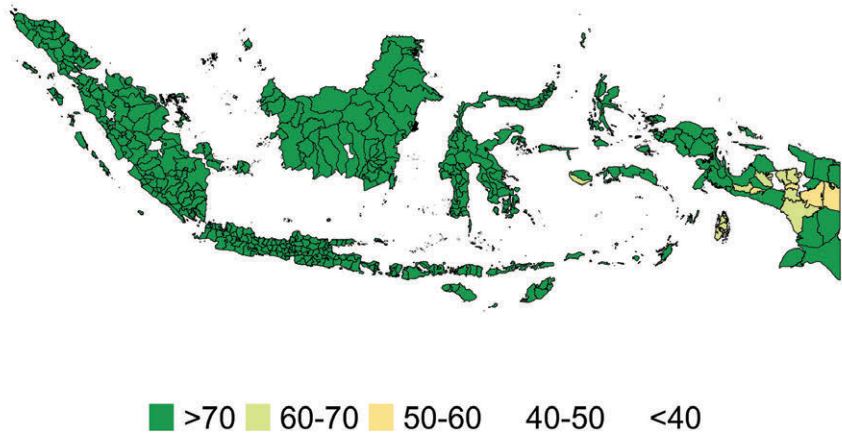
Sementara itu, pada indeks sanitasi satuan pendidikan tingkat SMP/MTs/Sederajat, tampak disparitas yang cukup mencolok antarwilayah. Wilayah Jawa dan Bali terlihat didominasi warna hijau tua. Hal tersebut mencerminkan indeks sanitasi tinggi dengan capaian >70%, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Warna hijau muda (60%–70%) tampak mendominasi sebagian besar Sumatra dan sebagian Kalimantan. Adapun wilayah dengan indeks sanitasi moderat, tampilannya ditandai dengan warna kuning dan oranye (50%–60%)—lebih dominan di sebagian Kalimantan dan Sulawesi. Daerah dengan indeks sanitasi rendah terlihat berada di wilayah timur Indonesia, seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan beberapa wilayah di Nusa Tenggara. Pola sebaran ini makin menegaskan bahwa masih ada kesenjangan besar antarwilayah; daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau atau memiliki keterbatasan sumber daya masih menghadapi tantangan besar.

Di sisi lain, dari Gambar 5.30 dan Gambar 5.31, terlihat bahwa indeks bahan dan fasilitas belajar literasi serta indeks fasilitas TIK tingkat SMP/MTs/Sederajat menunjukkan pola sebaran yang positif.



Gambar 5.30 Sebaran Indeks Bahan dan Fasilitas Belajar Literasi Tingkat SMP/MTs/ Sederajat Berdasarkan Data Rapor Pendidikan Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Peta sebaran Indeks Bahan dan Fasilitas Belajar Literasi memperlihatkan kondisi yang relatif lebih merata jika dibandingkan dengan indeks fasilitas satuan pendidikan lainnya. Warna hijau (>70%) tampak mendominasi seluruh wilayah Indonesia; hal ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota di wilayah tersebut memiliki bahan dan fasilitas belajar literasi yang memadai. Sementara itu, warna hijau muda (60%–70%) terlihat di sebagian kecil Papua; hal ini mengindikasikan bahwa capaian indeks tersebut masih berada di kategori “Baik”.



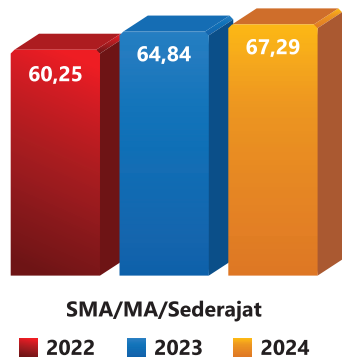
Gambar 5.31 Sebaran Indeks Fasilitas TIK Satuan Pendidikan SMP/MTs/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Pola sebaran positif juga tampak pada indeks fasilitas TIK. Hal tersebut terlihat dari warna hijau tua (>70%) yang tersebar di sebagian besar wilayah Indonesia, khususnya Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Maluku—mengindikasikan bahwa wilayah-wilayah tersebut telah memiliki fasilitas TIK yang memadai. Adapun sebaran di Papua, meskipun warna hijau tua juga terlihat mendominasi, masih tampak warna hijau muda dan kuning (50%–70%) yang menandakan bahwa, di wilayah tersebut, masih ada kabupaten/kota yang memerlukan dukungan untuk pemenuhan fasilitas TIK.

Selain pada jenjang SD dan SMP, pada jenjang SMA akan dilakukan analisis serupa sebagaimana diuraikan pada bagian ini. Mutu pendidikan SMA akan dibahas pada level nasional dan provinsi. Meskipun wilayah kewenangan SMA berada di level provinsi, tetapi pada analisis sebaran dan kesenjangan dilakukan analisis pada level kabupaten/kota guna mendapat data yang lebih relevan dan presisi. Dengan demikian, kebijakan pengembangan SMA oleh pemerintah provinsi dapat dibuat selaras dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan di setiap wilayah kabupaten/kota.

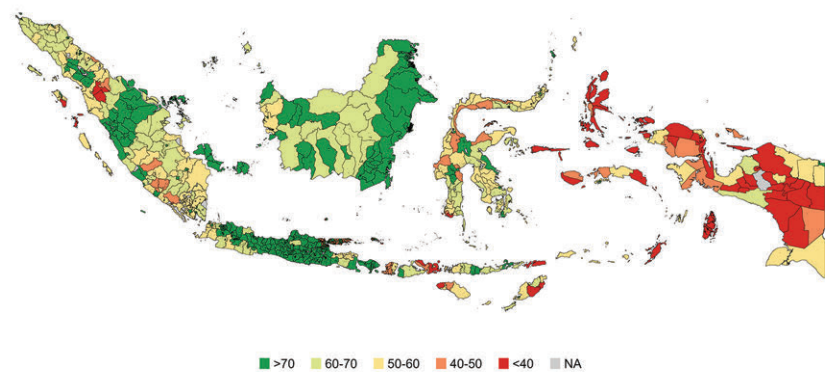
Capaian Literasi

Kemampuan literasi merupakan salah satu kemampuan fundasional yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Kemampuan literasi merupakan salah satu aspek yang diukur dalam asesmen kompetensi minimum (AKM) untuk melihat kemampuan murid dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai bagian dari masyarakat. Gambar 6.1 menampilkan capaian proporsi murid SMA/MA/ sederajat yang mencapai kompetensi minimum literasi berdasarkan data Rapor Pendidikan 2022–2024. Capaian satuan pendidikan dikatakan “Baik” untuk indikator literasi apabila terdapat lebih dari 70% murid yang mencapai kompetensi minimum literasi.



Gambar 6.1 Tren Proporsi Murid SMA/MA/Sederajat yang Mencapai Kompetensi Minimum Literasi Tahun 2022-2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)

Di tingkat SMA/MA/Sederajat, proporsi murid yang mencapai kompetensi minimum literasi mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir, yaitu meningkat dari 60,25% pada 2022 menjadi 64,84% pada 2023, dan meningkat lagi menjadi 67,29% pada 2024. Peningkatan ini menandakan bahwa upaya perbaikan kualitas pendidikan menunjukkan progres yang positif dan dapat menjadi dasar untuk pengembangan strategi perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan.

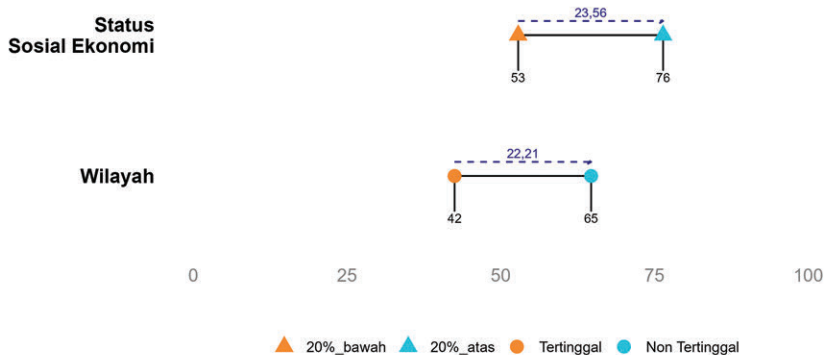


Gambar 6.2 Sebaran Persentase Murid SMA/MA/Sederajat yang Mencapai Kompetensi Minimum Literasi Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Jika dicermati lebih lanjut, peningkatan capaian literasi tingkat SMA/MA/Sederajat masih belum merata. Hal ini terlihat dari proporsi murid yang

mencapai kompetensi minimum literasi yang beragam antarwilayah dan antardaerah dalam satu pulau. Variasi capaian ini dipengaruhi berbagai faktor, seperti kondisi geografis dan karakteristik wilayah. Berdasarkan peta pada Gambar 6.2, wilayah Jawa dan Bali menunjukkan capaian tertinggi—ditandai dengan dominasi warna hijau tua (>70%), misalnya di Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta Bali, dan hijau muda (60%–70%), misalnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian kabupaten/kota di Provinsi Banten. Meskipun sebagian provinsi di Sumatra umumnya berada di kategori capaian menengah hingga tinggi (60%–70%), masih terdapat variasi antarprovinsi. Sebagian besar kabupaten/kota di Sumatra Barat dan Riau menunjukkan capaian relatif tinggi, sementara beberapa kabupaten/kota di Lampung dan Bengkulu tampak berada di kategori yang lebih rendah.

Kalimantan secara umum menunjukkan capaian cukup baik, tetapi variasi antarprovinsi dan antardaerah dalam provinsi cukup terlihat. Daerah pedalaman atau perbatasan, seperti Kapuas Hulu dan Nunukan, kerap menghadapi hambatan geografis yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Sebaran literasi di Sulawesi sangat beragam—ditandai dengan warna hijau muda, kuning, dan oranye. Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan cenderung lebih baik capaiannya daripada Sulawesi Tenggara ataupun Gorontalo. Wilayah pesisir menunjukkan capaian yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah pedalaman ataupun kepulauan terpencil; hal ini menandakan adanya tantangan yang bukan hanya antarprovinsi, tetapi juga antarkabupaten/kota dalam satu provinsi. Wilayah Maluku, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan sebagian besar berada di kategori <50%, bahkan <40%; hal ini menandakan adanya tantangan pembelajaran yang lebih kompleks di wilayah tersebut. Analisis dalam gambar ini menunjukkan bahwa ketimpangan capaian literasi tidak hanya terjadi antarpulau, tetapi juga antarprovinsi dan antarkabupaten/kota.



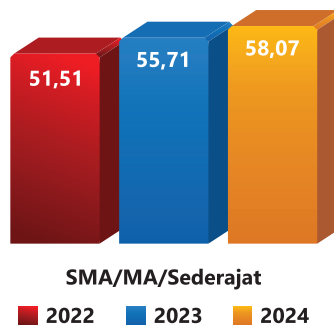
Gambar 6.3 Kesenjangan Skor Literasi SMA/MA/Sederajat Berdasarkan Status Sosial Ekonomi dan Wilayah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Gambar 6.3 menunjukkan kesenjangan capaian literasi pada satuan pendidikan SMA/MA/Sederajat berdasarkan kelompok status sosial ekonomi (SSE) 20% bawah dan satuan pendidikan pada kelompok SSE 20% atas, serta wilayah tertinggal dan nontertinggal dari data Rapor Pendidikan 2024. Jika dilihat berdasarkan SSE, perbedaan rata-rata capaian literasi antara satuan pendidikan di kelompok SSE 20% bawah (52,8) dan satuan pendidikan di kelompok SSE 20% atas (76,4) adalah 23,56 poin. Tingginya disparitas di antara keduanya menunjukkan bahwa murid-murid di satuan pendidikan kelompok SSE 20% bawah berpotensi lebih rentan menghadapi tantangan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan menghadapi tuntutan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan kelompok wilayah, satuan pendidikan di wilayah tertinggal mencatatkan rata-rata skor 64,7, sementara satuan pendidikan di wilayah nontertinggal mencatatkan rata-rata skor 42,5 sehingga selisih antara keduanya adalah 22,21 poin. Selisih tersebut menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan dalam hal kualitas pembelajaran literasi tingkat SMA/MA/Sederajat. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor, seperti keterbatasan dan tantangan dalam hal akses, kualitas pembelajaran, fasilitas belajar, serta kapasitas guru pada satuan-satuan pendidikan di wilayah tertinggal.

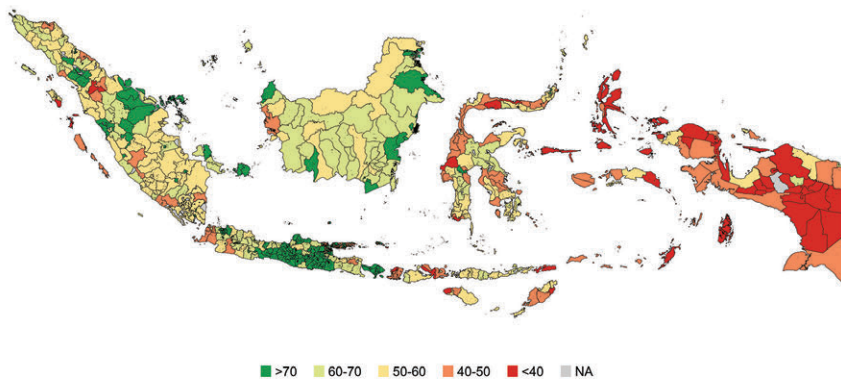
Capaian Numerasi

Selain kemampuan literasi, kemampuan numerasi merupakan salah satu aspek yang sangat krusial, yaitu bagaimana seseorang dapat menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai konteks yang relevan bagi individu. Gambar 6.4 menunjukkan proporsi murid SMA/MA/Sederajat yang mencapai kompetensi minimum numerasi berdasarkan data Rapor Pendidikan 2022–2024. Capaian satuan pendidikan dikatakan “Baik” untuk indikator numerasi apabila terdapat lebih dari 70% murid yang mencapai kompetensi minimum.



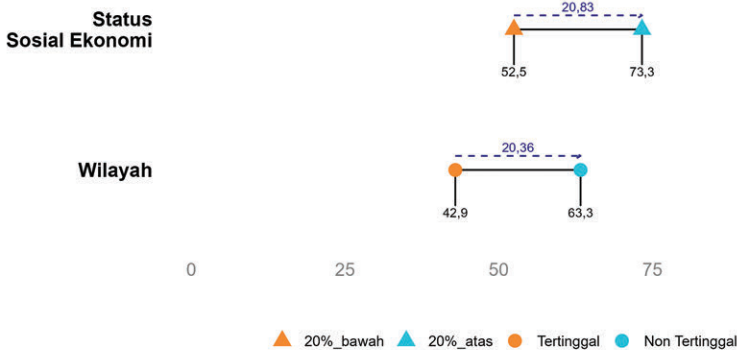
Gambar 6.4 Tren Proporsi Murid SMA/MA/Sederajat yang Mencapai Kompetensi Numerasi Tahun 2022-2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)

Di tingkat SMA/MA/Sederajat, proporsi murid yang mencapai kompetensi minimum numerasi menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu 51,51% pada 2022, kemudian naik menjadi 55,71% pada 2023, dan naik lagi menjadi 58,07% pada 2024. Meski perlahan, tren kenaikan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pembelajaran numerasi. Kendati demikian, diperlukan intervensi dan upaya berkelanjutan agar semua murid tingkat SMA/MA/Sederajat menguasai kompetensi numerasi secara optimal dan merata.



Gambar 6.5 Sebaran Persentase Murid SMA/MA/Sederajat yang Mencapai Kompetensi Minimum Numerasi Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Sebaran capaian kompetensi numerasi tingkat SMA/MA/Sederajat menunjukkan ketimpangan yang lebih tinggi daripada capaian literasi (lihat Gambar 6.5). Wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Bali memiliki capaian yang relatif lebih tinggi—ditandai dengan warna hijau tua dan hijau muda, dengan banyak provinsi mencapai kisaran 60%–70%, bahkan sebagian di atas 70%, terutama di daerah perkotaan. Meski demikian, variasi capaian tetap tampak di beberapa kabupaten/kota di dalam satu provinsi, seperti di Sumatra Selatan dan Jawa Timur; hal ini menunjukkan kesenjangan antarkabupaten/kota. Di wilayah Sulawesi, heterogenitas capaian terlihat cukup jelas. Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan menunjukkan capaian yang lebih tinggi, sementara capaian di wilayah-wilayah pedalaman dan kepulauan di Sulawesi Tenggara dan Gorontalo masih sekitar 50%–60%. Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menampilkan capaian numerasi pada kategori rendah hingga menengah, dengan perbedaan mencolok antara kota-kota besar dan kabupaten. Ketimpangan terlihat makin nyata di wilayah timur Indonesia. Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan didominasi warna merah dan oranye—menandakan bahwa terdapat banyak kabupaten dengan capaian berkisar 40%–50%, bahkan di bawah 40%. Capaian ini mencerminkan besarnya tantangan struktural dan sistemik di wilayah-wilayah tersebut yang kemudian berdampak pada praktik pembelajaran.



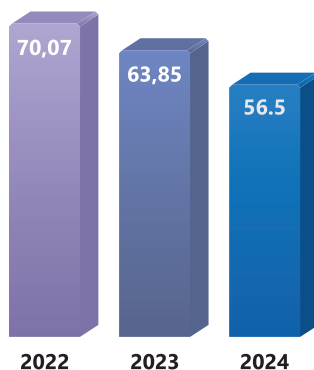
Gambar 6.6 Kesenjangan Skor Numerasi SMA/MA/Sederajat Berdasarkan Status Sosial Ekonomi dan Wilayah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Gambar 6.6 menyajikan data perbandingan rata-rata skor numerasi murid di satuan pendidikan pada kelompok SSE 20% bawah dan satuan pendidikan kelompok SSE 20% atas serta di wilayah tertinggal dan nontertinggal serta berdasarkan Rapor Pendidikan 2024. Berdasarkan kelompok SSE, selisih capaian rata-rata numerasi antara satuan pendidikan pada kelompok SSE 20% bawah (52,5) dan kelompok SSE 20% atas (73,3) adalah 20,83 poin. Kesenjangan ini menegaskan pentingnya strategi afirmasi dan penajaman kebijakan pendidikan agar lebih merata untuk semua satuan pendidikan dengan berbagai kondisi dan latar belakang.

Berdasarkan kelompok wilayah, satuan pendidikan di wilayah tertinggal memiliki capaian rata-rata numerasi sebesar 42,9, sedangkan satuan pendidikan di wilayah nontertinggal memiliki rata-rata capaian 63,3. Terdapat disparitas cukup besar di antara keduanya yang ditunjukkan dengan selisih capaian sebesar 20,36 poin. Disparitas ini menandakan bahwa murid-murid di wilayah tertinggal berpotensi tertinggal dalam penguasaan numerasi yang dapat berdampak pada bagaimana mereka memahami dan memecahkan masalah matematis dalam kehidupan sehari-hari serta di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

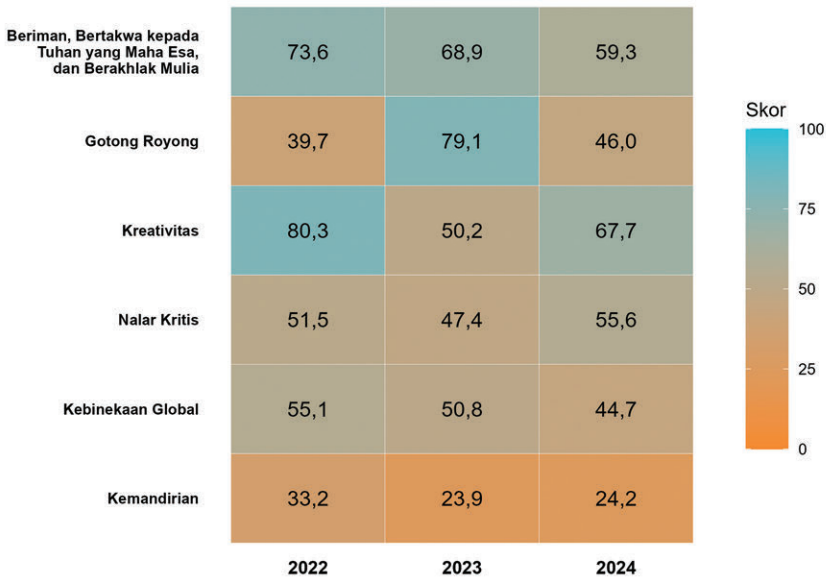
Capaian Karakter

Capaian karakter dalam Rapor Pendidikan menyajikan data holistik mengenai aspek nonkognitif murid yang meliputi pengetahuan, aspek afektif, keterampilan, dan perwujudan dalam perilaku. Gambar 6.7 menunjukkan proporsi satuan pendidikan SMA/MA/Sederajat dengan capaian “Baik” pada indikator Karakter tahun 2022–2024.



Gambar 6.7 Proporsi Satuan Pendidikan SMA/MA/Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Indikator Karakter Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah)

Proporsi satuan pendidikan dengan capaian karakter “Baik” mengalami penurunan dari 70,07% (2022) menjadi 56,5% (2024). Tren penurunan ini mengindikasikan bahwa upaya pembinaan atau penguatan karakter di tingkat menengah atas belum cukup optimal untuk mempertahankan kualitas awal sehingga perlu direspons melalui evaluasi mendalam. Penguatan karakter tingkat pendidikan menengah atas ini sangat perlu dalam mempersiapkan murid untuk menghadapi tantangan sosial, budaya, dan konteks masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Secara lebih terperinci, terdapat enam karakter utama yang menjadi subindikator pembentuk Karakter sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 6.8.

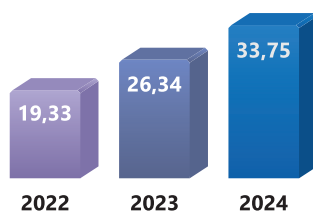


Gambar 6.8 Heatmap Proporsi Satuan Pendidikan SMA/MA/Sederajat Kategori “Baik” pada indikator Karakter Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah)

Terdapat tren penurunan capaian kategori “Baik” pada karakter Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia, yakni dari 73,6% (2022) menjadi 59,3% (2024). Karakter Gotong Royong sempat melonjak dari 39,7% (2022) menjadi 79,1% (2023), tetapi kemudian turun menjadi 46% pada 2024. Untuk Kreativitas, terdapat penurunan tajam dari 80,3% (2022) ke 50,2% (2023), tetapi naik kembali menjadi 67,7% pada 2024. Karakter Nalar Kritis menunjukkan capaian yang relatif stagnan, yakni dari 51,5% (2022) ke 55,6% (2024). Untuk karakter Kebinekaan Global, terjadi tren penurunan dari 55,1% (2022) ke 44,7% (2024). Sementara itu, karakter Kemandirian menjadi aspek dengan capaian terendah, yaitu dari 33,2% (2022), turun ke 23,9% (2023), kemudian sedikit naik menjadi 24,2% (2024). Proporsi satuan pendidikan yang mencapai kategori “Baik” pada subindikator pembentuk Karakter menunjukkan bahwa capaian karakter di satuan pendidikan masih dinamis, dengan tantangan terbesar pada karakter Kemandirian dan Kebinekaan Global. Penurunan pada beberapa aspek karakter SMA/MA/Sederajat menegaskan pentingnya evaluasi terhadap implementasi pendidikan karakter murid.

Capaian Kualitas Pembelajaran

Proses pembelajaran yang berkualitas di dalam kelas merupakan faktor kuat yang dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal. Dalam Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar), pembelajaran yang berkualitas ditandai dengan terciptanya suasana kelas yang kondusif, dukungan afektif, dan aktivasi kognitif dari guru yang konstruktif. Gambar 6.9 menunjukkan proporsi satuan pendidikan yang memiliki capaian “Baik” pada indikator kualitas pembelajaran pada Rapor Pendidikan 2022–2024.

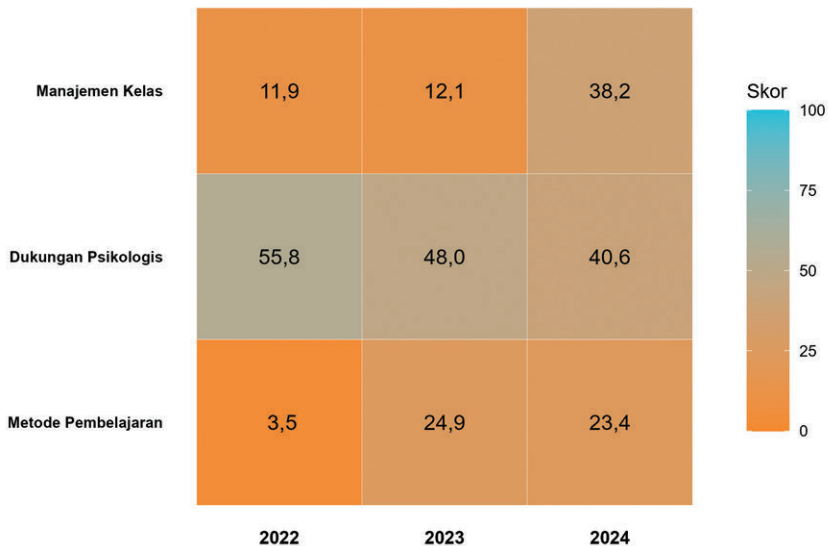


Gambar 6.9 Proporsi Satuan Pendidikan SMA/MA/Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Indikator Kualitas Pembelajaran Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah)

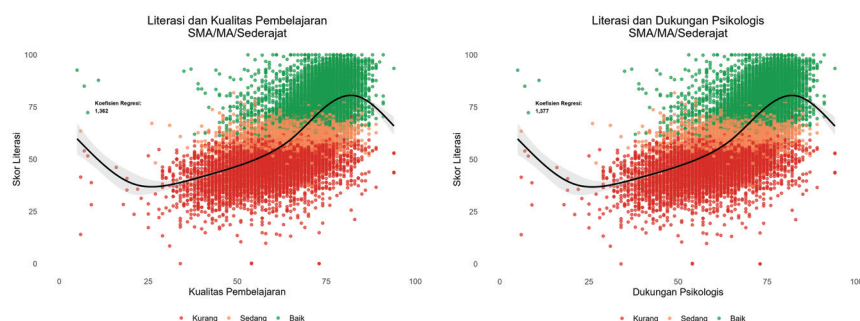
Meski proporsi satuan pendidikan SMA/MA/Sederajat dengan kategori “Baik” masih tergolong rendah secara nasional, terjadi peningkatan konsisten selama tiga tahun terakhir. Pada 2022, baru terdapat 19,33% satuan pendidikan dengan kategori “Baik”. Kemudian, angka ini meningkat menjadi 26,34% pada 2023, dan meningkat lagi menjadi 33,75% pada 2024. Kenaikan berkala ini menjadi sinyal positif dan mengindikasikan bahwa perubahan praktik pembelajaran membutuhkan waktu dan pendampingan yang lebih intensif.

Dalam Sulingjar, kualitas pembelajaran dipotret melalui tiga aspek utama, yaitu Manajemen Kelas, Dukungan Psikologis, dan Metode Pembelajaran. Untuk aspek Manajemen Kelas, proporsi capaian “Baik” mengalami kenaikan konsisten dari 11,9% (2022) ke 12,1% (2023), lalu naik lagi menjadi 38,2% (2024). Kenaikan ini perlu dipertahankan agar guru makin mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang teratur dan kondusif. Untuk aspek Dukungan Psikologis, capaiannya terus menurun selama tiga tahun terakhir, yakni dari 55,8% (2022) ke 48% (2023), kemudian turun lagi menjadi

40,6% (2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa baru sebagian kecil satuan pendidikan SMA/MA/Sederajat mampu menerapkan praktik pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid. Temuan menarik terlihat pada aspek Metode Pembelajaran: pada 2022, hanya sedikit satuan pendidikan dengan capaian “Baik”, yaitu 3,5%. Pada 2023, terjadi peningkatan cukup signifikan menjadi 24,9%, tetapi kemudian turun sedikit pada 2024 menjadi 23,4%. Meski masih fluktuatif, capaian ini menjadi sinyal positif bahwa ada makin banyak satuan pendidikan yang mampu menerapkan metode pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan kemampuan murid untuk mendapatkan pemahaman dan pengetahuan baru.



Gambar 6.10 Heatmap Proporsi Satuan Pendidikan SMA/MA/Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Indikator Kualitas Pembelajaran Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)

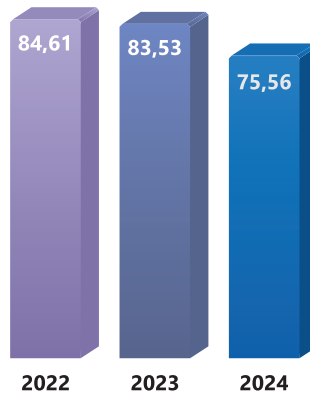


Gambar 6.11 Analisis Regresi Persebaran Data Hubungan Indikator Kualitas Pembelajaran dan Subindikator Dukungan Psikologis terhadap Literasi SMA/MA/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Lebih lanjut, dilakukan analisis regresi untuk melihat bagaimana kondisi kualitas pembelajaran menjadi aspek yang turut berkontribusi dalam meningkatkan capaian hasil belajar murid. Dari Gambar 6.11, terlihat bahwa kualitas pembelajaran yang meningkat akan membuat capaian hasil belajar literasi juga meningkat, terutama pada satuan pendidikan dengan capaian literasi kategori “Baik” dan “Sedang”. Hal yang sama juga terjadi pada subindikator Dukungan Psikologis (indikator level 2) yang memiliki hubungan positif dengan capaian literasi murid. Dukungan Psikologis pada rentang 60–80 memiliki pengaruh signifikan terhadap capaian literasi dengan kategori “Sedang” dan “Baik” sebesar 1,377. Sementara itu, untuk satuan pendidikan dengan capaian literasi “kurang”, aspek Dukungan Psikologis kurang berpengaruh.

Capaian Iklim Keamanan

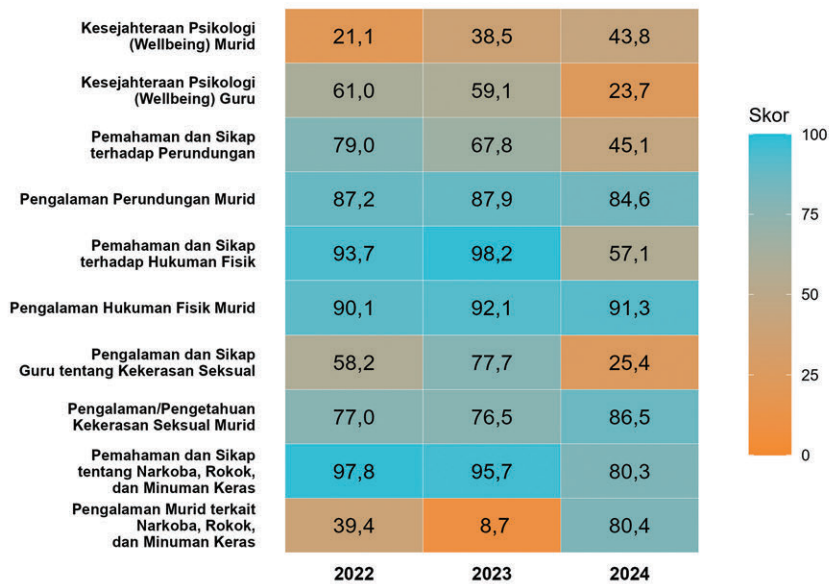
Iklim keamanan satuan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung terciptanya situasi belajar yang optimal. Dalam Rapor Pendidikan, pengukuran iklim keamanan tidak hanya dilihat dari aspek keamanan fisik, tetapi juga aspek keamanan sosial-emosional warga satuan pendidikan. Gambar 6.12 menampilkan proporsi satuan pendidikan dengan capaian “Baik” pada indikator Iklim Keamanan berdasarkan data Rapor Pendidikan 2022–2024.



Gambar 6.12 Proporsi Satuan Pendidikan SMA/MA/Sederajat dengan Kategori "Baik" pada Indikator Iklim Keamanan Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah)

Pada 2022, sebanyak 84,61% satuan pendidikan memiliki capaian Iklim Keamanan "Baik". Angka ini sedikit menurun menjadi 83,53% pada 2023, kemudian menurun cukup signifikan pada 2024 menjadi 75,56%. Menurunnya capaian ini mengindikasikan bahwa sebagian satuan pendidikan belum mampu mempertahankan kualitas capaian keamanannya secara konsisten.

Terdapat sepuluh subindikator pembentuk Iklim Keamanan yang diukur secara komprehensif—mencakup persepsi dan pengalaman guru dan murid yang meliputi Kesejahteraan Psikologis; Pemahaman, Sikap, dan Pengalaman Murid Terkait Perundungan; Persepsi, Sikap, dan Pengalaman Murid Terkait Hukuman Fisik; Pengalaman, Sikap, Pengalaman/Pengetahuan Murid Terkait Kekerasan Seksual; serta Pemahaman, Sikap, dan Pengalaman Murid Terkait Rokok, Narkoba, dan Minuman Keras.

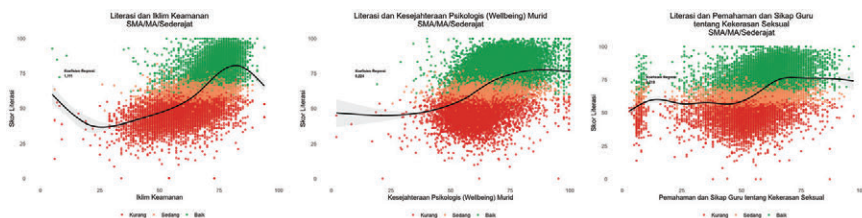


Gambar 6.13 Heatmap Proporsi Sekolah SMA/MA/Sederajat yang dengan Kategori “Baik” pada Indikator Iklim Keamanan Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)

Berdasarkan data Rapor Pendidikan, pada aspek Kesejahteraan Psikologis Murid, terjadi kenaikan cukup signifikan dari 21,2% (2022) ke 43,8% (2024). Sebaliknya, untuk aspek Kesejahteraan Psikologis Guru, terjadi penurunan dari 61% (2022) ke 23,7% (2024). Capaian Pemahaman dan Sikap Murid terhadap Perundungan juga mengalami penurunan, yaitu dari 79% (2022) ke 35,9% (2023), lalu menjadi 45,1% (2024). Pengalaman Perundungan Murid tergolong cukup baik pada tiga tahun terakhir, yaitu dari 87,2% (2022) ke 87,9% (2023), lalu turun sedikit menjadi 84,6% (2024). Capaian aspek Pemahaman dan Sikap Murid terkait Hukuman Fisik sangat tinggi pada 2022 (93,7%) dan 2023 (98,2%), tetapi menurun tajam pada 2024 (57,1%). Pengalaman Hukuman Fisik Murid cenderung stabil dan tinggi, yaitu dari 90,1% (2022) ke 92,1% (2023), lalu menjadi 91,3% (2024); hal ini menandakan bahwa praktik hukuman fisik makin jarang terjadi. Untuk Pemahaman dan Sikap Guru tentang Kekerasan Seksual, capaiannya sangat fluktuatif, yaitu dari 58,2% (2022) ke 77,7% (2023), lalu turun drastis ke 25,4% (2024). Pengalaman/Pengetahuan Murid Terkait Kekerasan Seksual relatif konsisten tinggi pada tiga tahun terakhir, yaitu dari

77% (2022) ke 76,5% (2023), kemudian meningkat menjadi 86,5% (2024). Aspek Pemahaman dan Sikap Murid tentang Rokok, Narkoba, dan Minuman Keras mengalami penurunan dari 97,8% (2022) menjadi 80,3% (2024). Temuan menarik terlihat pada Pengalaman Murid terkait Rokok, Narkoba, dan Minuman Keras: capaian awal sebesar 39,4% (2022) turun drastis menjadi 8,7% (2023), lalu naik tajam menjadi 80,4% (2024).

Penurunan pada beberapa capaian, seperti Kesejahteraan Guru serta Pemahaman Guru tentang Perundungan dan Kekerasan Seksual, menunjukkan bahwa sebagian satuan pendidikan belum mampu mempertahankan kualitas capaian pada semua aspek keamanan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pemahaman murid terkait perundungan dan hukuman fisik juga masih mengalami fluktuasi sehingga diperlukan pendekatan lebih konsisten untuk menjaga kualitas capaian. Meskipun demikian, pengalaman murid dalam sebagian isu-isu keamanan sudah relatif menunjukkan tren positif dan mengindikasikan bahwa intervensi di tingkat satuan pendidikan sudah mulai efektif dan perlu terus ditingkatkan.



Gambar 6.14 Analisis Regresi Persebaran Data Hubungan Indikator Iklim Keamanan dan Subindikator Pemahaman dan Sikap Guru tentang Kekerasan Seksual & Kesejahteraan Psikologis (*Wellbeing*) Murid terhadap Literasi SMA/MA/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

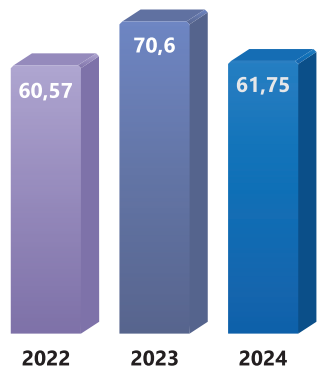
Dalam Sulingjar, Iklim Keamanan dinilai sebagai salah satu aspek yang berpengaruh terhadap terciptanya suasana yang mendukung pencapaian hasil belajar yang optimal. Analisis regresi pada Gambar 6.14 memberikan gambaran mengenai keterkaitan Iklim Keamanan lingkungan belajar dengan capaian literasi murid. Terlihat bahwa Iklim Keamanan berpengaruh signifikan terhadap capaian literasi murid, khususnya di satuan pendidikan dengan capaian 80–100. Selain itu, indikator level 2, Pemahaman dan Sikap Guru tentang Kekerasan Seksual, berpengaruh sebesar 0,219 terhadap capaian

literasi dan Kesejahteraan Psikologis Murid juga berpengaruh sebesar 0,224 poin. Temuan ini menegaskan bahwa hasil belajar yang optimal tidak semata-mata bergantung pada proses pembelajaran di kelas, melainkan juga bergantung pada iklim belajar yang memastikan bahwa semua warga sekolah merasa aman dan bebas dari kekerasan.

Capaian Iklim Kebinekaan

Lingkungan satuan pendidikan yang memelihara kebinekaan ditandai dengan adanya penghargaan dan penerimaan terhadap keberagaman latar belakang individu, identitas, dan latar belakang sosial budaya. Iklim Kebinekaan dalam Sulingjar diukur melalui bagaimana guru dan murid merasa diterima di lingkungan satuan pendidikan, tersedianya iklim pembelajaran yang terbuka, serta keyakinan dan penerimaan terhadap keberagaman agama dan budaya.

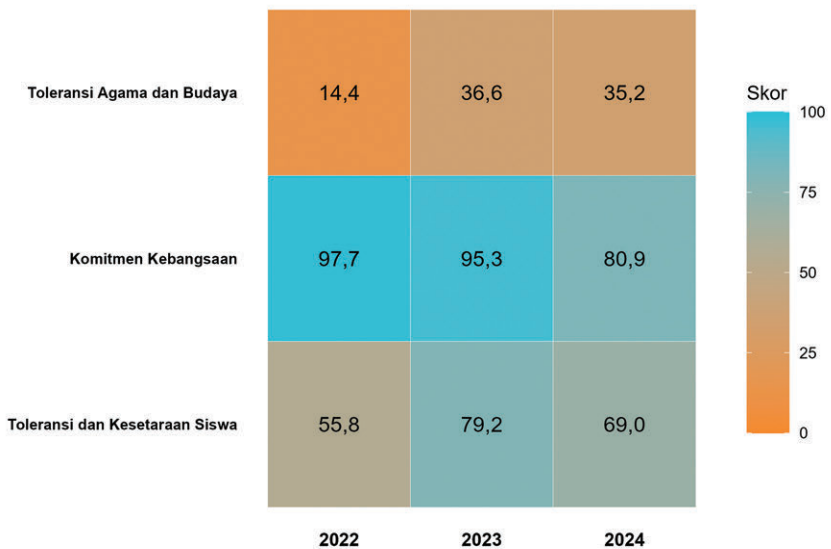
Gambar 6.15 menunjukkan proporsi satuan pendidikan yang berkategori “Baik” untuk indikator Iklim Kebinekaan tahun 2022–2024 di Rapor Pendidikan. Satuan pendidikan dengan kategori “Baik” menandakan bahwa ia mampu menciptakan suasana belajar yang menjunjung toleransi agama/kepercayaan dan budaya; murid mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; warga satuan pendidikan menunjukkan nasionalisme yang kuat; serta adanya dukungan dari warga satuan pendidikan terhadap kesetaraan agama/kepercayaan dan budaya.



Gambar 6.15 Proporsi Satuan Pendidikan SMA/MA/Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Indikator Iklim Kebinekaan Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)

Di tingkat SMA/MA/Sederajat, capaian kategori “Baik” pada Iklim Kebinekaan mengalami kenaikan pada 2023, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 60,57% ke 70,6%. Akan tetapi, persentase satuan pendidikan yang mencapai kategori “Baik” pada 2024 menurun menjadi 61,75%. Penurunan ini mengisyaratkan perlunya pengembangan program terkait kebinekaan yang lebih kontekstual dan relevan dengan isu-isu remaja untuk menumbuhkan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman agama dan budaya.

Secara lebih terperinci, Iklim Kebinekaan diukur melalui tiga aspek utama, yaitu toleransi agama dan budaya, dukungan terhadap kesetaraan agama dan budaya, serta komitmen kebangsaan. Gambar 6.16 menggambarkan capaian satuan pendidikan SMA/MA/Sederajat dengan kategori “Baik” pada subindikator Iklim Kebinekaan berdasarkan data Rapor Pendidikan 2022–2024.



Gambar 6.16 *Heatmap* Proporsi Satuan Pendidikan SMA/MA/Sederajat dengan Kategori “Baik” pada Iklim Kebinekaan Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah)

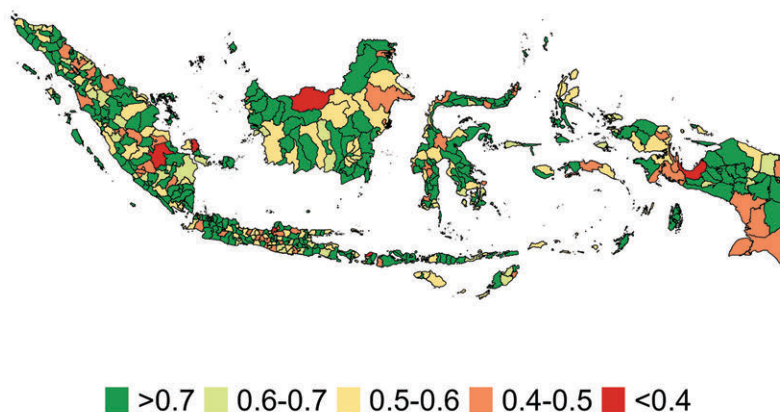
Berdasarkan grafik *heatmap* pada Gambar 6.16, capaian aspek Toleransi Agama dan Budaya mengalami peningkatan tajam dari 14,4% (2022) ke 36,6% (2023), lalu sedikit menurun ke 35,2% (2024). Untuk aspek Komitmen

Kebangsaan, capaiannya tergolong sangat tinggi di angka 97,7% (2022) dan 95,3% (2023), tetapi menurun cukup signifikan ke 80,9 (2024). Untuk aspek Toleransi dan Kesetaraan Murid, proporsi satuan pendidikan dengan kategori “Baik” naik dari 55,8% (2022) ke 79,2% (2023), tetapi kemudian turun menjadi 69% pada 2024. Grafik ini menunjukkan bahwa, meski aspek komitmen kebangsaan telah menjadi kekuatan di satuan pendidikan, upaya membangun lingkungan yang toleran dan setara masih perlu terus diperkuat.

Pemerataan Kualitas Guru

Dalam Rapor Pendidikan, aspek Pemerataan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan bertujuan melihat Ketersediaan, Kompetensi, serta Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) berdasarkan distribusi guru, sejauh mana guru memiliki sertifikasi, dan apakah PTK telah mendapatkan pelatihan.

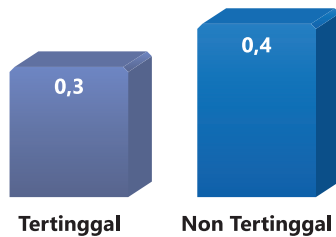
Gambar 6.17 menampilkan Indeks Distribusi Guru SMA/MA/Sederajat berdasarkan data Rapor Pendidikan 2024 yang menggambarkan tingkat pemerataan guru di seluruh provinsi di Indonesia. Data Indeks Distribusi Guru bertujuan melihat ketersediaan guru per mata pelajaran di satuan pendidikan pada masing-masing daerah.



Gambar 6.17 Sebaran Distribusi Guru SMA/MA/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Peta sebaran memperlihatkan bahwa daerah Jawa dan Bali didominasi warna hijau—menandakan bahwa pemerataan guru pada sebagian besar

provinsi di wilayah tersebut sudah relatif baik meskipun sebagian provinsi masih perlu diperhatikan. Sebagian wilayah Sumatra dan Kalimantan juga menunjukkan distribusi yang cukup baik, tetapi masih terdapat sebagian daerah dengan capaian merah (<40). Beberapa daerah di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku memperlihatkan warna oranye ($40-50$) dan kuning ($50-60$) sehingga tampak bahwa pemerataan guru belum sepenuhnya optimal. Untuk wilayah Papua, sebagian sudah menunjukkan capaian hijau tua (>70), tetapi masih terdapat beberapa daerah dengan warna oranye dan kuning. Secara keseluruhan, ketimpangan distribusi guru SMA/MA/Sederajat masih ditemukan di sebagian provinsi di Indonesia.

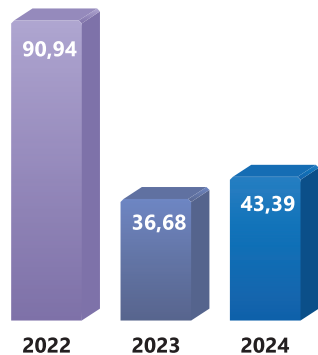


Gambar 6.18 Indeks Distribusi Guru SMA/MA/Sederajat Berdasarkan Wilayah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Jika dibandingkan pemerataan guru antara wilayah tertinggal dan nontertinggal (lihat Gambar 6.18), selisih di antara keduanya adalah 0,1 poin (rentang skor 0–1). Meski angka ini relatif kecil, distribusi guru di dua wilayah tersebut tergolong belum benar-benar merata sehingga diperlukan reformasi distribusi guru, baik di wilayah tertinggal maupun nontertinggal.

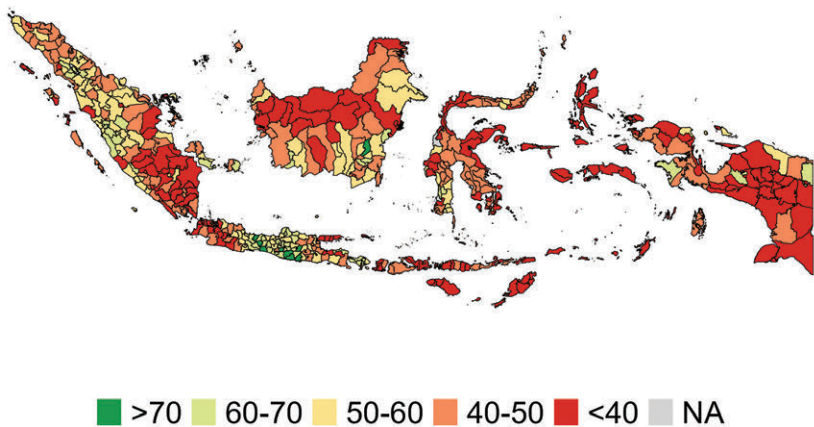
Sertifikasi Guru

Data proporsi guru bersertifikat merujuk kepada jumlah guru dan kepala sekolah yang memiliki sertifikasi pendidikan di masing-masing daerah sebagai salah satu ukuran kualitas pendidik. Gambar 6.19 menampilkan proporsi guru bersertifikat di SMA/MA/Sederajat berdasarkan data Rapor Pendidikan 2024 yang menggambarkan tingkat pemerataan sertifikasi pendidik.



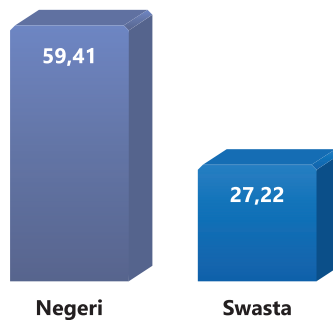
Gambar 6.19 Proporsi Guru Bersertifikat di SMA/MA/Sederajat Tingkat Nasional Tahun 2022-2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)

Grafik 6.19 menunjukkan dinamika capaian proporsi guru bersertifikat di SMA/MA/Sederajat selama periode 2022-2024. Pada 2022, proporsi guru bersertifikat tergolong tinggi, yaitu sebesar 90,94%. Periode berikutnya pada 2023, terjadi penurunan yang cukup drastis menjadi 36,68%. Meski demikian, pada 2024 terlihat adanya pemulihan, ditandai dengan peningkatan proporsi guru bersertifikat menjadi 43,29%. Meski telah terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya, capaian pada 2024 masih jauh di bawah capaian awal (2022). Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya memperluas akses guru terhadap program sertifikasi pendidik di semua wilayah untuk memastikan peningkatan kapasitas guru yang sistematis dan berkelanjutan.



Gambar 6.20 Sebaran Proporsi Guru Bersertifikat di SMA/MA/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Peta sebaran pada Gambar 6.20 menunjukkan bahwa baru sedikit wilayah di Indonesia yang memiliki capaian “Baik” untuk proporsi guru bersertifikat (>70), khususnya di sebagian daerah Jawa. Sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan masih didominasi warna kuning (50–60), oranye (40–50), dan merah (<40). Di wilayah Maluku, Sulawesi, dan Papua, masih sangat banyak daerah yang didominasi warna oranye dan merah; artinya, masih banyak guru dan kepala sekolah di daerah tersebut belum memiliki sertifikasi pendidik.

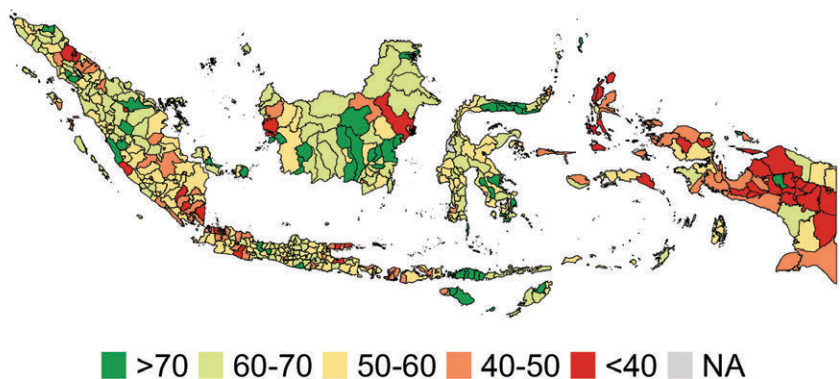


Gambar 6.21 Proporsi guru Bersertifikat di SMA/MA/Sederajat Berdasarkan Status Sekolah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Jika dilihat lebih lanjut, proporsi guru SMA/MA/Sederajat bersertifikat (rentang 0–100) di satuan pendidikan negeri mencapai 58,41%; artinya, mayoritas guru di sekolah negeri telah memenuhi standar sertifikasi profesional pendidik. Sementara itu, di satuan pendidikan swasta, baru 27,22% guru memiliki sertifikasi pendidik. Perbedaan ini mencerminkan adanya ketimpangan akses terhadap program sertifikasi guru.

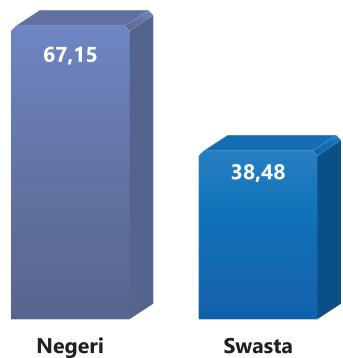
Pelatihan Guru

Gambar 6.22 menampilkan tingkat Pelatihan Guru SMA/MA/Sederajat berdasarkan data Rapor Pendidikan 2024 yang menggambarkan tingkat pemerataan pelatihan guru di seluruh provinsi di Indonesia. Data pengalaman pelatihan guru ini merujuk kepada capaian guru dalam meningkatkan kompetensi dan keahliannya melalui berbagai macam pelatihan. Partisipasi pelatihan guru ini penting bagi guru dan kepala sekolah dalam meningkatkan pengetahuan bidang studi, pedagogik, manajerial, dan pengetahuan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran serta kepemimpinan sekolah.



Gambar 6.22 Sebaran Pengalaman Pelatihan Guru SMA/MA/Sederajat Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Secara umum, terdapat ketimpangan dalam hal pelatihan guru, khususnya antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia. Wilayah dengan capaian tinggi yang ditunjukkan dengan warna hijau tua (>70) banyak ditemukan di sebagian daerah Jawa (khususnya Jawa Barat dan Jakarta) serta beberapa provinsi di Kalimantan dan Sumatra. Wilayah dengan capaian warna kuning dan oranye (50–70) tersebar di sebagian Sumatra, sebagian Sulawesi, dan sebagian NTB. Sementara itu, wilayah dengan capaian yang tergolong rendah yang —ditunjukkan dengan warna merah (<40)—terlihat dominan di wilayah timur Indonesia, seperti Papua, Papua Barat, Maluku, NTT, dan beberapa daerah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Pola ini menunjukkan bahwa program peningkatan kompetensi guru belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

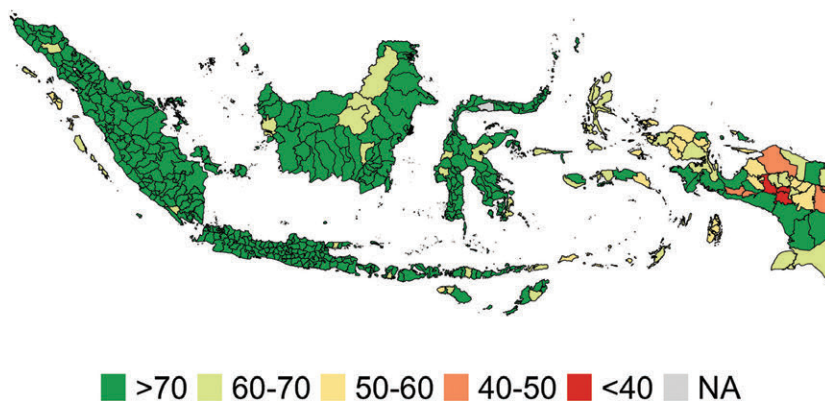


Gambar 6.23 Pengalaman Pelatihan Guru SMA/MA/Sederajat Berdasarkan Status Sekolah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Gambar 6.23 memperlihatkan perbandingan tingkat pengalaman pelatihan guru SMA/MA/Sederajat antara satuan pendidikan negeri dan swasta. Di satuan pendidikan negeri, 67,15% guru telah memiliki pengalaman pelatihan, sedangkan di satuan pendidikan swasta, baru 38,48% guru memiliki pengalaman pelatihan. Selisih di antara keduanya cukup lebar, yaitu 29%. Ketimpangan ini berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pengajaran antarsekolah apabila guru-guru tidak terfasilitasi untuk pelatihan yang memadai, khususnya terkait implementasi kurikulum, pedagogi, teknologi pembelajaran, dan aspek-aspek lainnya.

Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan

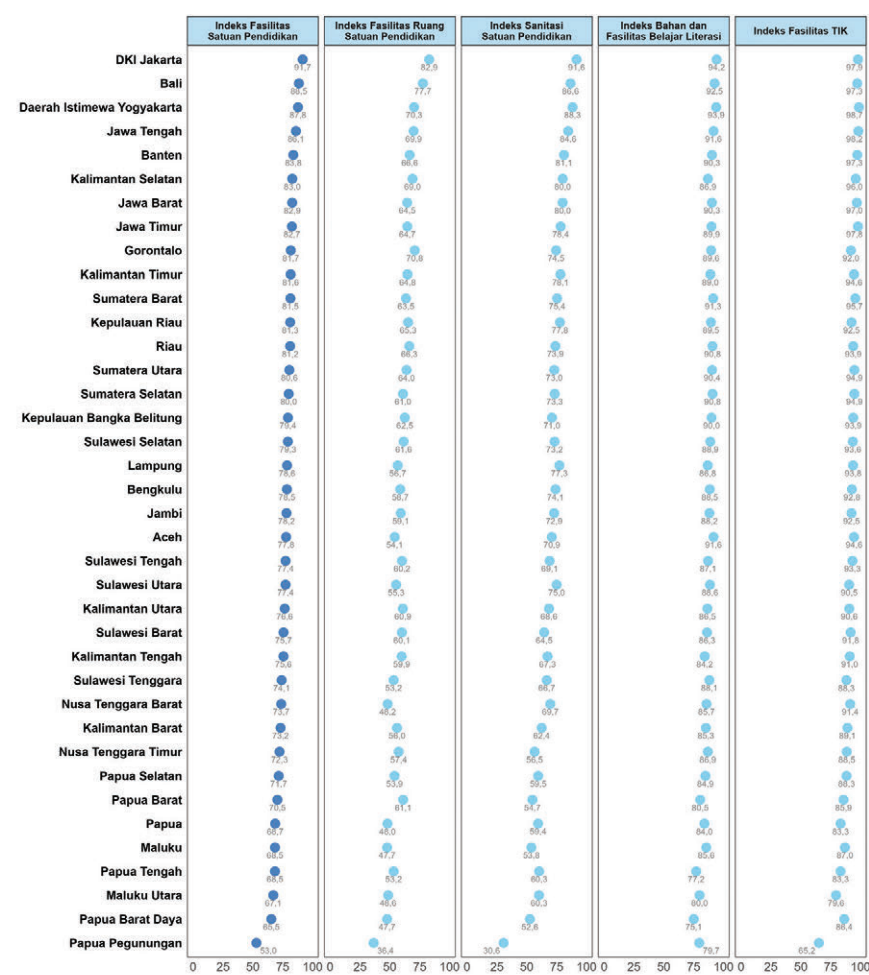
Pengukuran Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan dalam Rapor Pendidikan bertujuan melihat ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana ruang sekolah, sanitasi sekolah, bahan dan fasilitas belajar literasi, serta fasilitas TIK yang berperan penting dalam menunjang proses pembelajaran. Gambar 6.24 menampilkan sebaran capaian Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan SMA/MA/Sederajat di seluruh provinsi di Indonesia.



Gambar 6.24 Sebaran Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan SMA/MA/Sederajat Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

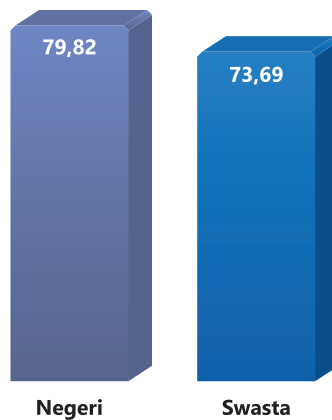
Peta sebaran pada Gambar 6.24 menunjukkan bahwa secara nasional, sebagian besar wilayah di Indonesia tampak pada indeks >70, ditunjukkan dengan dominasi warna hijau tua. Namun, peta Gambar 6.24 juga

menampilkan provinsi-provinsi dengan capaian indeks yang masih rendah, terutama di sebagian wilayah Maluku, Papua, Papua Barat, serta beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur yang berada pada indeks 50-60, bahkan 4050 ataupun <40. Daerah-daerah ini cenderung menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur yang berdampak pada rendahnya ketersediaan fasilitas sekolah.



Gambar 6.25 Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan SMA/MA/Sederajat per Provinsi Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

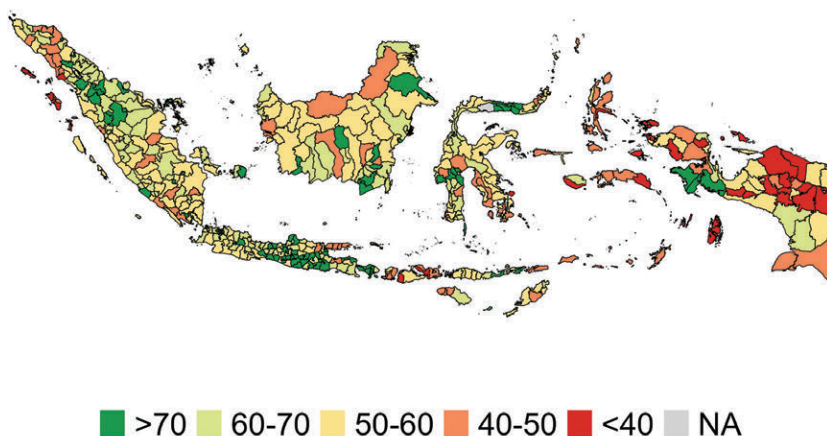
Jika dilihat dari seluruh provinsi di Indonesia, DKI Jakarta, Bali, DIY, dan Jawa Tengah menempati urutan teratas lebih dari 85% satuan pendidikannya telah memiliki fasilitas yang memadai. Sebaliknya, provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia, seperti Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, serta Maluku dan Nusa Tenggara, memiliki capaian yang lebih rendah. Lebih terperinci, capaian tertinggi dalam hal ketersediaan fasilitas ruang, sanitasi, fasilitas belajar literasi, dan fasilitas TIK juga masih didominasi wilayah Jawa dan Bali. Jika dilihat antarsubindikator, umumnya fasilitas ruang memiliki capaian terendah dan fasilitas TIK memiliki capaian tertinggi.



Gambar 6.26 Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan SMA/MA/Sederajat Berdasarkan Status Sekolah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

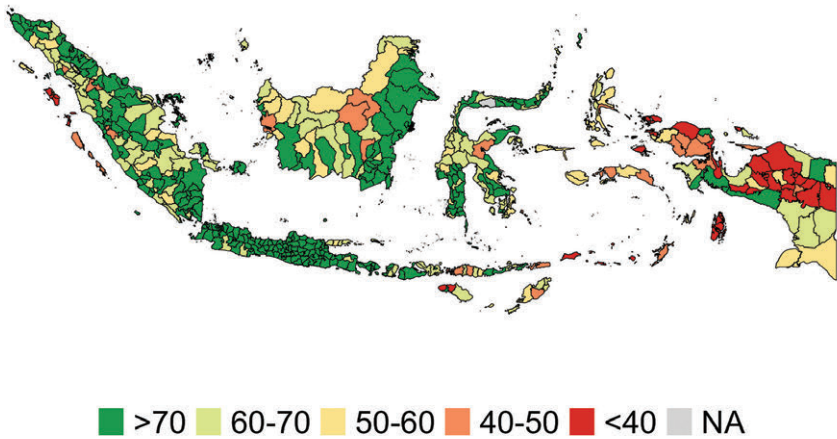
Gambar 6.26 menampilkan perbandingan indeks fasilitas satuan pendidikan SMA/MA/Sederajat antara negeri dan swasta. Secara umum, capaian lebih tinggi di satuan pendidikan negeri (79,82%) menunjukkan bahwa sekolah negeri memiliki kondisi fisik dan sarana pembelajaran yang sedikit lebih baik daripada sekolah swasta (73,69%). Temuan ini mengindikasikan pentingnya peningkatan dukungan bagi satuan pendidikan swasta yang menghadapi keterbatasan anggaran operasional sehingga terkendala dalam memenuhi standar fasilitas minimum.

Secara lebih terperinci, indikator Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan dibentuk oleh beberapa subindikator, yaitu Indeks Fasilitas Ruang Satuan Pendidikan, Indeks Sanitasi Satuan Pendidikan, Indeks Bahan dan Fasilitas Belajar Literasi, dan Indeks Fasilitas TIK.



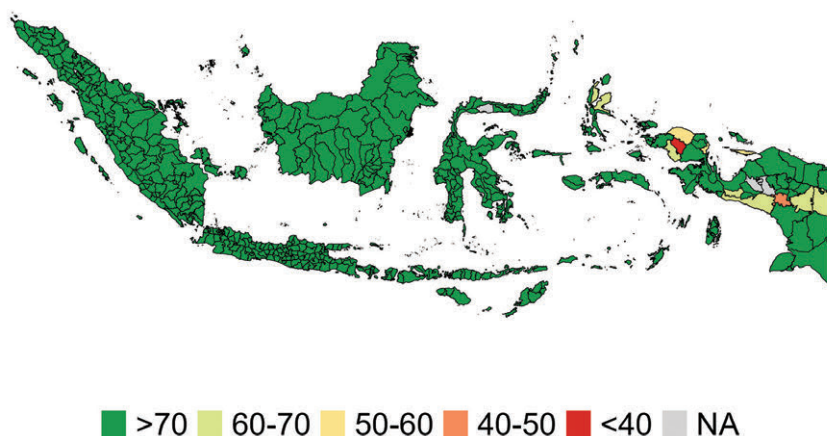
Gambar 6.27 Sebaran Indeks Fasilitas Ruang Satuan Pendidikan SMA/MA/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Gambar 6.27 menyajikan sebaran kondisi Indeks Fasilitas Ruang Satuan Pendidikan SMA/MA/Sederajat di seluruh provinsi, yaitu bagaimana ketersediaan dan kondisi fasilitas ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium sekolah. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa sebagian besar provinsi di Jawa (seperti DKI Jakarta, Jawa Barat), Sumatra bagian Tengah, dan Kalimantan (seperti Kalimantan Utara) sudah menunjukkan kualitas ruang yang baik (indeks >70) meski masih terdapat beberapa provinsi dengan indeks 60–70. Sementara itu, satuan pendidikan dengan indeks 40–50 dan <40 tersebar di Papua, Papua Barat, Maluku, dan sebagian NTT. Rendahnya indeks capaian di wilayah ini mencerminkan keterbatasan sarana fisik sekolah, seperti ruang kelas yang belum layak, laboratorium yang terbatas, dan perpustakaan yang belum optimal.



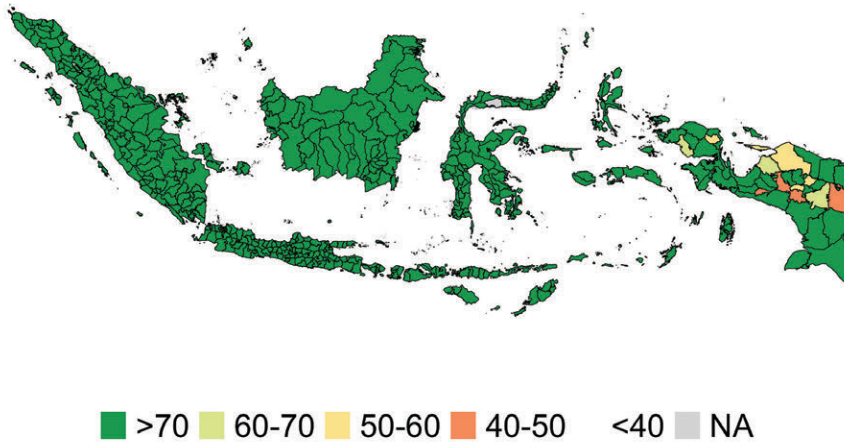
Gambar 6.28 Sebaran Indeks Sanitasi Satuan Pendidikan SMA/MA/Sederajat Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Gambar 6.28 menunjukkan sebaran kondisi Indeks Sanitasi Satuan Pendidikan SMA/MA/Sederajat di seluruh provinsi. Sebaran ini menggambarkan ketersediaan dan kondisi air layak, tempat cuci tangan, dan toilet di sekolah. Seperti terlihat pada gambar, sebagian besar kabupaten/kota di Jawa (seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan DKI Jakarta), Bali, sebagian besar Sumatra (seperti Riau, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat), serta sebagian Kalimantan dan Sulawesi menunjukkan kualitas sanitasi yang baik dengan indeks >70 meskipun masih terdapat beberapa wilayah dengan indeks 60–70. Beberapa daerah yang masih perlu mendapatkan perhatian terkait keterbatasan fasilitas sanitasi di satuan pendidikan adalah Sulawesi bagian tengah dan tenggara, NTT, Maluku, dan sebagian besar Papua, dengan capaian indeks sedang ke rendah (50–60, 40–50, dan <40).



Gambar 6.29 Sebaran Indeks Bahan dan Fasilitas Belajar Literasi Satuan Pendidikan SMA/MA/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Gambar 6.29 menunjukkan sebaran persentase satuan pendidikan yang memiliki bahan belajar literasi dan fasilitas pendukung lainnya. Dominasi warna hijau di sebagian besar provinsi menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia telah mencapai indeks >70; hal ini mengindikasikan bahwa fasilitas literasi secara fisik relatif tersedia di banyak satuan pendidikan meski masih terdapat daerah dengan capaian rendah, seperti beberapa kabupaten di Papua Barat Daya. Namun, pencapaian fasilitas literasi yang baik ini belum selaras dengan capaian murid yang masih rendah sebagaimana ditunjukkan dengan capaian asesmen kompetensi minimum literasi. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pemanfaatan fasilitas yang masih rendah, kualitas bahan yang masih bervariasi, dan pendampingan literasi yang belum kuat melalui program dan pembiasaan literasi.



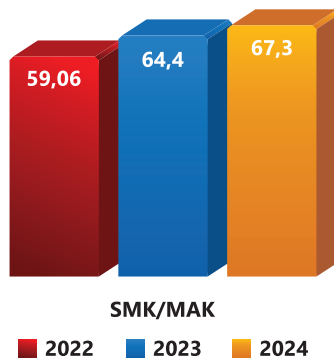
Gambar 6.30 Sebaran Indeks Fasilitas TIK Satuan Pendidikan SMA/MA/Sederajat Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Peta pada gambar 6.30 menampilkan capaian Indeks Fasilitas TIK yang merujuk kepada ketersediaan perangkat TIK, kualitas dan stabilitas listrik, dan akses internet di sekolah. Sebagian besar wilayah Indonesia, terutama Sumatra, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi bagian barat, berada di kategori >70—ditandai dengan dominasi warna hijau. Hal ini berarti bahwa satuan-satuan pendidikan di wilayah tersebut telah memiliki fasilitas TIK yang memadai. Kondisi tersebut berbeda dengan wilayah lain, seperti Maluku, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, yang memperlihatkan capaian lebih rendah (kategori 50–60 dan 40–50).

Bagian ini akan membahas tentang capaian mutu pendidikan di jenjang SMK/MAK. Meskipun secara kewenangan administratif SMK berada di bawah pemerintah provinsi, tetapi untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan dan presisi pada aspek kesenjangan dan sebaran wilayah, dilakukan analisis di level kabupaten/kota. Dengan demikian, perumusan strategi pengembangan SMK yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi dapat selaras dengan kebutuhan pembangunan di tingkat kabupaten/kota di setiap wilayah.

Capaian Literasi

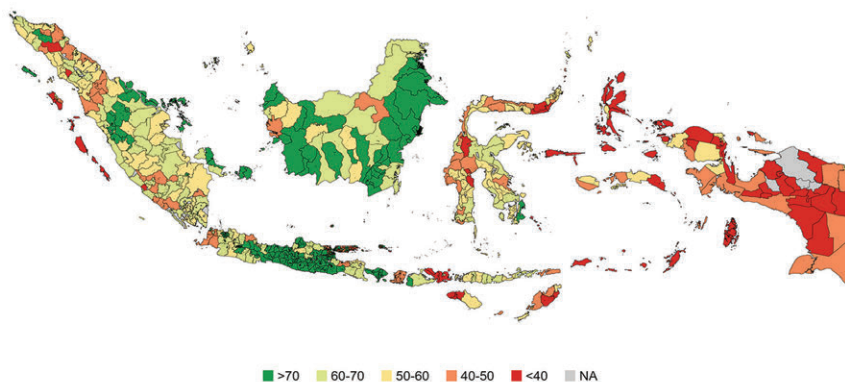
Literasi di tingkat sekolah menengah kejuruan/madrasah aliah kejuruan (SMK/MAK) merupakan fondasi penting bagi kesiapan murid untuk memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan. Pada tahap ini, kemampuan memahami informasi, menafsirkan teks, serta menghubungkannya dengan konteks praktis sangat dibutuhkan agar murid mampu mengikuti pembelajaran kejuruan yang lebih kompleks. Karena itu, penguatan literasi tidak hanya mendukung capaian akademik, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kompetensi vokasional yang diperlukan di dunia industri.



Gambar 7.1 Tren Proporsi Murid SMK/MAK yang Mencapai Kompetensi Minimum Literasi Tahun 2022-2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)

Capaian literasi murid SMK/MAK dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perbaikan konsisten. Pada tahun 2022, proporsi murid yang mencapai kompetensi minimum berada di angka 59,06%. Angka ini kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 64,4% pada 2023 dan kembali naik menjadi 67,3% pada 2024. Peningkatan yang stabil ini menunjukkan bahwa upaya memperkuat kemampuan literasi di SMK/MAK mulai memberikan hasil meskipun masih diperlukan penguatan lebih lanjut agar seluruh siswa memiliki kesiapan literasi yang memadai.

Selain capaian rata-rata, sebaran capaian literasi pada jenjang SMK/MAK berdasarkan Rapor Pendidikan 2024 menunjukkan adanya peningkatan kinerja nasional, tetapi belum diikuti dengan pemerataan di seluruh wilayah. Peta pada Gambar 7.2 memperlihatkan bahwa Jawa–Bali masih menjadi kawasan dengan capaian relatif tinggi—ditandai dengan dominasi warna hijau yang menunjukkan bahwa lebih dari 70% murid telah mencapai kompetensi minimum. Sebaliknya, sejumlah wilayah di NTT, Maluku, hingga Papua masih berada pada rentang capaian 40–50, bahkan di bawah 40; hal ini menggambarkan adanya kesenjangan geografis yang cukup tajam dalam mutu pembelajaran literasi.

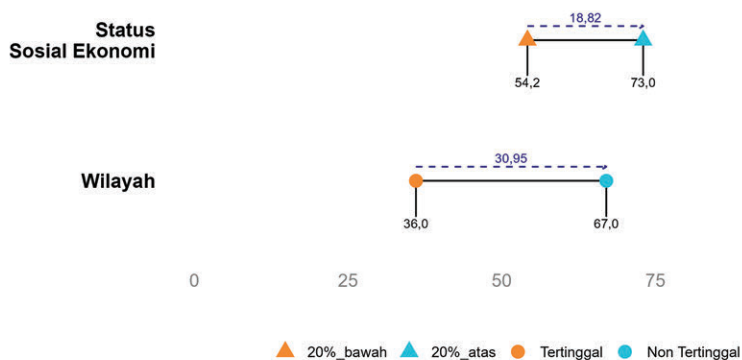


Gambar 7.2 Sebaran Persentase Murid SMK/MAK yang Mencapai Kompetensi Minimum Literasi Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Di luar itu, variasi masih tampak di hampir semua pulau besar. Sumatra menunjukkan capaian beragam antara bagian barat dan timur; Kalimantan relatif lebih baik di wilayah pesisir, dibandingkan dengan pedalaman; Papua

sementara beberapa daerah di Sulawesi berada pada rentang 50–60, dengan sebagian wilayah timur memiliki capaian yang lebih rendah. Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun tren capaian nasional membaik, tantangan terbesar tetap terletak pada pemerataan kualitas antarwilayah, terutama di daerah tertinggal dan kawasan timur Indonesia yang membutuhkan intervensi lebih terarah dan berkelanjutan.

Perbedaan capaian literasi antara wilayah tertinggal dan nontertinggal pada jenjang SMK/MAK masih terlihat cukup lebar. Rata-rata skor literasi wilayah tertinggal berada di angka 36, jauh di bawah wilayah nontertinggal yang mencapai 67. Selisih sebesar 30,95 poin ini menunjukkan adanya kesenjangan serius dalam akses terhadap pembelajaran yang mendukung kemampuan memahami teks dan informasi dasar. Ketimpangan ini berpotensi memperbesar hambatan bagi murid di wilayah tertinggal untuk mengembangkan kemampuan literasi yang menjadi fondasi bagi pembelajaran pada jenjang berikutnya maupun kebutuhan dunia kerja.



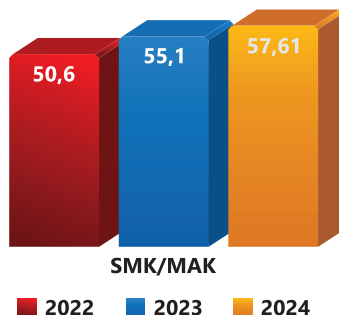
Gambar 7.3 Kesenjangan Skor Literasi SMK/MAK Berdasarkan Status Sosial Ekonomi dan Wilayah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Kesenjangan serupa juga tampak ketika capaian literasi dibandingkan berdasarkan status sosial ekonomi (SSE) satuan pendidikan. Kelompok satuan pendidikan di kelompok SSE 20% bawah memiliki skor rata-rata 54,2, sedangkan satuan pendidikan SSE 20% atas mencapai skor 73. Perbedaan sebesar 18,82 poin ini mengindikasikan bahwa latar belakang ekonomi turut memengaruhi akses dan kualitas pembelajaran literasi di SMK/MAK. Temuan

ini menegaskan perlunya intervensi lebih terarah untuk memastikan bahwa satuan pendidikan pada kelompok SSE 20% bawah memperoleh dukungan yang memadai agar tidak makin tertinggal dalam kompetensi literasi dasar.

Capaian Numerasi

Kecakapan numerasi pada jenjang SMK/MAK merupakan landasan penting bagi murid untuk memahami pelajaran kejuruan yang menuntut penerapan konsep numerasi dalam konteks praktik. Kemampuan ini tidak hanya berkaitan dengan berhitung, tetapi juga bagaimana murid menafsirkan informasi numerik dan menggunakannya untuk memecahkan masalah di lingkungan belajar maupun dunia kerja. Karena itu, penguasaan numerasi yang memadai menjadi bagian penting dari kesiapan murid dalam menghadapi tuntutan kompetensi vokasional.



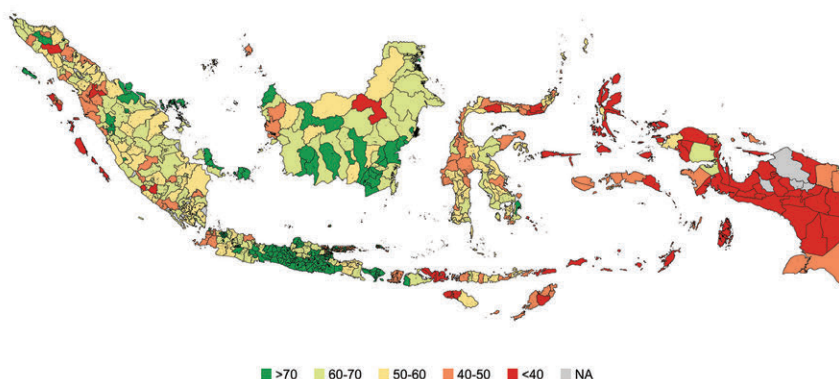
Gambar 7.4 Tren Proporsi Murid SMK/MAK yang Mencapai Kompetensi Numerasi Tahun 2022-2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)

Tren numerasi murid SMK/MAK dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup stabil. Pada tahun 2022, proporsi murid yang mencapai kompetensi minimum berada pada angka 50,6%. Angka ini kemudian meningkat menjadi 55,1% pada 2023, dan kembali naik ke 57,61% pada 2024. Kenaikan bertahap ini menggambarkan adanya perbaikan kualitas pembelajaran numerasi meskipun penguatan yang lebih intensif tetap dibutuhkan agar keterampilan dasar ini benar-benar merata di seluruh satuan pendidikan.

Sebaran capaian numerasi tingkat SMK/MAK menunjukkan pola ketimpangan yang masih cukup kuat antarwilayah. Daerah Jawa, Bali, dan

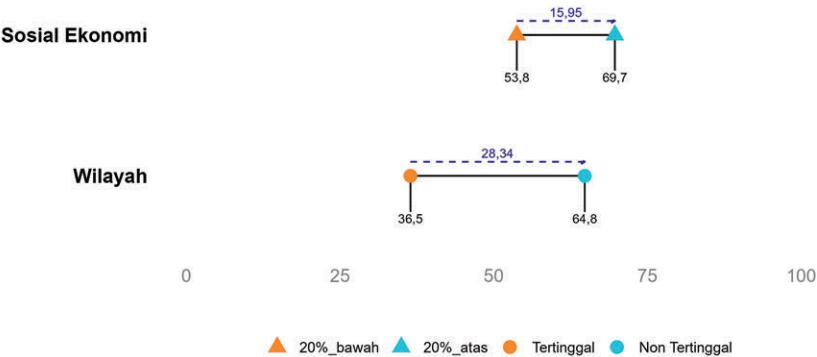
sebagian Kalimantan tampak memiliki capaian numerasi yang lebih baik—ditunjukkan oleh dominasi warna hijau dan kuning. Sementara itu, wilayah timur Indonesia, terutama Maluku dan Papua, masih berada pada kategori rendah hingga sangat rendah; hal ini tecermin dari banyaknya daerah yang berwarna oranye dan merah.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan numerasi belum merata, terutama pada daerah dengan karakteristik geografis berat atau akses pendidikan yang terbatas. Kesenjangan tersebut sekaligus mengindikasikan perlunya penguatan dukungan bagi satuan pendidikan dan guru di wilayah tertinggal agar murid dapat memperoleh pengalaman belajar numerasi yang lebih konsisten.



Gambar 7.5 Sebaran Persentase Murid SMK/MAK yang Mencapai Kompetensi Minimum Numerasi Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Perbedaan skor numerasi berdasarkan status wilayah masih terlihat mencolok. Murid SMK/MAK di wilayah tertinggal mencatatkan skor rata-rata 36,5, sedangkan di wilayah nontertinggal mencapai 64,8. Selisih sebesar 28,34 poin ini menunjukkan bahwa karakteristik wilayah masih sangat berpengaruh terhadap pembentukan kemampuan numerasi murid. Murid SMK/MAK di wilayah tertinggal berpotensi mengalami hambatan dalam mengembangkan kemampuan numerasi yang esensial bagi kesiapan mereka untuk memasuki dunia kerja dan pendidikan yang lebih tinggi.



Gambar 7.6. Kesenjangan Skor Numerasi SMK/MAK Berdasarkan Status Sosial Ekonomi dan Wilayah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

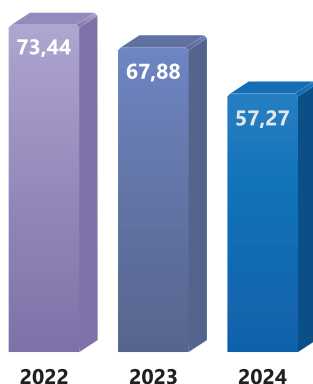
Kesenjangan juga tampak pada perbandingan capaian satuan pendidikan berdasarkan status sosial ekonomi (SSE). Skor numerasi pada satuan pendidikan di kelompok SSE 20% bawah berada di angka 53,8, sementara satuan pendidikan di kelompok SSE 20% atas mencapai skor 69,7. Perbedaan sebesar 15,95 poin ini menegaskan bahwa latar belakang sosial ekonomi tetap menjadi faktor penting yang memengaruhi kualitas pembelajaran numerasi. Dengan demikian, kelompok dengan hambatan akses terhadap sumber belajar dan fasilitas pembelajaran yang memadai perlu mendapatkan dukungan tambahan yang lebih terarah.

Capaian Karakter

Capaian karakter menggambarkan karakter peserta didik berdasarkan nilai akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global, dan kemandirian. Capaian ini dapat menjadi gambaran komprehensif bagaimana karakter siswa di Indonesia dan karakteristik yang dimilikinya.

Capaian karakter pada jenjang SMK/MAK memperlihatkan tren menurun selama tiga tahun terakhir. Pada 2022, proporsi satuan pendidikan dengan kategori “Baik” pada indikator Karakter adalah 73,44%—menunjukkan bahwa mayoritas murid SMK/MAK mampu mencapai standar penguatan karakter

yang relatif solid. Namun, penurunan mulai terlihat pada 2023; capaian karakter turun menjadi 67,88 atau berkurang sekitar 5,56 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi implementasi program penguatan karakter, baik dari aspek lingkungan belajar, kualitas pendampingan, maupun keberlanjutan kegiatan yang berbasis nilai dan perilaku positif.

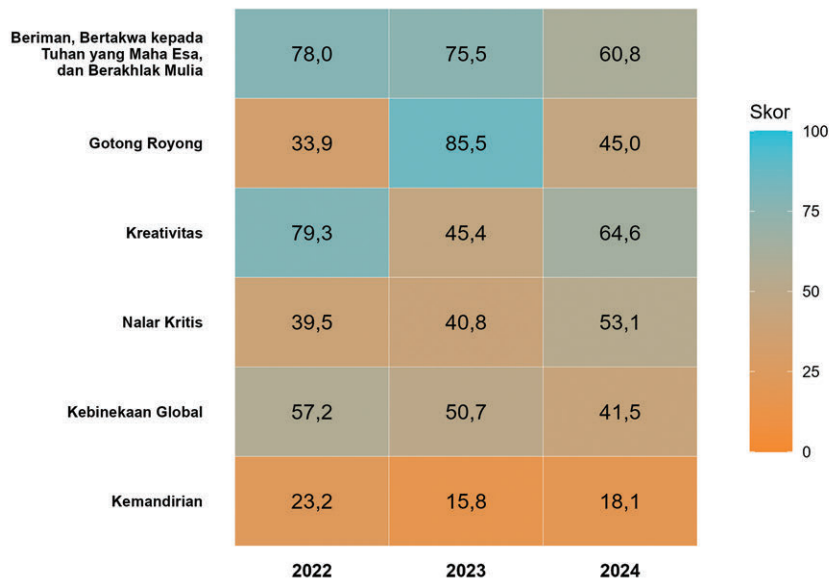


Gambar 7.7 Proporsi Satuan Pendidikan SMK/MAK dengan Kategori "Baik" pada Indikator Karakter Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah)

Situasi makin mengkhawatirkan pada 2024: proporsi satuan pendidikan dengan capaian "Baik" pada indikator Karakter kembali turun menjadi 57,27% atau mengalami penurunan sekitar 10,61% dari tahun 2023. Total penurunan dari 2022 ke 2024 mencapai 16,17%; hal ini menggambarkan adanya pergeseran besar dalam kondisi pembinaan karakter di satuan pendidikan vokasi. Penurunan signifikan ini dapat berkaitan dengan dinamika implementasi kualitas pembelajaran, perubahan budaya sekolah, beban praktik yang makin tinggi, hingga keterbatasan program pendampingan karakter yang berkelanjutan. Data ini memberikan sinyal kuat bahwa penguatan karakter di SMK/MAK membutuhkan intervensi lebih sistematis, terutama agar capaian tidak makin menjauh dari standar yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.

Jika dilihat lebih mendalam melalui *heatmap* karakter dengan kategori "Baik" (dalam persen) pada tingkat SMK/MAK, tampak bahwa penurunan capaian karakter tidak terjadi secara merata di semua aspek, melainkan bervariasi antaraspek. Pada 2022, karakter dengan capaian tertinggi adalah

Kreativitas (79,3%) serta Beriman, Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia (78%)—menunjukkan bahwa dua aspek ini telah menjadi kekuatan utama dalam pembinaan karakter murid. Namun, pada 2023, beberapa aspek mengalami fluktuasi signifikan (Gotong Royong meningkat tajam menjadi 85,5%, sementara Kreativitas justru merosot menjadi 45,4%).



Gambar 7.8 *Heatmap* Proporsi Satuan Pendidikan SMK/MAK Kategori “Baik” pada indikator Karakter Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah)

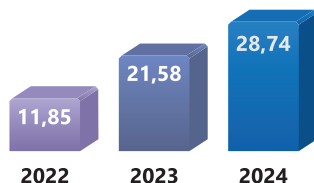
Tren tahun 2024 memperlihatkan penurunan yang lebih menyebar. Sebagian besar aspek karakter mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Aspek Beriman dan Berakhlak Mulia turun ke 60,8%, Gotong Royong menjadi 45%, dan Kebinekaan Global menjadi 41,5%. Meskipun demikian, terdapat sedikit perbaikan pada Nalar Kritis (53,1%) dan Kreativitas (64,6%) yang dapat diartikan sebagai bentuk adaptasi terhadap pembelajaran berbasis proyek dan pemecahan masalah yang mulai diperkuat kembali di lingkungan vokasi.

Secara keseluruhan, pola *heatmap* pada Gambar 7.8 menegaskan bahwa penguatan karakter di SMK/MAK masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga konsistensi antaraspek nilai. Program yang sebelumnya efektif pada

aspek tertentu tampak belum berkelanjutan atau belum terintegrasi dengan baik pada seluruh bidang pengajaran. Oleh karena itu, upaya penguatan karakter di SMK/MAK perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan capaian secara kuantitatif, tetapi juga pada penguatan sistem pembinaan karakter yang berkesinambungan, kontekstual dengan dunia kerja, dan terintegrasi dalam setiap proses pembelajaran.

Capaian Kualitas Pembelajaran

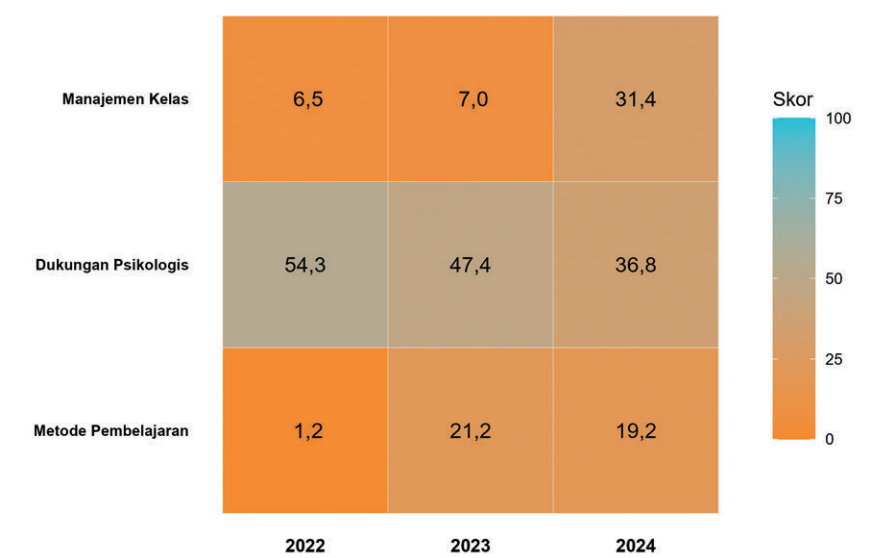
Capaian kualitas pembelajaran jenjang SMK/MAK selama tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pada 2022, proporsi satuan pendidikan dengan kategori “Baik” masih berada di angka 11,85%—menandakan bahwa proses adaptasi terhadap kurikulum baru dan pembelajaran berbasis proyek masih dalam tahap awal. Namun, peningkatan yang terjadi pada 2023 (menjadi 21,58%) menunjukkan bahwa berbagai upaya perbaikan mulai membuahkan hasil. Guru dan murid tampak makin terbiasa dengan pendekatan pembelajaran yang lebih aktif, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan dunia industri.



Gambar 7.9 Proporsi Satuan Pendidikan SMK/MAK dengan Kategori “Baik” pada Indikator Kualitas Pembelajaran Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah)

Memasuki tahun 2024, capaian kembali meningkat signifikan menjadi 28,74%—menegaskan adanya kemajuan stabil dalam mutu pembelajaran di satuan pendidikan vokasi. Kenaikan ini mencerminkan penguatan pada berbagai aspek, mulai dari kualitas pendampingan guru hingga integrasi teknologi. Meski mengalami peningkatan, capaian secara nasional masih rendah jika dibandingkan dengan indikator lainnya (masih di bawah 50%). Oleh karena itu, masih diperlukan langkah lanjutan untuk memastikan pemerataan peningkatan kualitas di seluruh sekolah agar kemajuan yang sudah terlihat tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga merata dan berkelanjutan di seluruh ekosistem pendidikan vokasi.

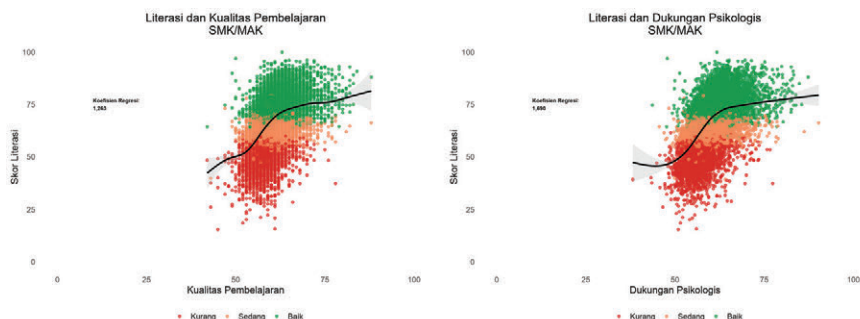
Jika dilihat lebih dalam dari aspek komponennya, capaian kualitas pembelajaran tingkat SMK/MAK menunjukkan dinamika yang cukup menarik. Pada komponen Manajemen Kelas, terlihat peningkatan signifikan dari hanya 6,5% pada 2022 menjadi 31,4% pada 2024. Peningkatan ini menandakan bahwa upaya penguatan kapasitas guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif mulai menunjukkan hasil positif. Guru tampaknya makin mampu mengelola kelas dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan adaptif terhadap karakteristik murid vokasi.



Gambar 7.10 *Heatmap* Proporsi Satuan Pendidikan SMK/MAK dengan Kategori “Baik” pada Indikator Kualitas Pembelajaran Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)

Akan tetapi, tren berbeda justru tampak pada Dukungan Psikologis dan Metode Pembelajaran. Dukungan Psikologis mengalami penurunan dari 54,3% pada 2022 menjadi 36,8% pada 2024; hal ini mungkin mengindikasikan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan emosional murid mulai berkurang seiring dengan meningkatnya fokus pada aspek teknis dan capaian akademik. Sementara itu, Metode Pembelajaran sempat melonjak pada 2023 (21,2%), tetapi sedikit menurun pada 2024 (19,2%)—menunjukkan perlunya konsistensi dalam penerapan strategi belajar yang inovatif. Secara keseluruhan, hasil ini memperlihatkan bahwa, meski ada kemajuan pada sisi

Manajemen Kelas, keseimbangan antara aspek pedagogis dan psikologis masih perlu diperkuat agar kualitas pembelajaran tingkat SMK/MAK tumbuh secara lebih menyeluruh.



Gambar 7.11 Analisis Regresi Persebaran Data Hubungan Indikator Kualitas Pembelajaran dan Subindikator Dukungan Psikologis terhadap Literasi SMK/MAK Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

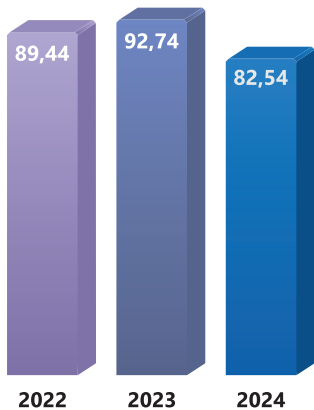
Gambar 7.11 menunjukkan adanya hubungan positif antara kualitas pembelajaran dan skor literasi jenjang SMK/MAK, tetapi pengaruhnya tidak merata di seluruh tingkat capaian. Pola regresi yang tidak linear memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran tidak selalu menghasilkan peningkatan literasi dengan kekuatan yang sama pada setiap kelompok murid. Pada capaian literasi rendah, peningkatan kualitas pembelajaran hanya berdampak kecil, sementara pada capaian menengah pengaruhnya jauh lebih kuat dan terlihat signifikan. Namun, pada capaian tinggi, pengaruh tersebut kembali melemah. Pola ini menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran paling efektif meningkatkan literasi pada kelompok menengah, sedangkan pada kelompok rendah dan tinggi, faktor-faktor lain di luar pembelajaran tampak lebih dominan meski kualitas pembelajaran tetap menjadi elemen pendukung.

Salah satu contoh subindikator dalam kualitas pembelajaran adalah dukungan psikologis (gambar 6.11 kanan) menunjukkan adanya hubungan positif antara dukungan psikologis dan skor literasi di SMK/MAK meskipun pola peningkatannya tidak sepenuhnya linear. Garis regresi memperlihatkan bahwa penguatan dukungan psikologis memang berkaitan dengan peningkatan skor literasi, tetapi besarnya dampak bervariasi pada tiap

kelompok capaian. Pada kelompok murid dengan capaian literasi rendah, peningkatan dukungan psikologis hanya memberikan pengaruh kecil terhadap skor literasi. Dampak ini menjadi jauh lebih kuat pada kelompok menengah—terlihat dari kemiringan regresi yang lebih tajam. Namun, pada capaian literasi tinggi, pengaruh dukungan psikologis kembali melemah. Pola ini mengindikasikan bahwa dukungan psikologis paling efektif mendorong peningkatan literasi pada kelompok menengah, sementara pada kelompok rendah dan tinggi, perbedaan literasi cenderung dipengaruhi faktor lain meski dukungan psikologis tetap memberikan kontribusi pendukung.

Capaian Iklim Keamanan

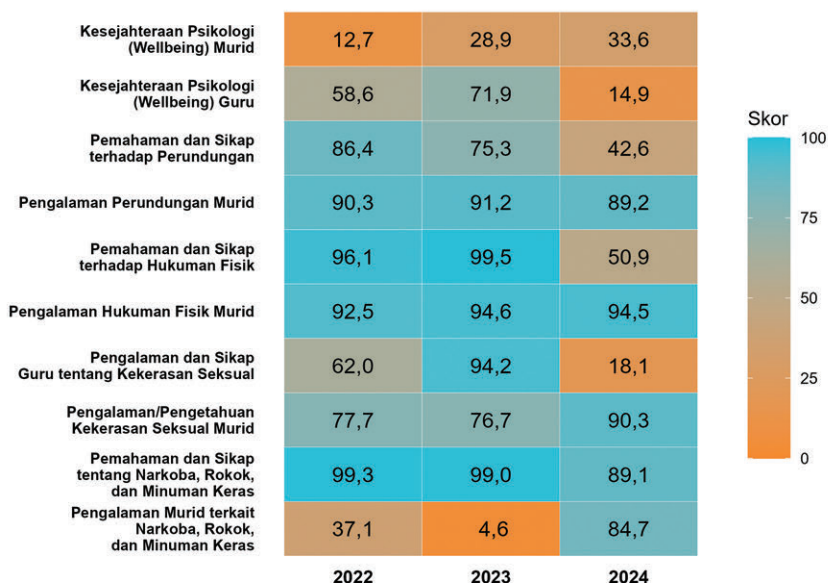
Capaian iklim keamanan pada jenjang SMK/MAK memperlihatkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2022, proporsi satuan pendidikan dengan capaian “Baik” berada di angka 89,44%; hal ini mencerminkan suasana sekolah yang relatif aman dan kondusif bagi kegiatan belajar mengajar. Kenaikan pada 2023 menjadi 92,74% menunjukkan peningkatan rasa aman di lingkungan sekolah yang, kemungkinan besar, dipengaruhi oleh penguatan kebijakan perlindungan murid, peningkatan sistem pengawasan, serta kesadaran komunitas sekolah akan pentingnya keamanan fisik dan psikologis murid.



Gambar 7.12 Proporsi Satuan Pendidikan SMK/MAK dengan Kategori “Baik” pada Indikator Iklim Keamanan Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)

Akan tetapi, pada 2024 terjadi penurunan capaian cukup tajam menjadi 82,54%—menandakan adanya tantangan baru dalam menjaga stabilitas iklim keamanan di satuan pendidikan vokasi. Penurunan ini bisa disebabkan oleh meningkatnya dinamika sosial di sekolah, tekanan akademik dan praktik industri, ataupun berkurangnya efektivitas mekanisme pencegahan perundungan dan kekerasan. Meskipun capaiannya masih tergolong tinggi, tren penurunan ini menjadi sinyal penting bagi sekolah dan pemangku kebijakan untuk kembali memperkuat budaya aman dan inklusif agar seluruh warga sekolah dapat beraktivitas tanpa rasa takut maupun tekanan berlebihan.

Jika dilihat lebih mendalam melalui *heatmap*, iklim keamanan pada jenjang SMK/MAK menunjukkan dinamika yang cukup beragam pada tiap aspek. Secara umum, kondisi psikologis murid mengalami peningkatan dari 12,7% pada 2022 menjadi 33,6% pada 2024; hal ini menandakan adanya perbaikan dalam kesejahteraan emosional dan rasa nyaman di sekolah. Namun, tren berbeda tampak pada *wellbeing* guru yang sempat meningkat hingga 71,9% pada 2023, tetapi turun tajam menjadi 14,9% pada 2024. Penurunan ini dapat menjadi sinyal akan adanya kelelahan ataupun meningkatnya tekanan kerja, terutama seiring dengan tuntutan administrasi dan beban pelaksanaan program vokasi yang lebih kompleks.

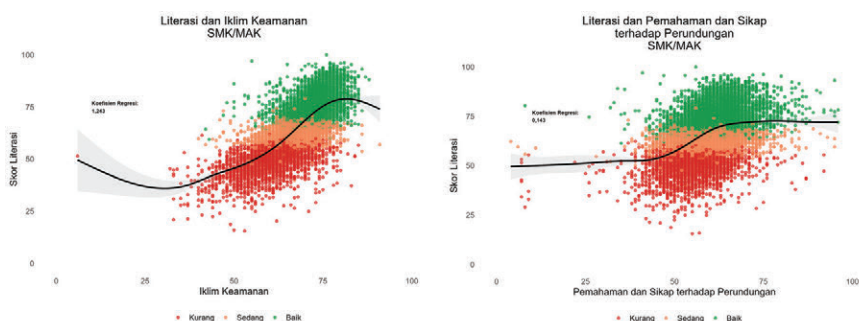


Gambar 7.13 *Heatmap* Proporsi Sekolah SMK/MAK yang dengan Kategori “Baik” pada Indikator Iklim Keamanan Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah)

Sementara itu, beberapa aspek, seperti pemahaman dan sikap terhadap perundungan serta kekerasan fisik, menunjukkan fluktuasi meskipun sebagian besar masih berada pada tingkat yang tinggi. Hal yang cukup menarik adalah peningkatan tajam dalam pengalaman murid terkait narkoba, dari hanya 4,6% pada 2023, kemudian melonjak hingga 84,7% pada 2024. Lonjakan ini mengindikasikan kesadaran akan—dan pelaporan yang lebih baik mengenai—isu narkoba di lingkungan sekolah meskipun juga bisa mencerminkan meningkatnya risiko paparan terhadap perilaku berisiko. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa, meskipun upaya menjaga keamanan fisik cukup berhasil, tantangan besar masih ada dalam menjaga kesejahteraan psikologis guru dan murid agar tercipta lingkungan belajar yang benar-benar aman dan sehat.

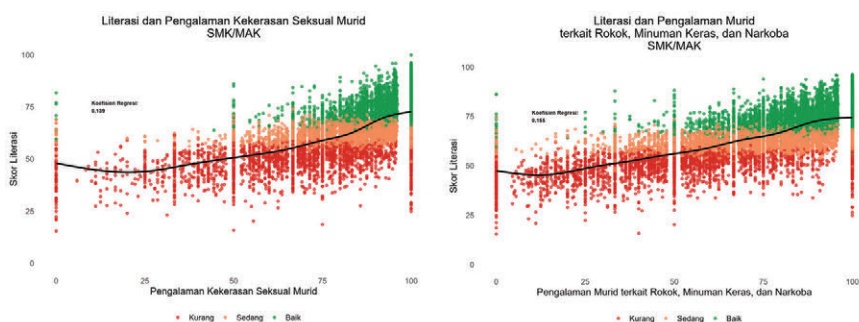
Hubungan antara literasi dan pemahaman serta sikap terhadap perundungan juga memperlihatkan pola yang mirip: pengaruh yang kecil pada capaian rendah, lebih kuat pada capaian menengah, lalu kembali melemah pada capaian tinggi. Murid dengan pemahaman dan sikap antiperundungan yang lebih baik cenderung memiliki skor literasi lebih tinggi, tetapi dampaknya paling terasa pada kelompok menengah. Pada murid dengan capaian rendah maupun tinggi, variasi literasi dipengaruhi lebih banyak faktor lain meskipun sikap antiperundungan tetap menjadi elemen pendukung dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat.

Gambar 7.14 pada gambar kanan menunjukkan bahwa makin tinggi paparan murid terhadap pengalaman kekerasan seksual, skor literasinya makin cenderung menurun, terutama pada kelompok capaian rendah. Pengaruhnya terlihat sangat lemah di seluruh rentang karena kurva regresi cenderung landai; hal ini menandakan bahwa pengalaman kekerasan seksual tidak memiliki hubungan langsung yang kuat dengan variasi literasi. Namun, pola sebaran titik memperlihatkan bahwa murid dengan pengalaman kekerasan seksual yang lebih tinggi umumnya berada pada kelompok literasi rendah hingga sedang—mengisyaratkan adanya dampak tidak langsung melalui faktor psikologis, kenyamanan belajar, ataupun stabilitas emosi.



Gambar 7.14 Analisis Regresi Persebaran Data Hubungan Indikator Iklim Keamanan dan Subindikator Pemahaman dan Sikap terhadap Perundungan terhadap Literasi SMK/MAK Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Gambar 7.15 menunjukkan bahwa makin baik iklim keamanan di sekolah, makin tinggi kecenderungan skor literasi murid, tetapi pengaruhnya tidak merata di setiap tingkat capaian. Pada capaian literasi rendah, peningkatan iklim keamanan hanya berdampak kecil pada skor. Dampaknya menjadi lebih kuat pada kelompok menengah—terlihat dari kurva yang lebih menanjak sebelum kembali melemah pada capaian tinggi. Pola ini menegaskan bahwa iklim keamanan paling berpengaruh pada murid dengan literasi menengah, sementara pada capaian rendah dan tinggi, ada faktor lain yang tampaknya lebih dominan.



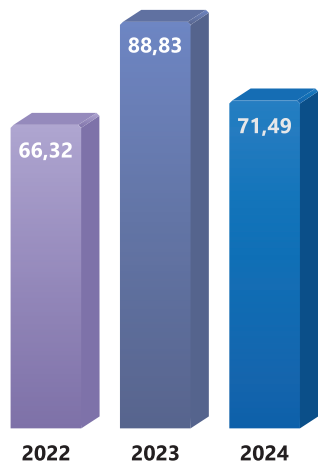
Gambar 7.15 Analisis Regresi Persebaran Data Hubungan Subindikator Pengalaman Kekerasan Seksual Murid dan Pengalaman Murid terkait Rokok, Minuman Keras, dan Narkoba terhadap Literasi SMK/MAK Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Pada Gambar 7.15, hubungan antara literasi dan pengalaman murid terkait perilaku berisiko, seperti merokok, minum minuman keras, dan

menggunakan narkoba juga tampak lemah. Garis regresi menunjukkan tren positif yang sangat kecil—menandakan bahwa peningkatan pengalaman terhadap perilaku berisiko tidak berkaitan signifikan dengan variasi skor literasi. Meskipun demikian, sebaran titik memperlihatkan bahwa murid dengan intensitas perilaku berisiko lebih tinggi banyak ditemukan pada kelompok literasi rendah. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor di luar pembelajaran, seperti lingkungan pergaulan, kontrol diri, dan dukungan keluarga lebih dominan memengaruhi pola ini, sementara hubungan langsung dengan literasi tetap minimal.

Capaian Iklim Kebinekaan

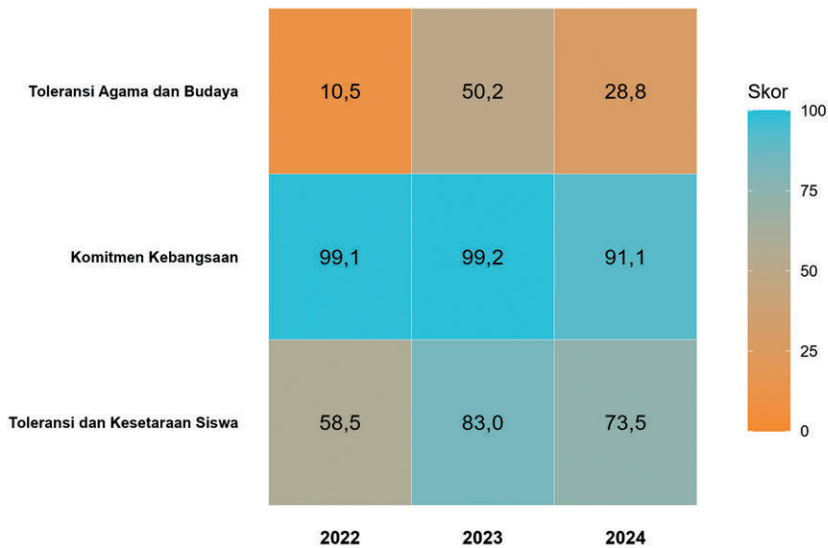
Capaian iklim kebinekaan pada jenjang SMK/MAK dalam tiga tahun terakhir memperlihatkan dinamika yang cukup menarik. Tahun 2022 menjadi titik awal dengan proporsi satuan pendidikan berkategori “Baik” sebesar 66,32%; hal ini menandakan bahwa suasana kebinekaan di lingkungan SMK/MAK sudah mulai terbentuk meski masih ada ruang untuk penguatan. Lompatan besar terjadi pada 2023 dengan capaian sebesar 88,83%, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini bisa mencerminkan meningkatnya kesadaran serta komitmen sekolah terhadap nilai-nilai keberagaman dan keberhasilan berbagai inisiatif yang mendorong terciptanya lingkungan belajar yang lebih inklusif dan saling menghargai.



Gambar 7.16 Proporsi Satuan Pendidikan SMK/MAK dengan Kategori “Baik” pada Indikator Iklim Kebinekaan Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah)

Akan tetapi, pada 2024, capaian tersebut mengalami sedikit penurunan menjadi 71,49%. Meski angka tersebut masih tergolong baik, penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga stabilitas iklim kebinekaan setelah lonjakan tinggi pada tahun sebelumnya. Bisa jadi faktor-faktor, seperti perubahan kebijakan, dinamika sosial di sekolah, atau adaptasi terhadap program baru, turut memengaruhi hasil tersebut. Meski begitu, tren keseluruhan tetap menunjukkan bahwa SMK/MAK telah berupaya konsisten menumbuhkan semangat kebinekaan, dan penurunan ini dapat menjadi momentum untuk refleksi serta penguatan strategi agar nilai-nilai toleransi dan saling menghargai makin mengakar pada tahun-tahun berikutnya.

Jika dilihat lebih lanjut melalui *heatmap*, capaian iklim kebinekaan pada jenjang SMK/MAK memperlihatkan variasi menarik antarindikator. Pada aspek toleransi agama dan budaya, terjadi peningkatan cukup tajam dari 10,5% pada 2022 menjadi 50,2% pada 2023, sebelum turun ke 28,8% pada 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa, meskipun sempat ada perbaikan besar dalam membangun kesadaran lintas budaya dan agama, keberlanjutannya masih perlu diperkuat agar nilai-nilai saling menghormati dapat terinternalisasi lebih stabil di lingkungan sekolah. Di sisi lain, komitmen kebangsaan konsisten berada pada tingkat tinggi dengan capaian di atas 90% selama tiga tahun berturut-turut; hal ini menandakan bahwa semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air masih tertanam kuat di kalangan murid SMK/MAK.



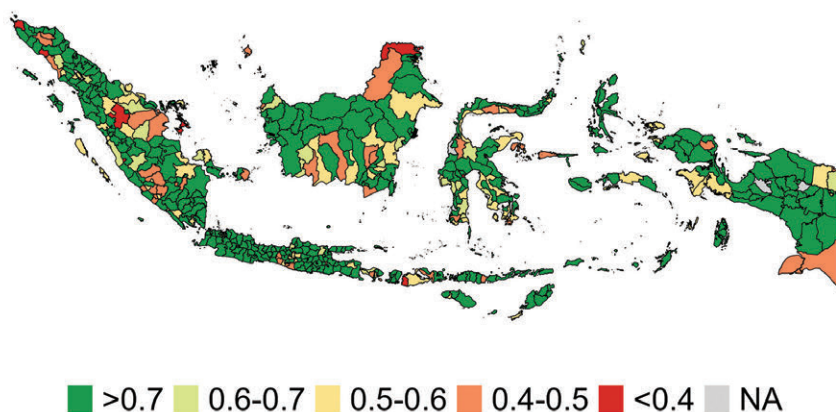
Gambar 7.17 *Heatmap* Proporsi Satuan Pendidikan SMK/MAK dengan Kategori “Baik” pada Iklim Kebinekaan Tahun 2022–2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022–2024 Diolah)

Sementara itu, aspek toleransi dan kesetaraan murid juga menunjukkan perkembangan positif meski tidak sepenuhnya konsisten. Dari 58,5% pada 2022, capaiannya naik menjadi 83% pada 2023, lalu sedikit menurun ke 73,5% pada 2024. Pergerakan ini mengindikasikan adanya kemajuan nyata dalam membangun hubungan yang lebih setara antarmurid, tetapi masih ada tantangan untuk menjaga suasana saling menghargai secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan bahwa SMK/MAK sudah berada pada jalur yang baik dalam membangun iklim kebinekaan meskipun diperlukan penguatan pada aspek toleransi lintas budaya agar capaian positif tidak hanya bersifat sementara, melainkan menjadi bagian dari budaya sekolah yang terus tumbuh dari tahun ke tahun.

Pemerataan Kualitas Guru

Pemerataan kualitas guru dan tenaga kependidikan pada jenjang SMK/MAK merupakan salah satu faktor penting dalam memastikan mutu pendidikan vokasi yang merata di seluruh Indonesia. Data pada peta dan

grafik indeks distribusi guru SMK/MAK tahun 2024 memberikan gambaran betapa persebaran tenaga pendidik masih menunjukkan ketimpangan antarwilayah. Secara umum, daerah dengan indeks di atas 0,7 (warna hijau tua) relatif merata di sebagian besar wilayah barat Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Sumatra. Namun, daerah-daerah dengan indeks di bawah 0,5 (warna oranye hingga merah) masih cukup terlihat di hampir seluruh wilayah Indonesia, khususnya Papua, Kalimantan, dan Sumatra; hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan dalam ketersediaan guru berkualitas di wilayah tersebut.

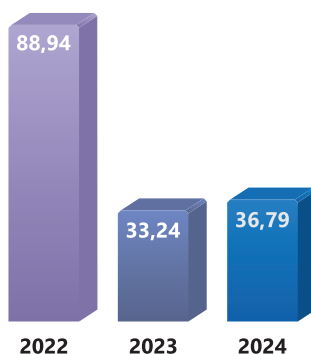


Gambar 7.18 Sebaran Distribusi Guru SMK/MAK Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Pola distribusi ini menegaskan bahwa tantangan utama pemerataan guru tidak hanya berkaitan dengan jumlah, tetapi juga persebaran berdasarkan kebutuhan sekolah. Wilayah dengan indeks tinggi umumnya memiliki akses yang lebih mudah terhadap sumber daya pendidikan, baik dari sisi infrastruktur maupun kebijakan daerah. Sementara itu, daerah dengan indeks rendah sering kali menghadapi kendala dalam menarik dan mempertahankan tenaga pendidik berkualitas karena keterbatasan fasilitas, akses transportasi, hingga kondisi geografis yang menantang. Situasi ini menuntut adanya kebijakan afirmatif yang lebih kuat agar ketimpangan kualitas tenaga kependidikan tidak makin melebar antarwilayah.

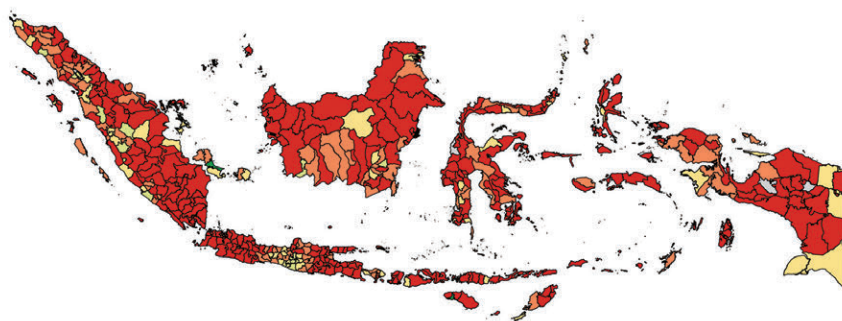
Sertifikasi Guru

Capaian sertifikasi guru pada jenjang SMK/MAK dalam tiga tahun terakhir memiliki capaian yang bervariasi. Tahun 2022 menjadi titik awal dengan proporsi guru tersertifikasi sebesar 88,94%. Sayangnya, pada tahun 2023 diikuti penurunan hingga 33,24% dan terakhir meningkat kembali menjadi 36,79. Penurunan yang terjadi menggambarkan adanya koreksi dan validasi data yang tersedia terhadap sertifikasi guru, sedangkan peningkatan dari tahun 2023 ke 2024 menunjukkan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru.



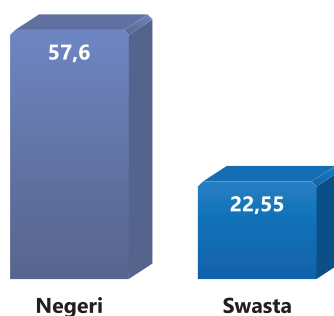
Gambar 7.19 Proporsi Guru Bersertifikat di SMK/MAK Tingkat Nasional Tahun 2022-2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2022-2024 Diolah)

Sayangnya, masih terdapat banyak tantangan di berbagai wilayah. Peta dan grafik sertifikasi guru SMK/MAK memperlihatkan kondisi proporsi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik di seluruh Indonesia pada 2024. Berdasarkan sebaran pada peta, sebagian besar wilayah Indonesia masih didominasi kategori rendah, yaitu dengan proporsi guru bersertifikat di bawah 50%. Wilayah yang berwarna merah dan oranye, seperti sebagian besar Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, menunjukkan bahwa proporsi guru bersertifikat pada provinsi-provinsi di wilayah tersebut masih kurang dari separuh total guru yang ada. Sementara itu, wilayah dengan proporsi tinggi (lebih dari 70%) terlihat terbatas, terutama di beberapa bagian Pulau Jawa.



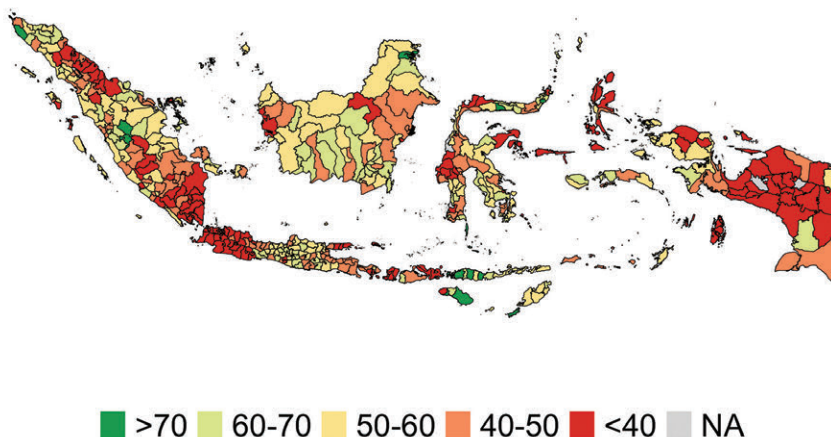
Gambar 7.20 Sebaran Proporsi Guru Bersertifikat di SMK/MAK Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Proporsi guru bersertifikat pada tingkat SMK/MAK menunjukkan kesenjangan cukup besar antara satuan pendidikan negeri dan swasta. Data menunjukkan bahwa 57,6% guru di SMK/MAK negeri telah memiliki sertifikasi, sedangkan pada sekolah swasta angkanya jauh lebih rendah, yaitu hanya 22,55%. Perbedaan ini mencerminkan adanya ketidakmerataan dalam pemenuhan standar kompetensi guru, sekaligus menandakan perlunya upaya penguatan kapasitas bagi sekolah swasta agar kualitas pembelajaran lebih setara.



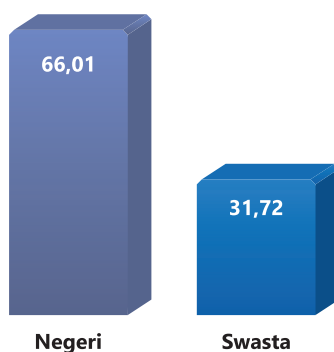
Gambar 7.21 Proporsi guru Bersertifikat di SMK/MAK Berdasarkan Status Sekolah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Pelatihan Guru



Gambar 7.22 Sebaran Pengalaman Pelatihan Guru SMK/MAK Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Peta pengalaman pelatihan Guru SMK/MAK menunjukkan bahwa pemerataan akses pelatihan guru di seluruh Indonesia masih menjadi tantangan besar. Banyak wilayah berada pada kategori rendah, dengan proporsi guru berpengalaman pelatihan di bawah 50%. Warna merah dan oranye yang tampak pada sejumlah daerah di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, bahkan Jawa, mengindikasikan bahwa sebagian besar guru di wilayah tersebut belum memperoleh kesempatan pelatihan yang memadai. Meskipun demikian, jika ditelaah lebih lanjut, daerah dengan warna kuning ataupun hijau muda (mengindikasikan capaian yang lebih baik) juga tersebar khususnya di Jawa, Sumatra, dan Kalimantan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akses terhadap program peningkatan kompetensi belum terdistribusi secara merata, terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur pendidikan.

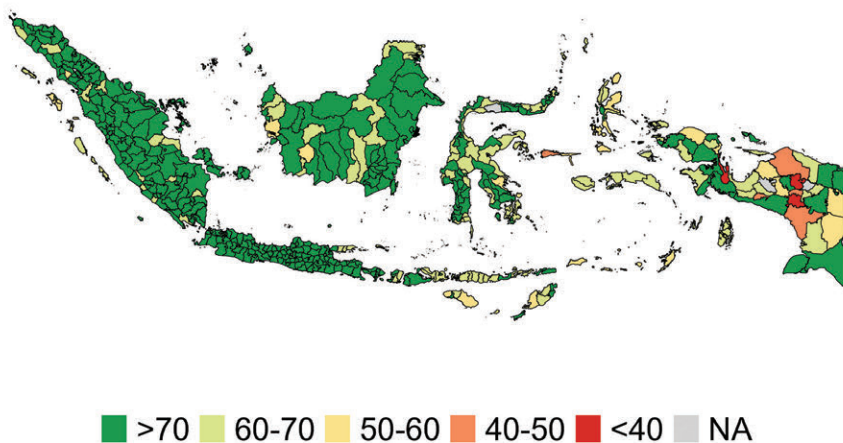


Gambar 7.23 Pengalaman Pelatihan Guru SMK/MAK Berdasarkan Status Sekolah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Data perbandingan antara satuan pendidikan negeri dan swasta juga memperlihatkan kesenjangan yang cukup signifikan. Pada SMK/MAK negeri, proporsi guru yang telah mengikuti pelatihan mencapai 66,01%, sedangkan pada satuan pendidikan swasta angkanya hanya 31,72%. Selisih yang cukup besar ini menunjukkan bahwa guru di satuan pendidikan swasta memiliki hambatan lebih tinggi dalam mengakses program pengembangan profesi. Temuan ini penting diperhatikan karena pengalaman pelatihan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, diperlukan dukungan tambahan bagi satuan pendidikan swasta agar kesenjangan tidak makin melebar.

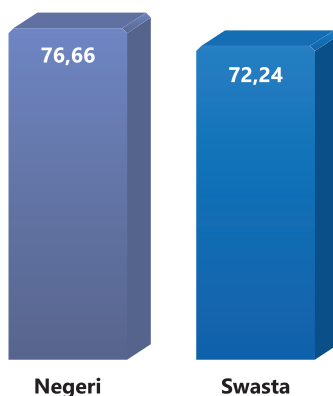
Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan

Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan pada tingkat SMK/MAK memberikan gambaran mengenai tingkat kesiapan sarana dan prasarana yang dimiliki satuan pendidikan dalam mendukung proses pembelajaran. Fasilitas yang memadai berperan penting dalam menciptakan kenyamanan, efektivitas kegiatan belajar, serta pemenuhan kebutuhan peserta didik untuk mencapai kualitas pembelajaran yang baik. Oleh karena itu, peningkatan Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan mutu layanan pendidikan yang lebih merata.



Gambar 7.24 Sebaran Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan SMK/MAK Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Peta Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan SMK/MAK menunjukkan variasi yang cukup beragam antarwilayah. Sebagian besar wilayah Jawa, Bali, dan beberapa bagian Kalimantan terlihat berada pada kategori tinggi dengan warna hijau yang dominan. Sementara itu, sejumlah wilayah di belahan timur Indonesia, terutama Maluku dan Papua, masih berada pada kategori rendah hingga sangat rendah—ditunjukkan oleh warna oranye dan merah. Kondisi ini menandakan bahwa pemerataan fasilitas pendidikan belum sepenuhnya tercapai dan masih dipengaruhi faktor geografis serta ketersediaan sumber daya di masing-masing wilayah. Temuan ini menunjukkan perlunya strategi peningkatan fasilitas yang lebih terarah, terutama pada daerah dengan tingkat akses rendah, agar kualitas layanan pendidikan SMK/MAK meningkat secara merata di seluruh Indonesia.



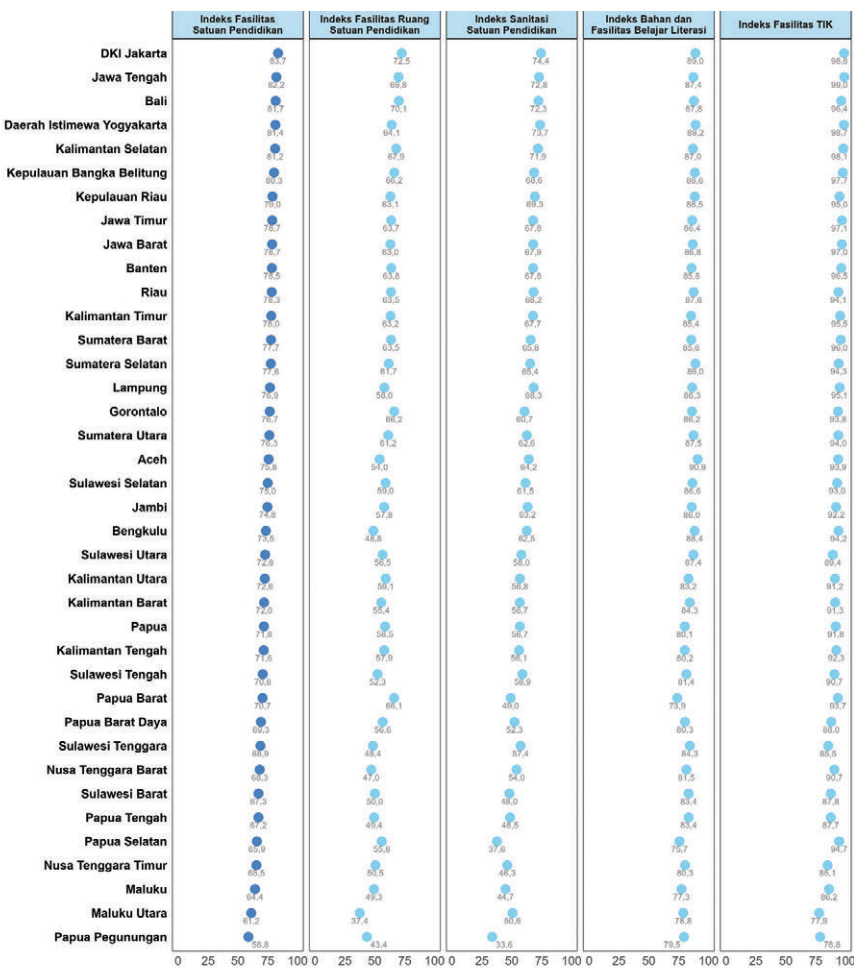
Gambar 7.25 Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan SMK/MAK Berdasarkan Status Sekolah Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Jika dilihat berdasarkan status satuan pendidikan negeri dan swasta, grafik menunjukkan bahwa satuan pendidikan negeri memiliki nilai indeks 76,66%, sementara satuan pendidikan swasta berada pada angka 72,24%. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa, secara rata-rata, fasilitas di satuan pendidikan negeri sedikit lebih baik daripada satuan pendidikan swasta meskipun selisihnya tidak terlalu besar. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua jenis satuan pendidikan pada tingkat SMK/MAK telah memiliki fasilitas yang relatif memadai, tetapi satuan pendidikan swasta masih memerlukan dukungan tambahan untuk mencapai standar fasilitas yang sebanding dengan satuan pendidikan negeri.

Grafik Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan SMK/MAK per provinsi menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi memiliki skor yang cenderung berada pada kategori menengah hingga tinggi untuk indeks fasilitas dasar. Provinsi-provinsi, seperti Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Bali, menempati posisi atas dengan indeks fasilitas yang relatif lebih baik daripada provinsi lain. Sementara itu, beberapa provinsi di kawasan timur Indonesia, seperti Papua, Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan, tampak memiliki skor yang lebih rendah. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan fasilitas antarwilayah.

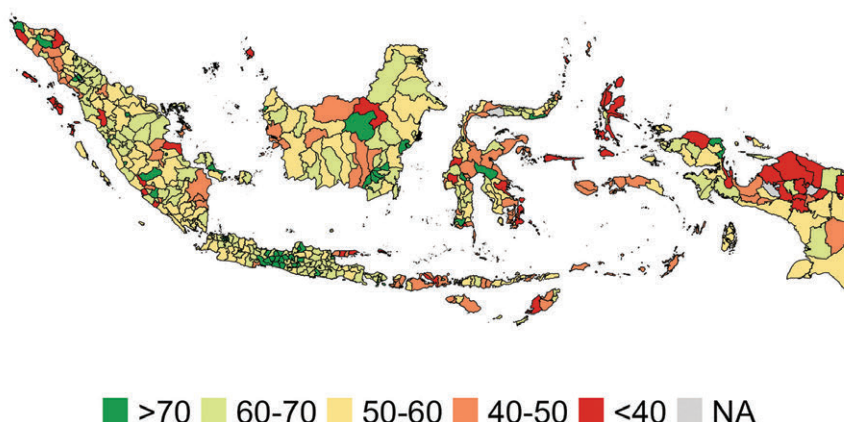
Jika dilihat dari indeks fasilitas ruang satuan pendidikan dan indeks sanitasi, pola yang muncul serupa dengan indeks fasilitas umum. Provinsi-

provinsi di Jawa dan Bali konsisten berada di peringkat tinggi, sementara provinsi di Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua menunjukkan variasi yang lebih besar dan cenderung berada pada kategori menengah hingga rendah. Perbedaan ini dapat mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan sarana belajar yang memadai, termasuk kondisi bangunan, ketersediaan ruang belajar, serta pemeliharaan sanitasi satuan pendidikan.



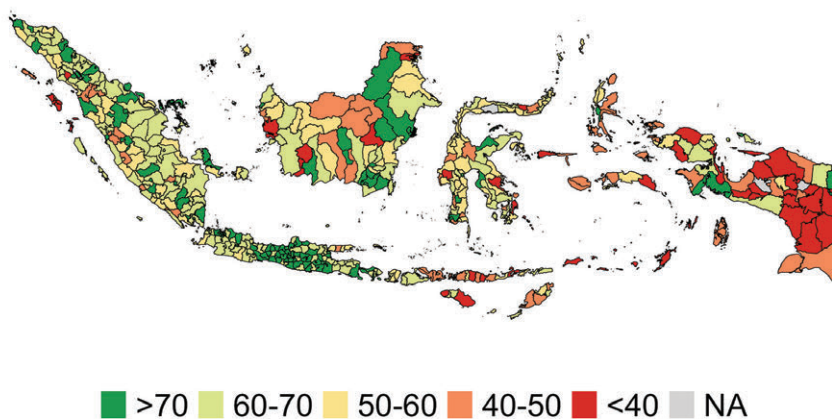
Gambar 7.26 Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan SMK/MAK per Provinsi Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Indeks bahan dan fasilitas belajar literasi serta indeks fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga menunjukkan ketimpangan antarprovinsi. Daerah dengan sumber daya lebih baik, seperti Jawa, Bali, dan sebagian Kalimantan, memiliki skor TIK dan bahan belajar yang lebih tinggi. Sebaliknya, provinsi di kawasan timur masih menghadapi keterbatasan signifikan dalam penyediaan perangkat teknologi serta bahan ajar pendukung pembelajaran. Ketimpangan ini menandakan perlunya penguatan fasilitas pembelajaran, terutama di provinsi dengan capaian rendah, agar kesenjangan mutu pendidikan SMK/MAK antarwilayah dapat diminimalkan.



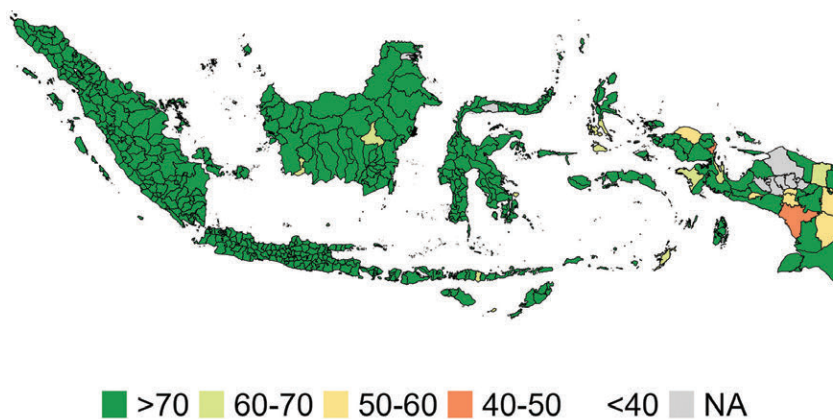
Gambar 7.27 Sebaran Indeks Fasilitas Ruang Satuan Pendidikan SMK/MAK Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Indeks Fasilitas Ruang Satuan Pendidikan SMK/MAK memperlihatkan variasi yang cukup jelas antarwilayah. Sebagian besar wilayah di Jawa, Bali, dan beberapa bagian Kalimantan berada pada kategori menengah hingga tinggi dengan dominasi warna hijau dan kuning. Sebaliknya, wilayah timur Indonesia, seperti Maluku, Papua, dan sebagian Nusa Tenggara, masih menunjukkan skor rendah yang ditandai oleh warna oranye dan merah. Pola ini menegaskan bahwa ketersediaan ruang belajar yang memadai masih belum merata dan dipengaruhi oleh kondisi geografis serta kapasitas daerah dalam menyediakan infrastruktur pendidikan.



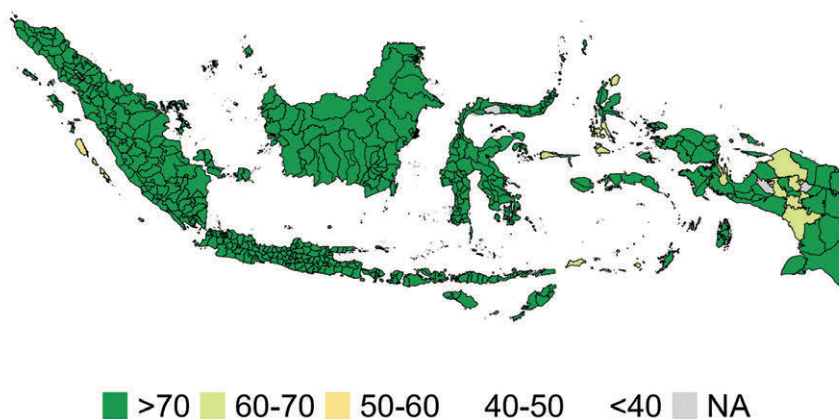
Gambar 7.28 Sebaran Indeks Sanitasi Satuan Pendidikan SMK/MAK Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Dalam hal Indeks Sanitasi Satuan Pendidikan SMK/MAK, Gambar 7.30 menunjukkan ketimpangan yang bahkan lebih nyata jika dibandingkan dengan Indeks Fasilitas Ruang. Wilayah Jawa dan Bali kembali menempati posisi relatif lebih baik dengan skor sanitasi tinggi, sementara sebagian besar provinsi di Papua, Maluku, serta beberapa wilayah di Sulawesi dan Nusa Tenggara berada pada kategori rendah hingga sangat rendah. Dominasi warna merah di kawasan timur menunjukkan masih terbatasnya akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak di satuan Pendidikan; hal ini dapat berdampak pada kenyamanan dan kesehatan murid serta efektivitas pembelajaran sehari-hari.



Gambar 7.29 Sebaran Indeks Bahan dan Fasilitas Belajar Literasi Satuan Pendidikan SMK/MAK Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Indeks Bahan dan Fasilitas Belajar Literasi SMK/MAK menunjukkan capaian yang relatif baik di sebagian besar wilayah Indonesia. Peta didominasi warna hijau yang menandakan skor di atas 70, terutama di Jawa, Bali, Kalimantan, dan sebagian besar Sumatra. Hanya ada sedikit wilayah di bagian timur, seperti Papua dan Maluku, yang terlihat berada pada kategori menengah hingga rendah. Pola ini menunjukkan bahwa ketersediaan bahan belajar dan fasilitas pendukung literasi di banyak provinsi sudah memadai meskipun pemerataan di wilayah timur masih memerlukan perhatian lebih. Di sisi lain, jika dilihat dari capaian literasi, angka dan persebarannya masih belum sesuai dengan Fasilitas Belajar Literasi yang ada. Hal ini mengindikasikan bahwa Fasilitas Belajar Literasi menjadi salah satu pendukung literasi, tetapi masih ada faktor-faktor lain yang berpengaruh.

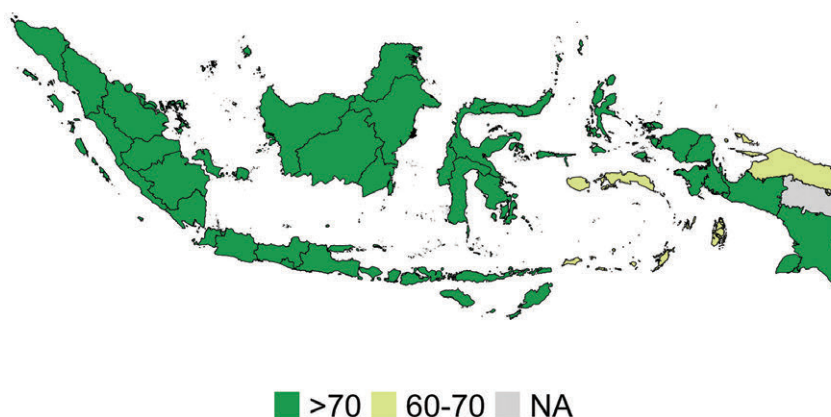


Gambar 7.30 Sebaran Indeks Fasilitas TIK Satuan Pendidikan SMK/MAK Tahun 2024
(Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Indeks Fasilitas TIK SMK/MAK juga memperlihatkan kondisi yang serupa dengan Indeks Literasi. Mayoritas provinsi berada pada kategori tinggi, dengan persebaran warna hijau yang merata di hampir seluruh Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Tantangan masih terlihat di beberapa wilayah Papua dan Maluku yang menunjukkan skor lebih rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa, meskipun akses fasilitas TIK sudah cukup kuat di sebagian besar daerah, peningkatan infrastruktur teknologi di kawasan timur tetap menjadi kebutuhan penting untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi secara merata.

Penyerapan Lulusan SMK/MAK

Tingkat penyerapan lulusan SMK/MAK menjelaskan persentase lulusan SMK/MAK yang melanjutkan studi, bekerja, ataupun berwirausaha. Provinsi-provinsi, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta beberapa wilayah Sumatra dan Kalimantan menunjukkan serapan kerja di atas 70%. Hal tersebut mengindikasikan kuatnya permintaan tenaga kerja vokasi, tersedianya industri padat karya, serta lebih stabilnya hubungan antara sekolah dan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Pola ini memperlihatkan bahwa daerah dengan konsentrasi manufaktur, jasa, dan ekonomi produktif cenderung mampu mengakomodasi lulusan SMK secara lebih optimal.

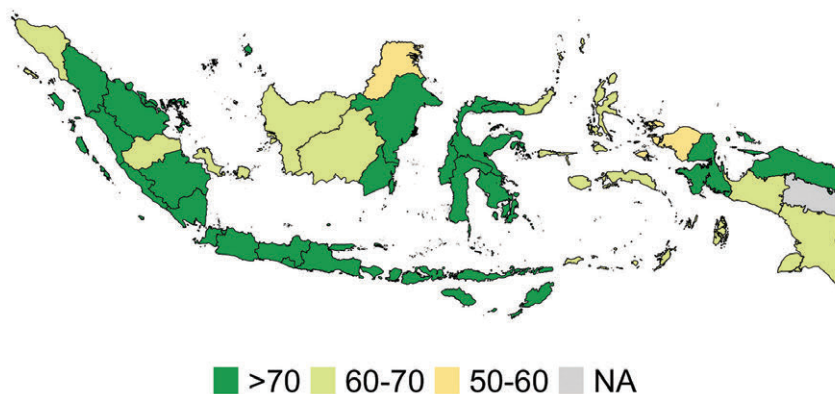


Gambar 7.31 Sebaran Penyerapan Lulusan SMK/MAK Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Sebaliknya, sejumlah provinsi di Indonesia bagian timur, termasuk Papua, Maluku, dan beberapa wilayah Sulawesi, masih berada pada kategori sedang (60%–70%) atau tanpa data (NA). Kondisi ini menandakan keterbatasan lapangan kerja formal, lemahnya jangkauan kemitraan sekolah–industri, serta belum meratanya kualitas program keahlian di sekolah-sekolah setempat. Data ini memperlihatkan adanya kesenjangan struktural antara kapasitas SMK/MAK dalam mencetak lulusan dan kesiapan ekonomi daerah untuk menyerap lulusan tersebut.

Kompetensi Lulusan SMK/MAK

Kompetensi lulusan SMK/MAK ditandai dengan kepemilikan sertifikat keahlian serta kepuasan dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja tempat lulusan bersangkutan bekerja. Dari sisi kompetensi lulusan, wilayah-wilayah, seperti Jawa, Sumatra bagian selatan, dan Kalimantan, serta beberapa wilayah lain yang menunjukkan nilai di atas 70% umumnya memiliki fasilitas praktik yang lebih memadai, guru produktif yang lebih tersertifikasi, serta keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum. Pola ini memperlihatkan bahwa kualitas pengalaman belajar praktik berkontribusi besar terhadap capaian kompetensi lulusan. Kehadiran industri yang aktif menjadi faktor penting dalam memperkuat kesiapan kerja murid, termasuk melalui magang, *teaching factory*, dan sertifikasi.



Gambar 7.32 Sebaran Kompetensi Lulusan SMK/MAK Tahun 2024 (Sumber: Data Rapor Pendidikan 2024 Diolah)

Sementara itu, provinsi dengan nilai kompetensi di kisaran 50%–60% menghadapi tantangan ganda: keterbatasan infrastruktur pembelajaran praktik dan rendahnya intensitas interaksi dengan DUDI. Di beberapa daerah, program keahlian belum selaras dengan potensi ekonomi lokal sehingga kompetensi yang dibangun tidak selalu relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi lulusan perlu difokuskan pada penguatan sarana praktik, peningkatan kompetensi guru produktif, serta penyelarasan kurikulum vokasi dengan peluang ekonomi daerah.

Kesimpulan

Analisis dan temuan dari berbagai indikator dalam Rapor Pendidikan 2022–2024 menunjukkan sejumlah kemajuan penting yang memberikan sinyal positif bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Dalam tiga tahun terakhir, beberapa aspek fundamental, mulai dari akses dan partisipasi, hasil belajar, iklim lingkungan belajar, kualitas guru, hingga ketersediaan fasilitas, mengalami perbaikan bertahap. Meski demikian, pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah dan satuan pendidikan dengan berbagai karakteristik masih menjadi tantangan yang perlu diprioritaskan dan perlu ditangani secara lebih terarah.

Dari sisi partisipasi, akses pendidikan dasar di Indonesia sudah relatif luas; hal ini terlihat dari tingginya angka partisipasi sekolah (APS) pada kelompok usia 7–12 dan 13–15 tahun. Akan tetapi, tingkat partisipasi mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya usia—menandakan adanya tantangan yang muncul pada transisi ke jenjang menengah atas. Disparitas yang tinggi antarwilayah juga masih tampak—ditandai dengan adanya daerah yang mencatatkan APS sangat rendah, khususnya di wilayah timur Indonesia. Partisipasi pada pendidikan kesetaraan dan penyandang disabilitas juga sebagian besar masih berada di bawah angka 60%. Ketimpangan antargender juga makin melebar pada kelompok usia remaja (16–18 tahun).

Upaya perbaikan kualitas pembelajaran juga mulai membuahkan hasil di banyak wilayah. Hal ini terlihat dari capaian literasi dan numerasi SD, SMP, SMA, dan SMK yang menunjukkan tren peningkatan proporsi satuan pendidikan yang konsisten mencapai kompetensi minimum dalam tiga tahun terakhir. Namun, kenaikan ini belum merata di seluruh wilayah. Jawa, Bali, serta sebagian Sumatra dan Kalimantan secara konsisten mencatatkan hasil

yang lebih tinggi, sedangkan wilayah timur Indonesia, seperti Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, masih menunjukkan capaian yang lebih rendah. Kesenjangan juga terlihat antarwilayah (tertinggal dan nontertinggal), dengan capaian literasi dan numerasi di wilayah tertinggal cukup jauh di bawah capaian wilayah nontertinggal (selisih 20–31 poin). Faktor status sosial ekonomi (SSE) satuan pendidikan turut memperlebar jurang kesenjangan tersebut, dengan selisih satuan pendidikan SSE 20% terbawah dan SSE 20% teratas mencapai 16–21 poin. Temuan ini menegaskan bahwa perbaikan kualitas capaian hasil belajar literasi dan numerasi membutuhkan strategi tambahan agar mampu menjangkau kelompok-kelompok yang lebih rentan.

Tingkat penyerapan lulusan masih menunjukkan ketimpangan yang cukup besar antarwilayah. Wilayah barat memiliki keterserapan lulusan lebih baik daripada wilayah timur. Pola serupa terlihat pada kompetensi lulusan yang cenderung lebih tinggi di daerah dengan industri aktif dan fasilitas praktik memadai. Di wilayah tertinggal, keterbatasan lapangan kerja formal dan lemahnya kemitraan dengan industri menjadi hambatan utama. Temuan ini menegaskan pentingnya penyelarasan kurikulum SMK dengan potensi ekonomi lokal serta penguatan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) untuk meningkatkan relevansi dan daya saing lulusan.

Analisis capaian indikator Karakter pada periode 2022–2024 menunjukkan bahwa penguatan karakter di satuan pendidikan masih menghadapi tantangan serius di semua jenjang. Meskipun SD/MI/Sederajat sempat mencatatkan peningkatan signifikan, terutama pada aspek kognitif, seperti kreativitas dan nalar kritis, pola capaian di SMP/MTs/Sederajat dan SMA/MA/Sederajat menunjukkan tren penurunan yang konsisten dan fluktuatif antarsubindikator. Penurunan paling tajam terlihat pada aspek Beriman dan Berakhlak Mulia, Gotong Royong, serta Kebinekaan Global, sementara Kemandirian menjadi aspek dengan capaian terendah dan tidak stabil. Kondisi ini menguat di jenjang SMK/MAK: proporsi satuan pendidikan dengan kategori “Baik” menurun dan hampir semua subindikator menunjukkan ketidakstabilan capaian. Keseluruhan capaian ini menggambarkan dinamika pembinaan karakter yang belum konsisten dan perlu diintegrasikan secara kuat ke dalam praktik pembelajaran sehari-hari.

Proses pembelajaran yang berkualitas menjadi salah satu aspek kunci dalam menentukan tercapainya hasil belajar yang optimal. Secara

keseluruhan, kualitas pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan mengalami tren perbaikan. Akan tetapi, peningkatannya belum merata dan masih menghadapi tantangan pada aspek tertentu. Di SD/MI/Sederajat, kualitas pembelajaran mengalami peningkatan, terutama pada aspek Metode Pembelajaran, tetapi aspek Manajemen Kelas justru menurun. Capaian kualitas pembelajaran di jenjang SMP/MTs/Sederajat meningkat secara bertahap meski aspek Dukungan Psikologis dan Metode Pembelajaran masih berfluktuasi dan cenderung menurun. Sementara itu, jenjang SMA/MA/Sederajat mencatatkan kenaikan yang konsisten, tetapi aspek Dukungan Psikologis masih lemah. Senada dengan SMA, SMK/MAK juga memperlihatkan tren positif selama tiga tahun terakhir, tetapi masih menghadapi tantangan pada aspek Dukungan Psikologis. Temuan lintas jenjang ini menegaskan bahwa perbaikan kualitas pembelajaran di seluruh jenjang sudah mulai terlihat, tetapi diperlukan penguatan kapasitas guru dalam aspek pedagogis dan psikologis untuk memperbaiki capaian secara menyeluruh.

Terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan merupakan faktor penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang kondusif dan mewujudkan hasil belajar murid yang optimal. Data Rapor Pendidikan 2022–2024 menunjukkan bahwa capaian Iklim Keamanan telah bergerak ke arah positif meskipun mempertahankan capaian tersebut secara konsisten masih menjadi tantangan. Pada jenjang SD/MI/Sederajat, capaian tetap berada pada kategori “Baik” meskipun mengalami penurunan. Perbaikan terlihat pada aspek Pengalaman Hukuman Fisik Murid dan Pengalaman Murid Terkait Narkoba, Rokok, dan Miras, sementara penurunan tajam terjadi pada Kesejahteraan Psikologis Guru serta Pengalaman dan Sikap Guru tentang Kekerasan Seksual. Pola serupa tampak pada jenjang SMP/MTs/Sederajat dan SMA/MA/Sederajat. Capaian sempat membaik pada beberapa indikator, seperti Pengalaman Murid Terkait Perundungan dan Kekerasan Seksual, tetapi kembali menurun pada 2024, terutama pada aspek Kesejahteraan Psikologis Guru serta Pengalaman Murid Terkait Perundungan dan Kekerasan Seksual. Pada jenjang SMK/MAK, capaian juga meningkat sebelum kembali turun, dengan tantangan utama pada Kesejahteraan Psikologis Guru serta Pengalaman Murid Terkait Narkoba, Rokok, dan Miras. Selain itu, Iklim Keamanan berkaitan positif dengan capaian literasi sehingga penguatan Iklim Keamanan menjadi komponen penting dalam mendukung

peningkatan kualitas hasil belajar. Secara keseluruhan, satuan pendidikan telah relatif berhasil menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, tetapi penguatan berkelanjutan masih diperlukan, terutama terkait kesejahteraan psikologis guru dan peningkatan kapasitas pendidik dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan.

Selain lingkungan belajar yang aman, suasana lingkungan belajar yang menerima perbedaan, inklusif, dan bebas dari diskriminasi juga merupakan aspek krusial untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar murid. Secara keseluruhan, upaya penguatan dalam mewujudkan lingkungan belajar yang toleran dan inklusif secara konsisten perlu dilakukan oleh seluruh tingkat satuan pendidikan. Capaian Iklim Kebinekaan di seluruh jenjang pendidikan menunjukkan pola serupa pada tiga tahun terakhir meskipun masing-masing jenjang memiliki karakteristik perubahan yang berbeda. Pada tingkat SD/MI/Sederajat, skor total mengalami penurunan tipis akibat melemahnya sikap toleransi, kesetaraan murid, dan komitmen kebangsaan, tetapi jumlah satuan pendidikan berkategori “Baik” pada toleransi agama dan budaya meningkat signifikan. Pada tingkat SMP/MTs/Sederajat, fluktuasi terlihat lebih tajam, dengan capaian tertinggi pada 2023 sebelum menurun pada 2024. Toleransi dan Kesetaraan Murid mengikuti pola tersebut, sedangkan Komitmen Kebangsaan terus mengalami penurunan sejak 2022 dan menjadi aspek yang konsisten turun. Tingkat SMA/MA/Sederajat dan SMK/MAK juga menunjukkan dinamika serupa. Capaian meningkat pada 2023, lalu turun pada 2024, dengan seluruh subindikator berfluktuasi. Namun, pada tingkat SMA/MA/Sederajat, Komitmen Kebangsaan mengalami penurunan pada tahun terakhir meskipun masih tergolong tinggi, sementara di tingkat SMK/MAK, Komitmen Kebangsaan konsisten tinggi dan menjadi aspek paling kuat, dibandingkan dengan tingkat-tingkat lainnya.

Selama tiga tahun terakhir, pemerataan guru telah menunjukkan kemajuan meskipun perkembangan tersebut belum sepenuhnya merata di semua wilayah dan jenjang pendidikan. Selisih ketercukupan antara wilayah tertinggal dan nontertinggal yang hanya sekitar 0,1–0,5 poin menunjukkan bahwa upaya pemerataan guru cukup positif.

Namun, pemerataan ini belum dibarengi oleh peningkatan kualitas yang optimal. Meskipun pelatihan guru mulai dapat diakses oleh lebih

banyak wilayah, tetapi sertifikasi guru justru menurun pada rentang 40%-50% selama tiga tahun terakhir. Hal ini dikarenakan oleh tingginya angka pensiun guru bersertifikat, pesatnya pertumbuhan guru dalam jabatan yang belum tersertifikasi, dan terbatasnya kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pemerataan guru bersertifikasi juga belum optimal sehingga masih menunjukkan ketimpangan yang masif. Pada sebagian besar wilayah di Jawa dan kota besar, mayoritas guru sudah bersertifikasi, sementara sebagian besar wilayah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua, Maluku NTT terutama pada wilayah rural, guru bersertifikat masih rendah.

Secara umum, Indeks Fasilitas Satuan Pendidikan di Indonesia menunjukkan kondisi yang sudah cukup baik, tetapi ketimpangan antarwilayah masih menjadi pola utama di semua jenjang. Wilayah-wilayah di Jawa, terutama Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya, konsisten memiliki fasilitas paling memadai, sementara wilayah timur Indonesia, seperti Papua dan Maluku, tetap menjadi kantong capaian terendah, terutama pada kabupaten pegunungan dan daerah yang sulit dijangkau. Di seluruh jenjang, disparitas paling tajam tampak pada fasilitas ruang dan sanitasi, yang masih banyak tertinggal di wilayah timur. Sebaliknya, indikator literasi dan TIK cenderung lebih merata meskipun Maluku dan Papua masih menunjukkan kekurangan pada aspek TIK. Kesetaraan fasilitas antara satuan pendidikan negeri dan swasta relatif seimbang, dengan jenjang SD cenderung lebih baik pada satuan pendidikan swasta, sementara pada jenjang SMP, SMA, dan SMK sedikit lebih tinggi di satuan pendidikan negeri. Meskipun pada tingkat SMP dan SMA terlihat makin banyak wilayah yang mencapai indeks fasilitas tinggi, ketimpangan antarwilayah tetap konsisten memperlihatkan bahwa wilayah barat dan perkotaan memiliki kondisi yang jauh lebih baik daripada wilayah timur dan daerah terpencil. Secara keseluruhan, pola capaian di semua jenjang menunjukkan bahwa pemerataan fasilitas, khususnya ruang belajar dan sanitasi, masih menjadi tantangan utama untuk memastikan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik di Indonesia.

Rekomendasi

Hasil analisis dalam dokumen ini menunjukkan bahwa ekosistem pendidikan Indonesia terus bergerak ke arah positif—ditandai dengan

meningkatnya capaian pada berbagai aspek, seperti hasil belajar (literasi dan numerasi), perluasan akses pendidikan, perbaikan kualitas pembelajaran, dan iklim lingkungan belajar. Meski demikian, capaian positif masih diiringi dengan tantangan pemerataan yang masih signifikan dalam berbagai aspek. Ketimpangan antarwilayah, antarstatus sosial ekonomi, dan antarstatus satuan pendidikan (negeri dan swasta) tetap terlihat pada sebagian besar indikator. Oleh karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan perlu menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, baik dalam memperkuat aspek yang sudah mengalami kemajuan maupun mengatasi kesenjangan yang masih lebar. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa rekomendasi langkah perbaikan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Pemerataan partisipasi pendidikan untuk kelompok dengan capaian rendah.

- a. Perluasan akses pendidikan bagi kelompok usia 16–18 tahun (SMA dan SMK) dengan cara:
 - Menyusun strategi transisi SMP menuju SMA/SMK dengan mengidentifikasi kebutuhan menyangkut rencana studi terkait minat dan bakat atau kebutuhan keterampilan berdasarkan karakteristik wilayah.
 - Melakukan sinkronisasi pendataan pada Dapodik dan Dukcapil, terutama untuk murid yang berpotensi tinggi untuk tidak melanjutkan pendidikan.
 - Perluasan beasiswa afirmasi, sekolah berasrama, dan sekolah satu atap SMP–SMA/SMK di kecamatan sulit akses.
 - Dukungan transportasi/akomodasi (subsidi transpor sekolah, *boarding*) bagi murid yang tinggal jauh dari sekolah menengah.
 - Menetapkan target APS kelompok usia 16–18 tahun yang eksplisit dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD/Renstra Disdik).
 - Memberikan apresiasi kinerja kepada daerah khusus yang berhasil menaikkan APS pada kelompok usia 16–18 tahun.
- b. Penyusunan strategi spesifik berbasis gender pada kelompok usia 13–18 tahun melalui:

- Program pencegahan *drop-out* laki-laki (terutama bagi pekerja anak) melalui skema pendidikan sambil bekerja, sekolah terbuka, atau paket B/C yang terintegrasi.
 - Penguatan perlindungan bagi murid perempuan (mencegah perkawinan anak, kekerasan, dan hambatan struktural lain untuk melanjutkan sekolah).
 - Melakukan perencanaan anggaran responsif gender, misalnya dengan memberikan beasiswa kepada laki-laki di daerah dengan angka putus sekolah tinggi atau kepada perempuan di daerah dengan angka pernikahan dini tinggi.
- c. Mengakselerasi peningkatan kualitas layanan dan akses pendidikan bagi murid penyandang disabilitas melalui:
- Pelatihan intensif bagi guru di sekolah umum untuk melakukan identifikasi dini terkait karakteristik anak berkebutuhan khusus (ABK) dan strategi mengajar yang sesuai.
 - Mengembangkan unit layanan disabilitas (ULD) yang berfungsi sebagai konsultasi dan penyedia alat bantu.
 - Menempatkan guru pembimbing khusus di sekolah inklusi.
 - Pengembangan kurikulum individual yang spesifik untuk siswa disabilitas.
 - Penyediaan alat bantu belajar (Braille, *audio book*, dll.) atau penggunaan teknologi bantu (*assistive technology*) bagi penyandang disabilitas.
 - Menyediakan sarana yang ramah bagi penyandang disabilitas, misalnya jalan untuk kursi roda, toilet ramah disabilitas, ataupun *guiding block* untuk penyandang tunanetra.
 - Menyediakan afirmasi kuota untuk kelompok rentan di sekolah.
- d. Upaya lebih terarah untuk memastikan bahwa Pendidikan Kesetaraan lebih mudah diakses semua kalangan dengan cara:
- Menawarkan pembelajaran yang fleksibel, misalnya pada malam hari atau akhir pekan.
 - Menawarkan skema pembelajaran *blended learning* pada PKBM atau modul mandiri sehingga memungkinkan murid belajar secara asinkron.

- Menyediakan modul kewirausahaan dengan manajemen sederhana.
 - Menerapkan pengakuan pengalaman (Rekognisi Pembelajaran Lampau) kerja murid sehingga menjadi kredit mata pelajaran yang dapat dikonversi sebagai nilai untuk mempercepat kelulusan.
 - Integrasi pelatihan keterampilan kerja vokasi yang bersertifikat, misalnya keterampilan tata boga, bengkel, atau keterampilan digital lain.
2. **Menyusun skema intervensi khusus daerah tertinggal dan satuan pendidikan dengan status ekonomi rendah pada satuan pendidikan SD, SMP, dan SMA untuk peningkatan dan pemerataan capaian literasi dan numerasi**
- a. Melakukan prioritas program-program peningkatan literasi dan numerasi, khususnya di wilayah NTT, Maluku, Papua dan kabupaten/kota berkinerja rendah, secara masif dan intensif untuk meningkatkan kebiasaan literasi dan numerasi (misalnya dengan *literacy boost* selama 2–3 tahun).
 - b. Penggunaan skema afirmatif pada BOS/DAK untuk mendanai program perbaikan pembelajaran di wilayah kinerja terendah.
 - c. Melakukan integrasi program perlindungan sosial, misalnya Program Indonesia Pintar dengan kewajiban kehadiran dan capaian belajar minimal murid.
3. **Peningkatan serapan lulusan melalui potensi ekonomi lokal dan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).**
- a. Penyesuaian konsentrasi keahlian dengan sektor unggulan daerah (pertanian, pariwisata, maritim, industri kreatif, dll.).
 - b. Pelibatan DUDI sejak tahap perencanaan kurikulum.
 - c. Perluasan nota kesepahaman (MoU) dan *link and match* yang konkret (magang, guru tamu dari industri, kelas industri, penyediaan peralatan praktik).
 - d. Inkubator bisnis kecil di SMK (koperasi murid, usaha sekolah) yang relevan dengan potensi lokal.

4. Penguatan pendidikan karakter di seluruh jenjang pendidikan agar selaras dengan profil lulusan yang diharapkan.

- a. Menyelenggarakan program khusus reorientasi pendidikan karakter di seluruh jenjang melalui *peer mentoring*, kegiatan organisasi murid, dan proyek sosial lintas kelompok.
- b. Meningkatkan komunikasi dengan orang tua murid dan masyarakat untuk mengurangi pengaruh negatif (geng, perilaku berisiko, intoleransi) melalui *parenting day* dan pelibatan sebagai narasumber di sekolah untuk meningkatkan ikatan (*bonding*) sebagai komunitas.
- c. Menambah aspek supervisi bagi pengawas kepala sekolah dan guru terkait praktik peningkatan karakter di kelas dan upaya pembentukan karakter sebagai budaya sekolah.
- d. Mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran sehari-hari.

5. Mengoptimalkan program peningkatan kapasitas guru dalam mendorong kualitas pembelajaran yang lebih optimal.

- a. Pelatihan terstruktur, berkelanjutan, dan merata untuk semua guru terkait pembelajaran berdiferensiasi, aktif, dan kritis.
- b. Pendampingan berkelanjutan (*coaching, lesson study*), bukan hanya pelatihan satu kali.
- c. Menjadikan sekolah berkategori menengah sebagai sasaran utama akselerasi karena dampak peningkatan kualitas pembelajaran di kelompok ini paling besar terhadap hasil belajar.
- d. Proporsi tertentu BOS/BOSP diarahkan spesifik untuk peningkatan kualitas mengajar (buku bermutu, pelatihan, kolaborasi guru, media belajar).
- e. Mengoptimalkan kelompok belajar kepala sekolah dan guru untuk saling berbagi praktik baik dan memberi dukungan psikologis.
- f. Penguatan peran kepala satuan pendidikan sebagai *instructional leader* agar mampu memberikan pendampingan dan supervisi kepada guru dalam hal membangun praktik pembelajaran yang berkualitas.
- g. Pada daerah sulit, melakukan pendataan sekolah yang memiliki kinerja positif untuk menjadi contoh (*role model*) berbagi praktik baik.

6. Optimalisasi program pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan

- a. Membuat prosedur operasional standar (SOP) antikekerasan, *antibullying*, dan penanganan kekerasan seksual diterapkan di semua satuan pendidikan.
- b. Menyusun kanal pelaporan yang aman dan mudah diakses murid (kotak pengaduan, kanal digital, pihak ketiga independen).
- c. Mengoptimalkan peran tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK), kanal aduan, dan pendampingan kuratif berbasis kemitraan, peningkatan literasi keselamatan, dan partisipasi murid–orang tua. Ruang lingkup peran TPPK di satuan pendidikan perlu dibuat lebih konkret dan bukan hanya berperan insidental jika ada kasus, melainkan juga secara proaktif melakukan upaya pencegahan kekerasan di satuan pendidikan.
- d. Menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan aparat penegak hukum yang relevan untuk kampanye serta penanganan terpadu narkoba, rokok, miras, dan kekerasan di sekitar satuan pendidikan.
- e. Menambahkan aspek keamanan sebagai indikator pendampingan dan supervisi satuan pendidikan.

7. Optimalisasi program yang mendorong kesejahteraan psikologis guru

- a. Mengidentifikasi dan melakukan evaluasi beban kerja guru, terutama untuk guru yang memiliki tugas ganda, seperti bendahara satuan pendidikan.
- b. Mengimplementasikan program kesehatan mental untuk guru berupa layanan konseling, *stress management*, atau meningkatkan dukungan komunitas.
- c. Menyediakan ruang aman bagi guru untuk berbagi pengalaman dan permasalahan yang dihadapi.

8. Penguatan kebinekaan sebagai budaya sekolah

- a. Membuat program rutin yang mendorong interaksi lintas agama, suku, dan latar belakang (misalnya proyek kolaboratif, forum dialog murid).

- b. Penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru dalam mengelola kelas yang beragam (agama, budaya, gender, disabilitas).
- c. Membuat modul pembelajaran kebinekaan yang kontekstual.
- d. Melibatkan dan berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk membangun ekosistem yang inklusif secara menyeluruh dan memperkaya pengalaman murid dalam membangun kebinekaan.

9. Penyempurnaan kebijakan distribusi guru

- a. Penataan ulang distribusi guru dengan menggunakan data kebutuhan riil per sekolah (mempertimbangkan jumlah murid, lokasi, dan kondisi khusus).
- b. Afirmasi seleksi Guru Garis Depan yang berasal dari daerah setempat.

10. Penguatan dukungan bagi guru di seluruh wilayah terutama wilayah sulit akses

- a. Prioritas sertifikasi bagi guru terutama untuk wilayah rural untuk percepatan pemerataan.
- b. Perluasan kesempatan sertifikasi melalui peningkatan jumlah universitas pembina dan perluasan akses PPG.
- c. Penguatan sistem pelaporan dan pemantauan pelatihan berbasis kinerja untuk mendorong partisipasi guru dalam peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.
- d. Integrasi dan pengalokasian anggaran pelatihan dalam perencanaan sekolah untuk memastikan kesinambungan pengembangan kompetensi.
- e. Penguatan kelompok kerja guru/musyawarah guru mata pelajaran (KKG/MGMP) sebagai pusat belajar guru yang berkelanjutan, bukan hanya forum administratif.
- f. Optimalisasi Ruang GTK sebagai pusat pelatihan berbasis praktik dan pembelajaran sejawat.

11. Pemerataan infrastruktur pendukung pembelajaran

- a. Penetapan standar pelayanan minimal (SPM) fasilitas dasar yang wajib dipenuhi dengan monitoring ketat.

- b. Prioritas DAK fisik dan BOS fisik untuk ruang kelas, sanitasi, dan akses air bersih di Papua, Maluku, NTT, dan wilayah tertinggal lainnya.
- c. Program pendampingan sekolah dalam mengelola perpustakaan, pojok baca, dan TIK sebagai bagian dari pembelajaran harian, bukan sekadar pajangan.
- d. Penguatan peran pustakawan/guru literasi di sekolah, termasuk pelatihan strategi membaca dan menulis berbasis fasilitas yang tersedia.

- Abrams, L. M., Varier, D., & Mehdi, T. (2021). The intersection of school context and teachers' data use practice: Implications for an integrated approach to capacity building. *Studies in Educational Evaluation*, 69. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2020.100868>
- Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Balitbangbuk). (2019). *Kajian akademik dan rekomendasi reformasi sistem asesmen nasional*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan & Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). (2023). *Tentang Perencanaan Berbasis Data (PBD)*. <https://pusatinformasi.raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id/hc/en-us/articles/6560862845081-Tentang-Perencanaan-Berbasis-Data-PBD>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). (2024, 29 Juli). *Kegunaan Asesmen Nasional pada Rapor Pendidikan*. <https://pusatinformasi.raporpendidikan.kemendikdasmen.go.id/hc/id/articles/6545994268185-Kegunaan-Asesmen-Nasional-pada-Rapor-Pendidikan>
- Levin, J. A., & Datnow, A. (2012). The principal role in data-driven decision making: using case-study data to develop multi-mediator models of educational reform. *School Effectiveness and School Improvement*, 23(2), 179–201. <https://doi.org/10.1080/09243453.2011.599394>
- Mandinach, E. B., & Gummer, E. S. (2016). What does it mean for teachers to be data literate: Lenses and issues. *Teaching and Teacher Education*, 60, 366–376. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.07.011>
- Wang, Y. (2021). What is the role of emotions in educational leaders' decision making? Proposing an organizing framework. *Educational Administration Quarterly*, 57(3), 372–402. <https://doi.org/10.1177/0013161X20938856>

Laporan ini disusun dengan memanfaatkan sepenuhnya data Rapor Pendidikan sebagai salah satu keluaran utama Evaluasi Sistem Pendidikan, sekaligus menjembatani temuan-temuan teknis dengan kebutuhan perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat maupun daerah. Di tengah upaya penguatan perencanaan berbasis data, laporan ini diharapkan dapat menjadi rujukan ringkas bagi para pengambil keputusan dalam membaca kondisi aktual sistem pendidikan Indonesia, baik dari sisi capaian, kesenjangan, maupun area prioritas yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Laporan ini merangkum perkembangan periode 2022–2024, masa krusial pascapandemi ketika sekolah mulai kembali beroperasi penuh dan berbagai program pemulihan pembelajaran dijalankan. Analisis difokuskan pada indikator-indikator prioritas dalam Rapor Pendidikan, yaitu Literasi, Numerasi, Karakter, Kualitas Pembelajaran, Iklim Keamanan, dan Iklim Kebinekaan, yang diperkaya dengan telaah mengenai kualitas guru dan tenaga kependidikan, tata kelola, serta infrastruktur pendidikan. Selain menggambarkan tren capaian nasional, laporan ini juga menyoroti secara khusus dinamika kesenjangan antarkelompok wilayah (tertinggal dan nontertinggal), status sosial ekonomi satuan pendidikan, jenjang pendidikan, serta perbedaan antara satuan pendidikan negeri dan swasta. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya menampilkan siapa yang sudah tinggi capaian mutunya, tetapi juga di mana dan mengapa ketertinggalan masih terjadi.

Kami menyadari, laporan ini memiliki keterbatasan. Analisis yang tersaji bertumpu pada indikator prioritas dan ketersediaan data dalam ekosistem Rapor Pendidikan sehingga tidak semua aspek pendidikan dapat dibahas secara terperinci. Namun, kami meyakini bahwa temuan-temuan yang dihimpun telah cukup untuk memberikan gambaran utuh mengenai kemajuan, tantangan, dan titik-titik kritis yang perlu direspons melalui kebijakan dan program yang lebih terarah. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi, mulai dari satuan pendidikan, pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, hingga mitra pembangunan yang selama ini terlibat dalam penguatan pemanfaatan Rapor Pendidikan dan Evaluasi Sistem Pendidikan.

